MAKINUDDIN AIR UNTUK SECANGKIR KOPI PETANI

AKATIGA

WORLD EDUCATION

MAKINUDDIN

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro

AIR UNTUK SECANGKIR KOPI PETANI

REFLEKSI PENGALAMAN ADVOKASI IRIGASI DI WAY SEPUTIH

AIR UNTUK SECANGKIR KOPI PETANI

Refleksi Pengalaman Advokasi Irigasi di Way Seputih

Makinuddin

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro

YAYASAN AKATIGA
Jl. Cilamaya 7 , Bandung 40115 Indonesia
Telp. 022 4235526, Fax 022 4260875
E-mail: akatiga@indosat.net.id
Homepage: www.akatiga.or.id

WORLD EDUCATION INDONESIA
Jl. Tebet Dalam IV D/5A Jakarta 12810
Tel. 021-8297228, Fax. 021-8307591
E-mail: weindo@indo.net.id

AIR UNTUK SECANGKIR KOPI PETANI
Refleksi Pengalaman Advokasi Irigasi di Way Seputih

Penulis	:	Makinuddin
Kata Pengantar	:	Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro
Penyunting Bahasa	:	Sonya Sondakh
Tata Letak & Desain Sampul	:	Pamuji Slamet

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Makinuddin
Air Untuk Secangkir Kopi Petani - Refleksi Pengalaman Advokasi Irigasi di Way Seputih / Makinuddin. –
Kata Pengantar : Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro. - Bandung
Yayasan AKATIGA, 2004
Xxxvi, 105 hlm.; 20

Bibliografi
ISBN : 979-8589-38-6

1. Air 2. Petani 3. Advokasi

I. Judul

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan AKATIGA dan World Education Indonesia
Bandung, Mei 2004

Hak cipta dilindungi undang-undang

Abstrak

Kerakusan sistem pasar telah merubah fungsi sosial air manjadi sekedar komoditas yang dapat diperjualbelikan. Situasi ini secara sistematis mengubah pola hubungan manusia dengan lingkungan alam yang selama ini menjadi sumber inspirasi kultural dan spiritual masyarakat. Dalam konteks pembangunan pertanian, praktik pengelolaan irigasi yang lebih beraspek teknis dan meminggirkan dimensi manusiawi juga telah mendorong hancurnya persekutuan panjang antara manusia dan alam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Air yang awalnya merupakan basis solidaritas manusia berubah menjadi sumber konflik vertikal dan horisontal di lingkungan petani. Untuk itu, buku *Refleksi Advokasi Irigasi* ini berusaha menawarkan dua aspek penting dalam advokasi irigasi: 1) Pendekatan manusiawi atas penyelesaian konflik irigasi dengan menempatkan pelaku konflik sebagai korban; 2) Menempatkan analisis sosial sebagai bagian penting dalam kerja advokasi irigasi.

Kata Pengantar

Sejak sekitar 40 tahun lalu, waktu banyak negara di dunia ketiga berusaha mengatasi kemiskinan dan kekurangan pangan sebagai tindak awal melaksanakan pembangunan nasional yang lebih luas, istilah penyuluhan (*extension*) menjadi populer.

Penyuluhan dalam pembangunan pertanian semasa Revolusi Hijau mementingkan penyebaran teknologi melalui penanaman bibit unggul gandum, jagung, padi, penggunaan pupuk buatan (anorganik/kimia), penggunaan obat-obatan pencegah hama-penyakit, dan bahkan dengan mengantarkan cara tanam jajar, sistem panen tebasan, dan lain-lain.

Dalam rangka itu penyuluh-penyuluh boleh dikatakan menggurui kaum tani yang umumnya masih kurang pendidikannya dan terbiasa pada cara-cara tradisional. Dalam periode itulah World Education Indonesia (WEI) dalam suatu kerja sama dengan LSM Jaringan Wakak Jukuk Lampung (JWJL) melakukan kegiatannya selama kurang lebih satu dasawarsa.

Pilihan Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, tampaknya cukup menarik karena adanya daerah aliran sungai Way Seputih di mana terdapat daerah pertanian luas dengan irigasi teknis yang dibangun sejak tahun 1971.

Ditinjau dari beberapa sudut pandang, kasus ini memang menarik dan berpotensi untuk mengembangkan teknologi pertanian mutakhir. Tidak kurang menariknya karena penduduk di Way Seputih bercorak multi-etnis, kecuali penduduk Lampung telah berbaur dengan transmigran dari Jawa dan Bali, juga ada desa-desa yang dihuni oleh purnawirawan angkatan bersenjata.

Pada umumnya apabila suatu daerah dibuka untuk transmigrasi, maka prasarana dan pertumbuhan kota akan menunjukkan kemajuan pesat. Ini ditunjukkan dengan adanya pasar, toko-toko, bahkan kantor-kantor pemerintah setempat dan gedung-gedung hiburan seperti bioskop. Tetapi bersamaan dengan tumbuhnya daerah perkotaan, kebutuhan akan air dikalangan penduduk kota juga mengalami peningkatan.

Perkembangan sebagaimana digambarkan di atas juga dialami oleh daerah Way Seputih. Perebutan tanah dan air antara petani dan berbagai kelompok lain yang berkepentingan di bidang usaha, industri kecil, dan sebagainya tidak dapat dielakkan.

Tidaklah mengherankan mengapa setelah era Reformasi 1998 dan derasnya arus demokratisasi, lembaga swadaya masyarakat JWJL yang memperhatikan nasib petani turut aktif mencari pemecahan atas ketimpangan-ketimpangan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi petani hampir selalu terdesak atau bahkan terpinggirkan.

Pembangunan pertanian bukan lagi semata-mata masalah pemanfaatan teknologi, tetapi juga tuntutan pembagian air yang lebih adil dan merata sesuai kebutuhan, baik di daerah pertanian maupun perkotaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, tawaran World Education Indonesia dan Jaringan Wakak Jukuk Lampung untuk melakukan analisis sosial tentang bagaimana advokasi sebaiknya dilakukan dalam kondisi dewasa ini, disambut baik oleh peneliti Yayasan AKATIGA, bukan saja karena banyak pelajaran yang dapat diperoleh, tetapi juga karena terbukanya peluang untuk memberi masukan kepada penyusunan suatu buku Panduan Latihan untuk Advokasi kepada petani di daerah Way Seputih. Mudah-mudahan bahkan berguna untuk daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

Advokasi irigasi, berbeda dari penyuluhan pertanian dahulu, bukan lagi menggurui satu arah, tetapi langsung melibatkan kelompok sasaran, sehingga secara bersama-sama mengusahakan perubahan pengelolaan air irigasi dari pola yang sentralistik oleh departemen bersangkutan (KIMPRASWIL) ke pengelolaan yang komunal atau kolektif.

Perubahan pola seperti ini mau tidak mau memerlukan pembentukan dan pemberdayaan organisasi tani serta perubahan sikap pengelola KIMPRASWIL. Sikap warga lain diluar masyarakat petanipun perlu berubah karena penggunaan air dan pembagiannya dewasa ini sudah melibatkan segenap masyarakat. Tanpa itu kecil peluang pemanfaatan tanah pertanian beserta pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Tidak salah rasanya untuk menyatakan bahwa dalam proses yang digambarkan diatas tercakup pula usaha perubahan sosial (*social transformation*). Yang tidak kurang pentingnya adalah usaha menggugah kesadaran dan kearifan untuk melestarikan lingkungan, karena lingkungan alam turut mempengaruhi debit air di sungai Way Seputih.

Memecahkan konflik antar desa, baik sengketa tentang penguasaan tanah maupun perebutan mengenai pembagian air, jelas membutuhkan pola pengelolaan yang komprehensif dan dapat diterima oleh semua pihak.

Sumbangan peneliti Yayasan AKATIGA melalui hasil kajian dan tulisan ini memang belum bisa dikatakan sebagai buku panduan, namun hasilnya paling tidak dapat merupakan acuan untuk menyelenggarakan

latihan advokasi irigasi, dan yang diharapkan dapat digunakan sebagai *BUKU Refleksi Pengalaman Advokasi* di daerah Way Seputih.

Semoga bersama WEI dan JWJL kita dapat menyusun Pedoman Training Advokasi Irigasi berdasarkan Refleksi kami ini.

Terimakasih disampaikan atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerjasama yang lancar di lapangan.

Bandung, April 2004

Sediono M.P. Tjondronegoro
Ketua Badan Pengurus Yayasan AKATIGA

Menerobos Kebekuan

Menerobos kebekuan komunitas perdesaan membutuhkan alat yang tajam dan kuat serta kesabaran, karena hal ini berarti harus membongkar budaya dan mentalitas masyarakat yang sudah mengakar sampai ke tulang sumsum. Mentalitas yang dimaksud di sini adalah mentalitas yang mendorong orang untuk berpikir pasif, bahkan mungkin takut berpikir, yang menjadikan mereka pasrah atau mudah menyerah kepada nasib yang merundungnya. Menurut Tan Malaka (Harry A. Poeze: 1999) mentalitas bangsa yang hampir bersemayam dalam mayoritas jiwa masyarakat perdesaan itu disebut mentalitas budak. Mentalitas ini dilahirkan dan disuburkan oleh biang keladinya yakni feodalisme.

Menurut Paulo Freire, komunitas pedesaan seperti di atas disebut juga sebagai mayoritas masyarakat bisu, yang berarti masyarakat tertutup yang kesadaran sosialnya tenggelam dan bersifat magis (semi intransitif). Hal ini terjadi karena adanya proses sosial yang terdominasi oleh kekuasan sentral (elit) dan menjadikan rakyat sangat tergantung kepada kekuasaan, yang selanjutnya berdampak kepada tidak adanya partisipasi dalam kehidupan sosial politik. Tidak adanya partisipasi inilah yang menyebabkan masyarakat terjerumus kedalam kebudayaan bisu (*silent culture*).

Situasi yang demikian dapat terjadi karena kekuatan dominan memandang bahwa masyarakat dianggap tidak memiliki hak bicara dan aktif dalam membahas masalah-masalah penting untuk memilih dan mengambil keputusan. Sebaliknya, masyarakat sendiri memandang bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk berpatisipasi dan oleh karenanya takut untuk bicara. Ini berarti bahwa kebudayaan bisu (*silent culture*) adalah substruktur dari kebudayaan dominatif.

Dalam situasi kebudayaan bisu, hampir tidak ada jarak antara kesadaran masyarakat dengan realitas obyektif (realitas sosial). Hal ini menjadikan masyarakat tenggelam ke dalam realitas tersebut tanpa adanya proses pencerapan (*refleksi*), sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menilai realitas secara obyektif dan memahaminya secara kritis. Lingkup kehidupan masyarakat menjadi terbatasi secara sempit pada lingkup kehidupan biologis dan tercekam oleh suatu keharusan, sehingga masyarakat tidak memiliki kesadaran sejarah. Berbagai persoalan sosial tidak dicari penjelasannya dalam relasi sosial, melainkan sebagai bagian keharusan yang harus dialami. Masalah sosial dipandang sebagai kesalahan luar (kehendak Tuhan) atau kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri. Masyarakat dicekam situasi yang fatalis dalam memandang "bagaimana masalah sosial itu dipecahkan". Bahkan dalam pandangan yang lebih radikal, mengubah realitas dianggap bertentangan dengan keharusan kodrati atau melanggar kehendak alam (hukum Tuhan).

Dalam situasi demikian, apakah masyarakat perdesaan atau petani tidak pernah bergerak untuk melakukan perubahan? Tentu saja tidak. Masyarakat perdesaan atau kaum petani tetap bergerak. Sejarah mencatat telah banyak terjadi pemberontakan (gerakan sosial) yang dilakukan oleh kaum tani. Masalahnya, dalam setiap gerakan, kekalahan hampir selalu terjadi di pihak petani. Kekalahan itu tidak dapat dilepaskan dari ciri-ciri yang menonjol dari setiap gerakan petani, yaitu *pertama*, bersifat lokal atau komunitas; *kedua*, kurang terorganisir; *ketiga*, berjangka pendek serta reaksioner dan bukannya visioner; dan *keempat*, tergantung kepada seorang pemimpin (biasanya seorang pemimpin yang karismatik). Ketegantungan kepada karisma pemimpin telah mengakibatkan gerakan petani itu cenderung sporadik, tidak mengakar, dan mudah dipatahkan.

Munculnya ciri-ciri tersebut dalam setiap gerakan petani tidak terlepas dari pola kehidupan masyarakat desa itu sendiri. James C. Scott memberikan model normatif dengan menggambarkan kehidupan ekonomi petani yang dekat dengan pola hubungan sosial yang pantas, wajar, dan adil. Redfield menggambarkan pola hubungan itu sebagai suatu kehidupan yang baik berdasarkan nilai-nilai petani yang berlaku. Salah satu pola hubungan itu adalah sikap akrab dan hormat terhadap tanah dan sumber daya alam yang melingkupinya. Penghormatan tersebut ditunjukkan dengan menganggap pekerjaan (budaya) pertanian sebagai pekerjaan yang baik dan kegiatan komersial sebagai pekerjaan yang kurang baik. Dalam dualisme ekonomi, Boeke menulis bahwa petani di Jawa memiliki nilai dan sikap *limited needs* yang merupakan prinsip moral dan berlaku di kalangan petani. Dalam prinsip ini, menggarap sawah tidak dianggap sebagai kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan melainkan sekedar untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Prinsip mendahulukan keselamatan (*safety first*) merupakan indikator bahwa orientasi subsisten sangat mendasari pola hidup petani.

Dari hal diatas dapat dimengerti bahwa terjadinya gerakan petani lama (sebelum kemerdekaan) umumnya terjadi karena batas-batas subsistensi (*safety fist*) yang ada mulai terganggu. Gerakan petani tersebut terjadi karena tanah dan air sebagai jiwa dan spiritual masyarakat mulai terdesak. Disamping hal tersebut, umumnya gerakan petani didasari adanya gesekan kebudayaan dalam kehidupan pertanian. Ketika budaya bertani sebagai bagian dari religiusitas masyarakat dalam *memayu hayuning bawono* (memelihara harmoni alam semesta, *red*) digeser kedalam pola bertani komersial (kasus tanam tebu-*culture stelsel*), disitulah muncul gesekan budaya dan melahirkan resistensi. Resistensi petani yang mengalami intensitas tertentu tersebut kemudian meledak melahirkan gerakan kaum tani. Dari hal tersebut jelas mengapa gerakan petani kurang sistematis dan lebih bersifat reaksioner.

Lalu, bagaimana dengan kehidupan petani sekarang? Dalam hal pola kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, situasi petani sekarang sudah mengalami banyak pergeseran (baca=pemberatan). Pola bertani sebagai bagian religiusitas dan penghormatan pada alam telah mengalami pergeseran (meskipun tidak 100% berubah) menjadi bertani sebagai bagian kegiatan komersial. Semangat resiprositas dan ciri khas masyarakat patembayan mulai tergeser menuju masyarakat individual yang semuanya diperhitungkan dengan uang. Hal ini terjadi karena adanya tekanan-tekanan yang

menjadikan situasi petani masuk ke dalam situasi buruk. Tekanan-tekanan tersebut berupa tekanan ekonomi, ini menjadi faktor utama yang menjadikan kehidupan petani mengalami perubahan. Tekanan ekonomi yang paling nyata dirasakan petani adalah tekanan pasar, tekanan pola kerja, dan tekanan perubahan nilai tukar. Tekanan ekonomi ini mememberikan kontribusi kepada munculnya tekanan-tekanan lain, seperti, *pertama*, tekanan ekologi. Tekanan ekonomi telah mendorong terjadinya perubahan ekologi pertanian. Komersialisasi dunia pertanian yang dikenalkan dalam *green revolution* memberikan pemberatan-pemberatan pada lingkungan pertanian berupa rusaknya tanah-tanah pertanian, berkembangnya hama-hama pertanian, dan polusi tanah air. *Kedua*, tekanan demografi - berupa tingginya tingkat pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan lahan pertanian menjadi semakin sempit. Sempitnya lahan-lahan tersebut juga diperparah dengan kebijakan negara yang lebih berpihak kepada industri, sehingga berakibat pada alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi pabrik dan perumahan. *Ketiga*, tekanan budaya - atmosfer ekonomisme yang ditandai dengan komersialisasi di segala bidang telah menggeser budaya petani. Nilai-nilai kehidupan perdesaan yang harmoni dan selaras alam serta strategi bertahan hidup yang dulu dimiliki oleh petani-petani tua tidak dapat lagi tersosialisasikan dengan baik pada generasi penerus. Hal ini berakibat pada budaya petani sebagai kekuatan masyarakat perdesaan telah runtuh dan tinggal puing-puing. Keempat, *tekanan politik*. Atmosfer ekonomisme *mainstream* yang kemudian dikenal dengan neo liberalisme mampu memaksa pemerintah untuk tidak berpihak kepada masyarakat tradisional (baca=petani). Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak ada yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat petani, melainkan lebih condong kepada pemberian hak-hak khusus kepada kaum privat (yang kaya).

Tekanan-tekanan tersebut terjadi dalam pola hubungan sosial yang dominatif dan halus secara perlahan-lahan. Arturo Escobar, profesor Antropologi Pembangunan di Smith College Northampton, USA, merumuskan bahwa penciptaan diskursus dominan untuk mendominasi negara-negara ketiga dilakukan melalui apa yang disebut "*deployment of development*". *Deployment of development* itu dilakukan melalui tiga tahap penting yaitu: *abnormalities*, *professionalization of development* atau *technification of development,* dan *Institutionalization of development*". Proses dominasi ini melahirkan kesadaran semu pada masyarakat petani yang kemudian memaksa memaksa petani masuk ke dalam situasi *kuldesak* (jalan buntu).

Buku yang ditulis oleh Makinuddin ini mencoba menawarkan suatu alternatif untuk menerobos jalan buntu yang dihadapi petani. Buku yang ditulis berdasarkan hasil refleksi kritis proses perjalanan advokasi yang dilakukan oleh Jaringan Wakak Jukuk Lampung (JWJL), AKATIGA, dan World Education (WE) di Lampung Tengah ini mencoba memberikan gambaran bahwa membangunkan kembali kesadaran kritis petani bukan persoalan yang mudah, karena didalamnya ada persoalan politik, ekonomi, budaya, dan kepentingan yang bercampur aduk dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Belum lagi kalau kita perhatikan berbagai kelompok kepentingan yang terlibat di dalamnya seperti elit politik, elit masyarakat, preman, dan petani sendiri yang telah memberi andil dalam terjadinya konflik laten maupun manifes.

Buku ini menawarkan ide bahwa membongkar kembali akar kesadaran dan kohesifitas petani adalah kunci utama dalam membangun gerakan advokasi bersama petani. Selain itu sangat penting untuk mewaspadai titik-titik kritis dalam isu yang ditangani, karena titik-titik kritis tersebut memiliki potensi pendorong sekaligus pemberat dalam advokasi bersama petani. Kemampuan dalam dua hal tersebut dapat menjadi modal penting dalam menyusun sebuah strategi advokasi. Yang perlu diperhatikan adalah, advokasi merupakan sebuah pilihan yang didalamnya tidak memandang persoalan sebagai 'benar atau salah', melainkan 'menang atau kalah'. Dengan demikian, pilihan terhadap strategi menjadi sangat penting.

Buku ini memang tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang cara-cara penyelesaian semua persoalan petani. Buku ini hanyalah cerita tentang perjalanan advokasi irigasi seperti disebutkan oleh penulis sendiri, “tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan irigasi yang (mungkin) mempunyai tingkat konflik dan intensitas persoalan berbeda-beda, karena advokasi selalu mempunyai kekhususan dan keunikan sendiri”. Meskipun begitu, buku ini dapat memberikan manfaat, tentu saja bagi mereka yang bersiap mengabdikan diri dan kehidupannya sebagai kawan (pendamping) petani. Paling tidak, pengenalan persoalan yang mendalam secara bersama-sama, analisis bersama komunitas, membangun kesadaran bersama, dan menentukan arah gerakan secara bersama menjadi prasyarat penting dalam membuka gerakan advokasi bersama petani.

Akhir kata sebagai sebuah refleksi, tidak jarang kita (sebagai aktifis NGO) dalam melakukan setiap kegiatan seolah sudah mampu membuka tempurung kesadaran yang mendominasi petani, padahal dalam kenyataannya, setelah terlepas dari tempurung dominasi (elit), ternyata petani masih berada dalam tempurung besar atau keranjang besar dominasi aktifis NGO.

Rahadi, Spd

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh petani Way Seputih Lampung Tengah, AKATIGA, World Education Indonesia, dan Jaringan Wakak Jukuk Lampung kepada saya untuk melihat dan "terlibat" dalam proses kerja advokasi irigasi di Way Seputih Lampung Tengah.

Terima kasih juga kepada juga kepada Haswinar Arifin, Selly Riawanti, Rahadi, Dadang Djuliantara, dan kawan-kawan peneliti AKATIGA yang telah menjadi "polisi" dan lawan diskusi produktif dalam meyelesaikan buku ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan mitra dan jaringan World Education Indonesia: PAN Sumatera Utara, Lembaga Desa Mandiri Simalungun (LDM), Yayasan Tani Tanah Karo (YTTK), LPTP Solo, Algeins Ponorogo, dan Sanggar Kegiatan Belajar Lampung yang telah menjadi "penagih hutang" untuk pekerjaan yang terlambat terbit ini.

Makinuddin

Daftar Nama, Istilah, dan Singkatan

Advokasi

Upaya sistematis dan terencana yang berbasis pada pengalaman dan pengetahuan korban untuk melakukan perubahan dalam rangka mengurangi beban mereka akibat salah urus negara.

Advokasi Irigasi

Usaha bersama petani untuk menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan, pengeloaan air yang adil, dan keterlibatan petani secara memadahi dalam setiap pengambilan keputusan tentang penyediaan dan pengelolaan air dalam sistem irigasi.

Aksi massa

Tindakan yang melibatkan banyak orang untuk menyampaikan pesan perubahan kepada simbol-simbol kekuasaan.

Alih komoditas pertanian

Upaya mengganti jenis tananam pertanian sesuai dengan kondisi alam atau situasi pasar.

Analisis kebijakan

Disiplin terapan yang menggunakan berbagai metode dan argumen untuk mengetahui isi

hukum, tata laksana hukum, dan budaya hukum untuk melakukan perubahan di masyarakat.

Analisis sosial

Seperangkat cara untuk membaca, mengetahui, mengidentifikasi, dan menafsirkan hubungan dan situasi sosial dalam rangka menghayati gejala alam dan masyarakat untuk melakukan perubahan.

Analisis sosial irigasi

Usaha untuk mendapat gambaran lebih lengkap tentang situasi sosial-politik-ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dengan segala akibatnya dan mengenali pihak-pihak yang berkomitmen melakukan perubahan.

Bendung Wilayah Sungai (BWS)

Pintu kontrol air di jaringan irigasi primer

Capacity assessment

Kajian yang bertujuan memetakan dan menilai kemampuan kelompok atau organisasi.

***Community Based Sustainable Agriculture* (CBSA)**

Salah satu program pemberdayaan petani World Education Indonesia yang berbasis pada pendidikan rakyat untuk menciptakan kemandirian dan keberlanjutan pertanian di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga negara yang bertugas mengartikulasi, mengakomodasi dan menerjemahkan aspirasi rakyat dalam bentuk produk hukum di tingkat propinsi, kabupaten, atau kota.

Dishutbun

Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Diversifikasi

Keanekaragaman untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan.

Doktrin

Suatu ajaran berkaitan dengan aliran politik, agama, dan ilmu pengetahuan yang bekerja secara sistematis dan mengikat.

Ekosistem

Keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungan yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi alam.

Empowerment

Upaya sistematis untuk mempengaruhi dan mengubah pola hubungan dalam masyarakat.

Focus Group Discussion (FGD)

Proses pengumpulan informasi mangenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok

Frontline

Istilah yang dipakai untuk kelompok yang berada di garis depan perjuangan.

Gadu

Putaran jadwal pembagian air irigasi lima tahun sekali dalam wilayah kerja irigasi yang bersangkutan.

Gerakan/pergerakan

Upaya menyusun kekuatan dari pihak-pihak yang menghendaki perubahan dan secara bertahap melakukan aksi untuk mencapai perubahan yang dicita-citakan.

Hak Penguasaan Hutan (HPH)

Hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta untuk mengusai hutan di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian hak penguasaan terhadap pihak swasta ini yang menjadi salah satu faktor rusaknya sebagian besar hutan di Indonesia.

Ideologi

Sistem berfikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu pergerakan, kelompok sosial, atau negara. Secara umum kata ideologi banyak diartikan sebagai suatu kesadaran palsu yang digunakan oleh kelas penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya

Ili-ili

Petugas irigasi di tingkat hamparan.

Irigasi

Pengaturan, pembagian, atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan

keperluan hidup manusia lain.

Iuran Petani Pemakai Air (Ipair)

Konon praktik pungutan ini dimaksudkan untuk menarik partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi.

Jaringan irigasi

Keterkaitan saluran dan bangunan sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pembagian, sampai pembuangan.

Jaringan irigasi kuarter

Keterkaitan saluran pembagi, pembuang, dan seluruh pelengkap bangunan termasuk irigasi pompa.

Jaringan irigasi primer

Keterkaitan jaringan utama dalam satu sistem irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk, saluran sekunder, dan bangunan pelengkapnya.

Jaringan irigasi tersier

Keterkaitan jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air dalam petak tersier.

Jaringan Wakak Jukuk Lampung (JWJL)

Lembaga nirlaba yang melakukan kerja pendampingan petani di Kabupaten Lampung Tengah.

Jasa politik

Tindakan atau perbuatan aktor politik yang dianggap bermanfaat dan dapat memudahkan pekerjaan orang lain. Jasa politik biasannya menjadi alat tawar-menawar untuk menarik dukungan politis.

Kebijakan negara

Suatu keputusan atau tindakan bersanksi aktor politik yang diarahkan pada suatu masalah dan mempengaruhi sebagaian besar masyarakat.

Kepala Cabang Dinas (KCD)

Wakil dinas yang ada di tingkat kecamatan

Kimpraswil

(Dinas/ Departemen) Permukiman dan Prasarana Wilayah

Koalisi strategis

Kerja sama berkelanjutan antara kekuatan perubahan (orang atau organisasi) untuk mewujudkan perbaikan dalam masyarakat.

Kohesi petani

Keadaan saling terikat dalam masyarakat petani.

Komoditas pasar

Barang yang menjadi obyek pertukaran antara kekuatan penawaran dan permintaan di pasar yang tidak dapat dikontrol oleh petani.

Konflik irigasi

Keadaan pertentangan atau sengketa di masyarakat (petani) yang bersifat meyeluruh akibat salah urus pemerintah terhadap irigasi.

Konsolidasi petani

Upaya untuk memperkuat hubungan dan persatuan dalam masyarakat petani untuk melakukan perubahan.

Krisis irigasi

Keadaan berbahaya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.

Large manufacturing

Pabrik yang mempunyai skala produksi besar. Sektor ini pernah menjadi tumpuan pembangunan ekonomi di Indonesia, akibatnya sektor usaha kecil menjadi terabaikan.

Legal draft

Rancangan peraturan yang akan diusulkan pada lembaga legislatif

Lembaga donor

Lembaga asing atau dalam negeri yang memberi donasi pada lembaga sosial atau negara untuk penyelenggaraan program lembaga tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga yang punya klaim nir-laba dan berpihak kepada perubahan di masyarakat.

Lobby

Proses memberikan informasi untuk mempengaruhi pembuat keputusan agar mengakomodasi kepentingan yang diperjuangkan. Dalam praktiknya *lobby* sering digunakan untuk menyuap pejabat.

Mainstream

Istilah yang dipakai untuk menunjuk aliran pemikiran, ideologi, ajaran, dan lain-lain yang secara mayoritas dipakai oleh khalayak.

Mapak banyu

Ritual petani yang ditujukan untuk menjemput datangnya air irigasi atau air hujan.

Metode

Seperangkat cara dan pendekatan yang bekerja secara sistematis meliputi teknik dan cara untuk mencapai tujuan.

Metode Penelitian

Seperangkat cara dan pendekatan untuk mengumpulkan data dan menganalisis masalah yang meliputi teknik dan alat untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Mutilasi

Pembunuhan yang dilakukan dengan cara memotong-motong tubuh korban menjadi bagian-bagian kecil.

Need assessment

Kajian yang bertujuan memetakan dan menilai kebutuhan kelompok atau organisasi.

Negosiasi

Proses tawar menawar antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mencapai suatu kesepakatan.

Ngguyang

Cara petani membersikan hewan ternak di genangan air, sungai, jaringan irigasi, dan lain-lain

Nglurug

Tindakan kolektif petani untuk menyampaikan protes kepada pihak lain.

Nilai komersial

Barang atau jasa yang dapat dihargai dan diukur secara ekonomi.

Non-government Organitation (NGO)

Organisasi masyarakat yang punya klaim berposisi secara asimetris terhadap negara atau pemerintahan, sering juga diplesetkan menjadi *New Government Organisation*.

Organisasi petani

Alat perjuangan petani untuk mewujudkan kemakmuran dan kemandirian masyarakat petani.

Otokritik

Mekanisme koreksi yang bekerja di lingkungan internal.

Paradigma ilmu

Pandangan dasar ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan untuk dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (*discipline*) tertentu.

Parlemen

Salah satu lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi (membuat produk hukum).

Partisipasi

Keterlibatan warga negara untuk melakukan kontrol dalam pembuatan dan implementasi kebijakan negara.

Patologi sosial

Gejala-gejala sosial yang dianggap sakit akibat faktor-faktor sosial lain.

Pembelaan prodeo

Pembelaan kepada orang atau kelompok yang dilakukan oleh pengacara atau advokat secara cuma-cuma.

Pendamping petani

Orang atau organisasi yang melakukan kerja bersama petani untuk perubahan nasib petani.

Penelitian

Upaya sistematis dengan metodologi tertentu untuk mengetahui sejumlah masalah yang

sedang dihadapi masyarakat baik secara laten maupun manifes dalam rangka melakukan perubahan.

Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI)

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan irigasi di Indonesia yang menempatkan petani sebagai pengelolanya. Kebijakan ini sering diartikan sebagai penyerahan pengelolaan irigasi kepada pihak pemodal swasta, jika hal itu terjadi maka ancaman baru bagi petani untuk dapat mengakses air.

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Organisasi petani untuk pengelolaan air irigasi.

Powerlessness

Kondisi masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mempengaruhi pola hubungan sosial secara seimbang.

Press conference

Suatu pertemuan untuk memberikan penjelasan dihadapan para wartawan (media massa) oleh seorang narasumber atau lebih.

Press release

Pengumuman suatu berita atau peristiwa agar dimuat dan disiarkan oleh media massa. Upaya ini biasanya dilakukan untuk mencitrakan, mempengaruhi, dan mengarahkan publik sesuai dengan kepentingan pihak yang bersangkutan.

Prinsip advokasi

Acuan dasar yang menjadi pedoman bagi kegiatan advokasi.

Prinsip segara gunung

Nilai-nilai pengelolaan irigasi yang didasarkan pada keseimbngan alam.

Progresif

Sifat orang atau kelompok yang besikap dan bertindak untuk perubahan ke arah perbaikan

Public hearing

Forum pertemuan antara dua pihak untuk saling mendengarkan dan memahami dalam rangka mencari jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Forum ini

biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mendesakkan aspirasi dan kepentingan publik kepada pihak pembuat kebijakan.

Puso

Kondisi tanaman yang tidak mengeluarkan hasil akibat kandisi alam dan salah urus manusia terhadap lingkungan alamnya.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Usulan dari pemerintah, warga atau inisiatif lembaga perwakilan daerah. Dalam praktiknya Raperda lebih banyak diusulkan oleh pihak pemerintah daerah dibanding dari warga atau inisiatif lembaga perwakilan.

Rancangan Undang-undang (RUU):

Usulan undang-undang yang berasal dari rakyat, pemerintah atau inisiatif dewan perwakilan.

Reboisasi

Upaya penghijauan kembali lahan hutan. Upaya ini sering diabaikan oleh banyak pihak baik pemegang HPH, pemerintah, maupun masyarakat.

Rembug tani

Forum pertemuan petani untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Reorganisasi petani

Upaya untuk memperbaharui organisasi petani yang telah mengalami disorientasi perjuangan karena kepentingan negara maupun sejumlah elit politik.

Saprotan

Sarana Produksi Pertanian.

Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

Sistem pendidikan orang dewasa yang berbasis pada pengetahuan dan pengalaman petani untuk pengendalian hama.

Simbol kekuasaan

Semua tanda yang mempunyai makna dan berkonotasi pada penguasaan sekelompok kecil orang terhadap mayoritas orang lain.

Sinkronisasi yuridis

Metode penafsiran hukum untuk menyelaraskan asas, norma, dan kaidah hukum secara vertikal maupun horisontal antara satu produk hukum dengan produk hukum yang lain.

Sistem pasar

Mekanisme pertukaran antara kekuatan penawaran dan permintaan yang didasarkan pada kompetisi bebas pelaku pasar.

Social transformation

Perubahan penting pola hubungan dan budaya dalam masyarakat akibat desakan dan upaya sistematis dari sebagian atau semua warga masyarakat yang bersangkutan.

Solidaritas petani

Suatu ikatan nasib dan persaudaraan dalam masyarakat petani yang didasarkan pada kesamaan kelas sosial, politik, dan ekonomi. Solidaritas petani merupakan modal sosial bagi perubahan nasib mereka.

State-based irrigation management

Pengelolaan irigasi secara terpusat dan dalam kontrol negara.

Strategi advokasi

Kemampuan memaksimalkan sumberdaya dalam menentukan cara untuk mencapai tujuan perubahan yang dicita-citakan masyarakat.

Sumber daya agraria

Tanah, air, udara beserta kekayaan alami yang melekat padanya yang dikelola orang melalui kegitan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perhutanan, pertambangan, dan kedirgantaraan.

Teori Marxis

Semua pendapat dan ajaran yang merujuk pada tulisan-tulisan Marx dan para penafsirnya.

Training of Trainer (TOT)

Pelatihan untuk pelatih dalam suatu program pendampingan atau pemberdayaan yang diinisiasi pemerintah maupun LSM.

Ulu-ulu :

Petugas irigasi di tingkat desa.

Victim-based advocacy :

Advokasi yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman korban untuk menghindari bias kepentingan proyek, penyedia jasa, dan program advokasi yang datang dari pihak luar.

Working Paper

Kertas kerja yang berisi kesimpulan-kesimpulan sementara hasil kajian.

Workshop

Forum pertemuan untuk membahas kertas kerja hasil kajian.

World Education Indonesia

NGO internasional berpusat di Amerika yang bekerja untuk pemberdayaan petani berbasis pendidikan rakyat di Indonesia.

World Trade Organitation (WTO)

Rezim perdagangan bebas ini adalah bentuk lain dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang menjadi alat bagi pemerintah Amerika untuk mengontrol perdagangan dunia. Organisasi ini didirikan untuk melengkapi dua institusi internasional yang telah ada lebih dulu yaitu Bank Dunia dan *International Monetery Fund* (IMF). Banyak pihak sepakat bahwa WTO adalah ancaman baru bagi produk pertanian negara berkembang, perlindungan kerja, konsumen, dan lain-lain.

Daftar Isi

Ringkasan iii
Kata Pengantar v
Kata Pengantar WE: Menerobos Kebekuan ix
Ucapan Terima Kasih xv
Daftar Nama, Istilah, dan Singkatan xvii
Daftar Isi xxix
Daftar Contoh Matrix xxxiii
Peta Lokasi xxxv

Kopi Ke-1: Kopi Pembuka 1
A. Secangkir Kopi untuk Petani 1
B. Menyajikan Secangkir Kopi 6

Kopi Ke-2: Peranan Analisis Sosial 15
A. Analisis Sosial Irigasi (Anasir) 15

B. Beberapa Cara Pandang Tentang Krisis Air Irigasi 21
C. Menandai Dua Titik Rawan Advokasi Irigasi 26
1. Konflik Sosial Irigasi 26
2. Arah Kebijakan Negara 30

Kopi Ke-3: Strategi Advokasi 35
A. Menentukan Strategi Advokasi 35
B. Membangun Prinsip Advokasi 36
C. Menganyam Kekuatan Advokasi 38
D. Menguji (nalar) Strategi Advokasi 41

Kopi Ke-4: Putaran Diskusi 49
1. Nalar 49
2. Tahapan 50
3. Metode 52
4. Evaluasi 54

Kopi Ke-5: Analisis Pascadiskusi 57
1. Nalar 57
2. Tahapan 57
3. Metode 59
4. Rekomendasi 60

Kopi Ke-6: Workshop Irigasi 63
1. Nalar 63
2. Tahapan 65
3. Metode 66
4. Rekomendasi 69

Kopi Ke-7: Pemberdayaan Petani 75
1. Nalar 75
2. Tahapan 76
3. Metode 79
4. Evaluasi 82

Kopi Ke-8: (Re)organisasi Petani Sebagai Alat 85
1. Nalar 85
2. Tahapan 89
3. Metode 91

Kopi Ke-9: Advokasi: Proses Publik 93
1. Nalar 93
2. Tahapan 95
3. Metode 97
4. Evaluasi 98

Kopi Ke-10: Kopi Penutup 99

Daftar Bacaan 101
Profil Penulis 105

Daftar Contoh Matrix

Contoh 1. Matriks Masalah ____ 53
Contoh 2. Matriks Capaian ____ 54
Contoh 3. Matriks Pelaku ____ 60
Contoh 4. Matriks Silabus Pemberdayaan Kelompok Tani ____ 79
Contoh 5. Matriks Evaluasi Pemberdayaan Petani ____ 83
Contoh 6. Matriks Silabus Pendidikan Organisasi Untuk Petani ____ 91

Peta Lokasi

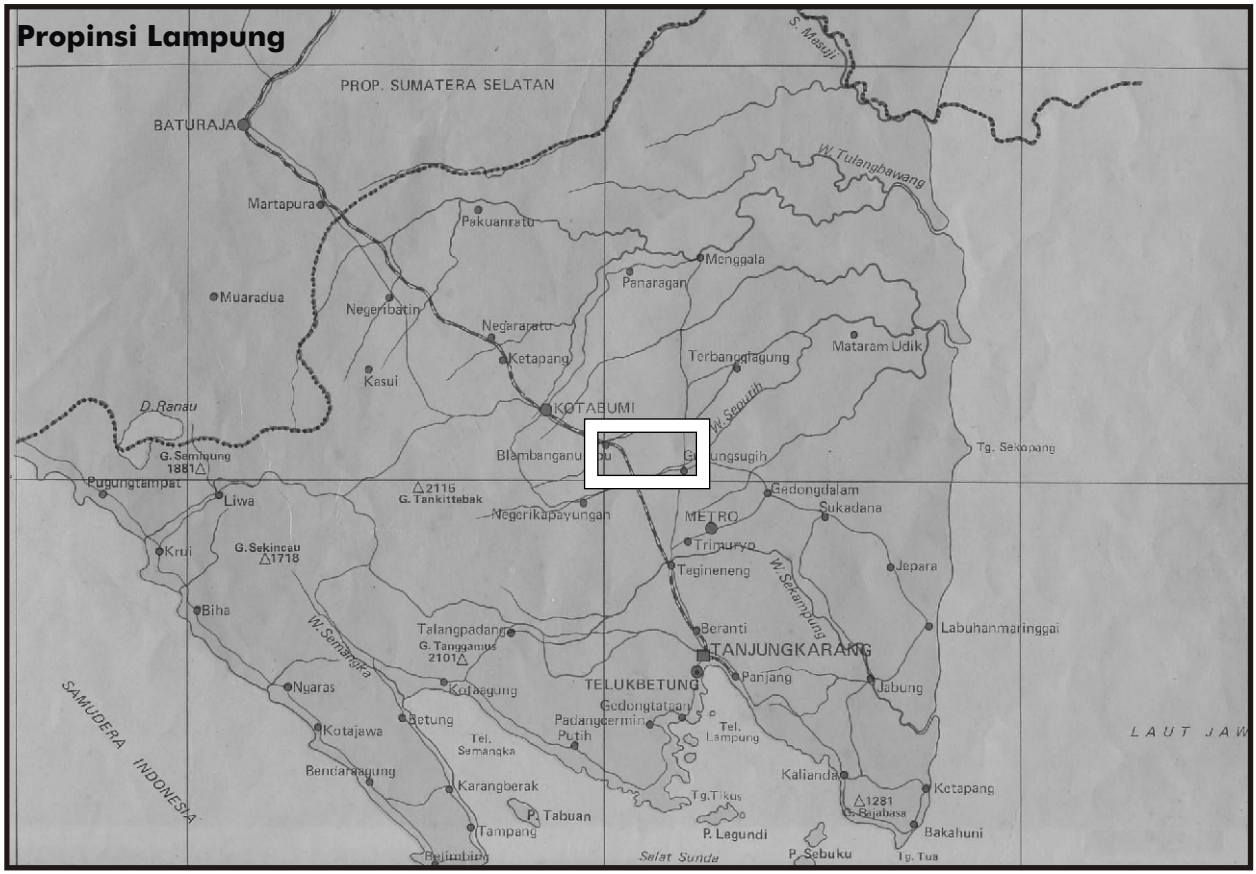
Propinsi Lampung
PROP. SUMATERA SELATAN
S. Musi
BATURAJA
W. Tulangbawang
Martapura
Pakuanratu
Menggala
Panaragan
Muaradua
Negeribatin
Negeraratu
Ketapang
Terbanggilagung
Mataram Udik
Kasui
D. Ranau
KOTABUMI
W. Seputih
Tg. Sekampung
G. Sembung
1881
Pugungtampat
Liwa
△2115
G. Tankittebak
Blambangan
Gedongsugih
Gedongdalam
Sukadana
Negerikapayungan
METRO
Trimurjo
Krui
G. Sekincau
△1718
Tegineneng
W. Sekampung
Jepara
Biha
W. Semangka
Talangpadang
G. Tanggamus
2101△
Beranti
TANJUNGKARANG
Labuhanmaringgai
Panjang
Jabung
Ngaras
Kotaagung
TELUKBETUNG
Gedongtataan
Kotajawa
Betung
Padangcermin
Putih
Tel. Lampung
Tel. Semangka
LAUT JAWA
SAMUDERA INDONESIA
Bandaragung
Karangberak
Kalianda
Ketapang
Tg. Tikus
△1281
G. Rajabasa
P. Tabuan
Tampang
P. Legundi
Bakahuni
Selat Sunda
P. Sebuku
Tg. Tua

Kopi Ke-1

Kopi Pembuka

A. Secangkir Kopi untuk Petani

Sebelum manusia dan kerakusan sistem pasar menyadari bahwa air mempunyai nilai komersial yang tinggi, air sebagai sumber kehidupan telah menempati posisi mistis dalam sejarah kesadaran manusia. Air adalah bentuk sakral dari alam, bukan semata-mata merupakan inspirasi spiritual atas kepercayaan manusia yang pernah ada di muka bumi, tapi air dalam dirinya sendiri merupakan jaminan kehidupan di atas alam semesta. Berkaitan dengan keyakinan tersebut, maka memelihara air sebagai warisan sakral alam semesta sama dengan melestarikannya untuk bertahan lebih lama.

Sebelum kerakusan sistem pasar menyadari bahwa air mempunyai nilai komersial , air sebagai sumber kehidupan telah menempati posisi mistis dalam sejarah kesadaran manusia

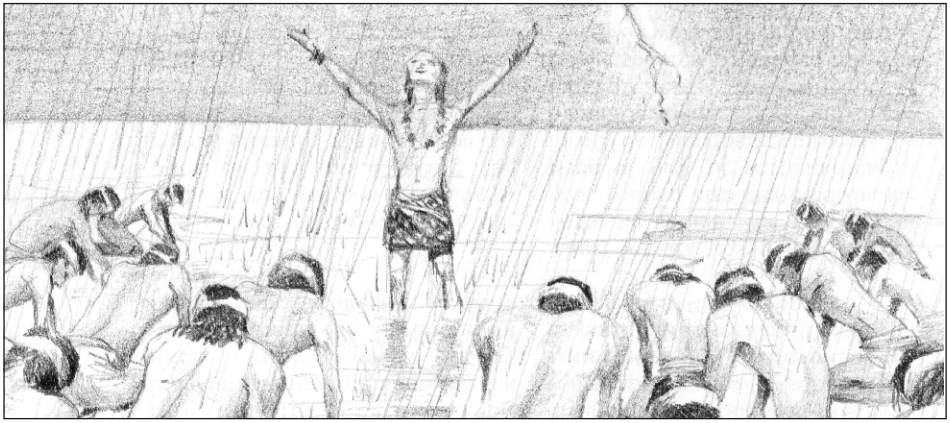

Gambar 1.
Sebelum manusia dan kerakusan sistem pasar menyadari bahwa air mempunyai nilai komersial yang tinggi, air adalah bentuk sakral dari alam.

Dalam perkembangan dunia baru (ekonomi, sosial, dan politik), air sebagai sumber daya alam berubah fungsi menjadi sekadar barang yang dapat diperjualbelikan (komoditas pasar). Situasi terakhir ini secara sistematis mengubah pola hubungan manusia (terutama petani) dengan lingkungan alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan inspirasi sosial-kultural. Sumber daya agraria yang dulu merupakan basis solidaritas petani berubah menjadi sumber konflik vertikal dan horisontal. Persekutuan panjang antara petani dan air yang diturunkan dari generasi ke generasi menjadi sumber retaknya solidaritas dan soliditas di kalangan mereka.

Advokasi menjadi semacam wacana tanding atas* mainstream *teori-teori pertumbuhan kapitalistik.

Gagalnya konsep pertumbuhan yang berorientasi pada industri manufaktur besar (*large manufacturing*) telah memancing banyak pemikir untuk mencari alternatif pembangunan sosial yang tidak berisiko terhadap kelestarian lingkungan alam sekaligus menyembuhkan patologi yang diderita masyarakat akibat residu industri yang berwatak kapitalistik. Advokasi menjadi semacam wacana tanding atas *mainstream* teori-teori pertumbuhan yang kapitalistik.

Dalam satu dasawarsa terakhir ini advokasi sebagai konsep pembelaan terhadap kelompok pinggiran telah meramaikan perdebatan seputar wacana perubahan sebagai alternatif dari praktik pembangunan yang dilakukan oleh negara. Sayangnya advokasi sebagai konsep maupun sebagai praktik pembelaan kelompok miskin dan pinggiran juga belum selesai diperdebatkan. Awalnya advokasi adalah praktik litigasi dunia peradilan pada kasus yang dibela secara *prodeo* (gratis) oleh pengacara partikelir. Pengertian ini kemudian ditolak karena dianggap terlalu mengurangi konsep pembelaan terhadap kelompok miskin, sebab di masyarakat ada banyak persoalan sosial dan kasus korban pembangunan yang tidak masuk pengadilan.

Dalam perkembangannya advokasi dikonsepsikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan kebijakan[1]. Konsep advokasi yang menyebutkan bahwa praktik pembelaan ini dilakukan untuk merubah kebijakan telah menjadi panduan bagi banyak kalangan dalam melakukan gerakan advokasi di Indonesia. Kecuali *mainstream* konsep advokasi tersebut terdapat konsep lain yang menyebutkan bahwa advokasi merupakan upaya pembelaan (konsumen) dalam seluruh sistem dan struktur perekonomian[2].

Tanpa bermaksud untuk terlibat dalam tarik-menarik perdebatan tentang konsepsi advokasi di atas, advokasi dalam buku yang sedang disusun ini diberi batasan sebagai upaya sistematis dan terencana yang berbasis pada pengalaman dan pengetahuan korban (*victim-based advocacy*) untuk melakukan perubahan sosial (*social transformation*) dalam rangka mengurangi beban mereka akibat salah urus negara[3]. Upaya tersebut dicapai dengan melakukan perubahan di ranah sistem hukum (isi, struktur, dan budaya hukum), pengembangan potensi korban (boleh dibaca: penguatan dan pengorganisasian kelompok basis) dan membentuk atau mengefektifkan lembaga-lembaga masyarakat korban. Secara lebih teknis advokasi irigasi

Advokasi adalah upaya sistematis dan terencana yang berbasis pada pengalaman dan pengetahuan korban* (victim based advocacy) *untuk melakukan perubahan sosial* (social transformation) *dalam rangka mengurangi beban mereka akibat salah urus negara.

---

1 Dalam buku panduan advokasi yang berjudul *Mengubah Kebijakan Publik* advokasi dikonsepsikan sebagai upaya untuk memperbaiki, mengubah, atau bahkan membela *(confirmation)* suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingannya *(policy reform)*. Konsep advokasi ini dilawankan dengan konsep gerakan revolusi yang menekankan perebutan kekuasaan politik untuk melakukan perubahan sistem dan struktur secara keseluruhan. Karena advokasi dalam pengertian itu diletakkan di atas asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur masyarakat secara luas dan menyeluruh dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan bertahap *(gradual and in-cremental changes)*, konsepsi ini menempatkan kebijakan publik dalam kerangka sistem hukum *(system of law)* yang terdiri atas : isi hukum *(content of law)*, tata laksana hukum *(structure of law)*, dan budaya hukum *(culture of law)*. Pusataka Pelajar, Yogyakarta tahun 2001.

2 Konsep advokasi ini dapat ditemukan di dalam buku Panduan Advokasi Konsumen yang berjudul *Dari Pelayanan Ke Pembelaan.* YLKI tahun 1991 hal 5.

3 Upaya perubahan sosial berbasis korban ini dimaksudkan memotong kecenderungan perubahan di masyarakat yang berbasis pada pemandu, penyedia jasa advokasi, dan proyek LSM. Perubahan sebaiknya menempatkan masyarakat *(people)*, pengetahuan dan pengalaman *(knowledge and experiences)*, maupun modal sosial *(social capital)* korban sebagai pusat kesadaran dan basis gerakan perubahan.

merupakan usaha petani dan sekutunya untuk menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan, pengelolaan air yang adil, dan keterlibatan petani secara memadai dalam setiap tahapan pengambilan keputusan tentang penyediaan dan pengelolaan air dalam sistem irigasi, usaha perubahan ini lebih difokuskan dan diarahkan pada: **1) pengorganisasian Perkumpulan Petani Pemakai Air, 2) penguatan petani, 3) proses publik untuk perubahan sistem pengelolaan.**

Advokasi irigasi bukan saja pilihan untuk melakukan perubahan, sebagai alat petani advokasi irigasi juga harus menjadi media belajar yang efektif bagi mereka

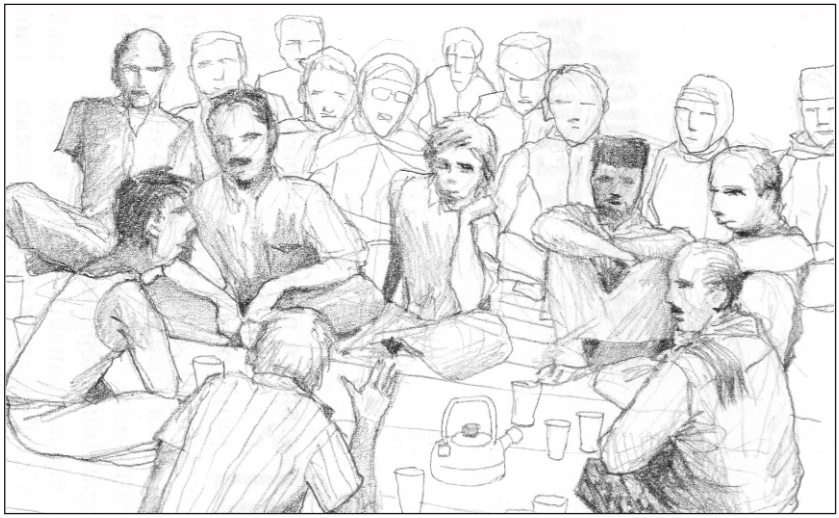

Gambar 2.
Pengorganisasian dan penguatan petani adalah proses publik.

Praktik pengelolaan irigasi yang lebih berorientasi teknis dan melupakan aspek manusiawi telah menempatkan petani pada posisi terpinggirkan, padahal petani seharusnya menempati posisi strategis dalam pengambilan keputusan pengelolaan irigasi maupun operasionalnya. Karena itu advokasi irigasi mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan kembali aspek manusiawi tersebut dalam praktik pengelolaan dan mekanisme pengambilan keputusan maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan sumber daya air.

Kecenderungan untuk meminggirkan petani dalam pengelolaan irigasi terjadi karena irigasi hanya dipahami sebagai bagian dari peningkatan produksi pertanian semata. Akibatnya, pengelolaan irigasi terabaikan setelah pemerintah beranggapan bahwa target peningkatan produksi pertanian telah dicapai. Karena itu, risiko yang harus diderita oleh petani, khususnya, dan kehidupan ekosistem lainya adalah kondisi irigasi teknis Indonesia yang dari tahun ke tahun mengalami kemerosotan kualitas distribusi dan ketersediaan air yang mulai berkurang untuk pertanian sawah dan keperluan petani lainya.

Pemahaman terhadap pengelolaan sumber daya air, khususnya irigasi teknis di Indonesia secara konsep maupun praktik juga berakibat pada kerusakan lingkungan alam yang akut. Aspek manusiawi adalah sejumlah pengertian dan nilai-nilai hidup manusia untuk memenuhi hajat hidup secara berkelanjutan sesuai dengan ekosistem alam yang ditempati. Dalam konteks itu manusia menjadi faktor penting dalam melestarikan ekosistem alam, meminggirkan aspek manusiawi dalam melihara alam sama halnya dengan membiarkan kualitas alam rusak secara sistematis. Padahal dalam konteks pengelolaan irigasi, kelestarian alam (terutama hutan) merupakan jaminan ketersediaan air.

Advokasi irigasi berusaha menghadirkan kembali aspek manusiawi dalam pengelolaan irigasi

Advokasi irigasi berusaha menghadirkan kembali aspek manusiawi dalam pengelolaan irigasi. Seperti disebut di atas, meminggirkan aspek manusiawi dalam pengelolaan irigasi bukan hanya akan berakibat pada merosotnya kualitas distribusi (baca: layanan) air kepada petani dan kerusakan lingkungan, tapi juga mempertaruhkan tatanan masyarakat yang hancur akibat konflik antardesa, jaringan, dan konflik etnis karena berebut sumber daya air. Berkaitan dengan hal itu, pengelolaan irigasi harus dipahami sebagai pengelolaan yang sesuai dengan sistem sosial, sistem budaya, sistem ekonomi, dan ekosistem alam.

Petani adalah pihak yang paling dirugikan jika pengelolaan sumber daya air (irigasi) menggunakan pemahaman yang salah terhadap aspek manusiawi dan

ekosistem alam. Kekeringan dari tahun ke tahun yang diderita petani merupakan potret buram pengelolaan irigasi di Indonesia yang terkesan terlambat disadari. Kekeringan bukan saja berakibat naiknya angka pengangguran dan urbanisasi, tapi juga berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat petani dan terancamnya generasi petani di masa depan.

B. Menyajikan Secangkir Kopi

Advokasi, apa pun bentuknya selalu mempunyai kekhususan dan tingkat keunikan yang berbeda-beda

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman advokasi irigasi yang dilakukan oleh Jaringan Wakak Jukuk Lampung bekerja sama dengan World Education Indonesia dan AKATIGA Bandung. Advokasi irigasi yang dilakukan oleh Wakak Jukuk ini merupakan bagian dari program besar *Community Based Sustainable Agriculture* (CBSA) yang telah berumur tujuh tahun dari target program satu dekade. Dalam perkembangannya program pertanian berkelanjutan tersebut mengalami kendala kelangkaan air irigasi. Berkurangnya air yang masuk ke sawah petani bukan saja mengganggu proses belajar petani dalam melakukan uji coba pertanian, tapi juga berakibat pada menurunnya kualitas pertanian di Lampung Tengah.

Buku ini (mungkin) bukan jenis tulisan yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan *training* advokasi irigasi atau ditempatkan secara khusus sebagai panduan analisis sosial irigasi. Tulisan ini tidak lebih dari sejenis Buku Refleksi Pengalaman Advokasi Irigasi yang tidak berpretensi untuk membentuk watak gerakan advokasi irigasi secara khusus. Sebagai Buku Refleksi Advokasi Irigasi yang ditulis berdasarkan pengalaman pendampingan, tentu saja tulisan ini membutuhkan banyak masukan pengalaman dan berbagai perspektif dari banyak pihak yang peduli terhadap persoalan irigasi dan masalah pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Secara khusus (sebenarnya), buku ini ditujukan kepada kelompok pendamping petani yang akan melakukan advokasi irigasi. Pilihan tersebut semata-mata didasarkan pada pengalaman yang terjadi di lapangan. Sekalipun demikian bukan berarti buku ini menolak keterlibatan petani dalam proses advokasi irigasi. Petani dalam proses advokasi tetap mempunyai peran penting, bahkan menjadi pusat kesadaran dari semua proses yang akan dilakukan oleh pelaku advokasi irigasi. Dalam setiap gerakan untuk perubahan nasib petani, menempatkan petani sebagai pusat kesadaran merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar.

Buku ini ditulis dengan maksud untuk berbagi pengalaman tentang proses advokasi irigasi yang telah dilakukan oleh petani Lampung Tengah selama lebih dari dua tahun belakangan ini, selain sebagai upaya otokritik atas upaya advokasi yang pernah dilakukan di banyak tempat. Bisa jadi buku ini adalah bentuk pengulangan dari berbagai buku tentang "catatan pengalaman" pendampingan yang pernah diterbitkan oleh berbagai pihak, tapi sebagai upaya untuk mengintensifkan dan memperkaya wacana advokasi tentu tidak ada ruginya untuk membacanya, bukan tidak mungkin pengalaman dalam buku ini dapat direplikasi di banyak tempat.

Dalam setiap gerakan untuk perubahan nasib petani, petani sebagai pusat kesadaran merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar

Buku ini ditulis mengikuti alur asli proses yang dilakukan oleh petani Lampung Tengah selama advokasi irigasi berlangsung (paling tidak sepanjang yang dapat diamati oleh penulis). Sebagai proses untuk melakukan perubahan, advokasi irigasi ini telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan setiap tahun merupakan tahapan penting dalam proses tersebut. Secara garis besar tahapan advokasi tahun pertama difokuskan pda kegiatan analisis sosial dalam rangka menggali informasi dan mengidentifikasi sumber masalah irigasi. Tahun kedua melakukan upaya pemulihan solidaritas petani dan sosialisasi advokasi kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi maupun korban pengelolaan, akhirnya tahun ketiga adalah upaya melakukan berbagai tindakan penting dalam rangka perubahan pengelolaan irigasi.

Sebagai Buku Refleksi Advokasi, tentu saja tulisan ini tidak secara khusus dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan irigasi yang (mungkin) mempunyai tingkat konflik dan intensitas persoalan berbeda-beda, karena advokasi selalu mempunyai kekhususan dan keunikan sendiri. Seperti dikatakan di atas, buku ini hanya sebatas catatan pengalaman dari upaya untuk melakukan perubahan pengelolaan irigasi di irigasi Way Seputih Lampung Tengah.

Dalam buku ini penulis berusaha menempatkan diri sebagai pelayan warung kopi yang berusaha menyajikan secangkir kopi dan menyerahkan *urusan* manis, pahit, dan kental kopi kepada cita rasa setiap penikmatnya. Penikmat kopi ini dapat menambahi gula, *cream*, susu, serbuk kecubung, atau apa pun sesuai dengan selera dan cita rasa yang dikehendaki. Karena itu kritik terhadap isi (*content*) buku ini adalah sesuatu yang (sangat) mungkin untuk memperkaya pengalaman advokasi irigasi di Indonesia.

Buku ini terdiri atas sepuluh bagian yang dalam tulisan ini disebut dengan kopi – penyebutan kopi sebagai pengganti bab atau bagian (seperti dalam penulisan buku umumnya) semata-mata dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa minum kopi adalah tradisi orang Indonesia, lebih-lebih petani. Kopi seperti telah menjadi nafas petani Indonesia sebelum berangkat ke ladang atau sawah. Bagi petani minum kopi bukan bentuk dominasi selera yang hanya identik dengan petani laki-laki dan tua, minum kopi juga jelas bukan identitas yang bias gender. Kopi adalah minuman yang dapat akrab dengan siapa pun yang memang menjadi penikmatnya, tidak peduli jenis kelamin, kebangsaan, etnis, atau identitas sosial lainya. Jangan sampai petani penikmat kopi tersebut tidak dapat menikmati secangkir kopi pagi hanya karena tidak dapat mempertahankan sumber daya agraria yang bernama air.

Kopi Ke-1 dalam panduan ini menjelaskan tentang konteks advokasi irigasi secara umum dan teknik penulisan panduan. Kopi Ke-2 menjelaskan cara

baca pelaku dan korban krisis irigasi yang didasarkan pada hasil analisis sosial irigasi (anasir). Kopi Ke-3 menjelaskan tentang prinsip, kekuatan pelaku perubahan, dan menguji strategi yang dipilih. Kopi Ke-4-9 menyajikan bentuk praktis (bukan teknis) dari beberapa tahapan advokasi irigasi. Dan Kopi Ke-10 adalah kopi penutup yang bersifat refleksi atas usaha untuk mengurangi beban petani menghadapi krisis air dan konflik irigasi.

C. Alur dan Proses Advokasi

Kelangkaan air yang terjadi di Lampung Tengah berakibat pada banyak aspek kehidupan petani, karena pertanian merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat Lampung Tengah, bahkan pertanian telah menjadi pusat tenaga produksi dan reproduksi sosial-ekonomi Lampung Tengah. Akibat kelangkaan air tersebut, petani bukan hanya menderita dan rentan secara ekonomi tetapi solidaritas dan kohesivitas mereka juga retak dan tidak dapat dipertahankan. Polarisasi yang semakin tajam di lingkungan petani pemakai air irigasi Way Seputih berubah menjadi konflik sosial antardesa, -etnis, dan -wilayah karena berebut akses terhadap sumber daya air yang memang terbatas. Karena persoalan itu, advokasi irigasi menjadi pilihan yang paling mungkin dilakukan untuk mengurangi risiko krisis.

Akibat kelangkaan air, petani bukan hanya menderita dan rentan secara ekonomi tetapi solidaritas dan kohesivitas mereka juga retak dan tidak dapat dipertahankan.

Sebagai program, advokasi ini dapat dilihat dari dua aspek kepentingan. *Pertama*, advokasi irigasi ini merupakan konsekuensi dari program besar *Community Based Sustainable Agriculture* (CBSA) yang dikembangkan oleh World Education Indonesia di Lampung Tengah dalam satu dekade terakhir ini. Keberlanjutan program ini (terutama pendampingan untuk pengembangan budidaya padi) sangat tergantung pada ketersediaan air yang ada di irigasi Way Seputih. *Kedua*, advokasi irigasi ini sebenarnya tidak 100% semata-mata untuk keberlanjutan program *Community Based Sustainable Agriculture* (CBSA) yang dikembangkan oleh World Education Indonesia, karena advokasi irigasi

juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak ekonomi, sosial, dan politik petani dari kelangkaan air.

World Education Indonesia adalah *International NGO* yang dalam satu dekade terakhir ini mempunyai program *Community Based Sustainable Agriculture* (CBSA) di Indonesia yang bekerja sama dengan beberapa mitra Indonesia termasuk Jaringan Wakak Jukuk Lampung. CBSA adalah program pemberdayaan dan pengorganisasian yang berbasis pendidikan petani untuk kemandirian dan keberlanjutan pertanian. Program CBSA ini tidak dapat berjalan secara baik ketika air sebagai sumber daya agraria sulit didapat oleh petani Lampung Tengah. Persoalan air ini kemudian berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan di sepanjang aliran irigasi Way Seputih. Hal inilah yang mendorong sebagian kelompok petani dampingan Wakak Jukuk Lampung melakukan analisis sosial irigasi untuk melihat akar persoalan konflik irigasi.

Kekuatan advokasi yang akan dilakukan sangat tergantung pada solidaritas di tingkat petani

Analisis sosial irigasi yang dilakukan oleh petani dan Wakak Jukuk ini kemudian menjadi sebab keterlibatan AKATIGA Bandung dalam penggalian informasi tentang akar persoalan irigasi. Informasi dan data yang berhasil dikumpulkan ternyata menghapus kecurigaan petani atas persoalan distribusi air irigasi. Sebelumnya petani beranggapan bahwa kecilnya air yang masuk ke sawah mereka akibat pengambilan sepihak oleh sebagian petani lain yang ada di wilayah hulu jaringan irigasi.

Analisis sosial irigasi selain menunjukkan sumber persoalan krisis air tersebut bukan petani yang menempati wilayah hulu irigasi, tetapi memperlihatkan bahwa krisis tersebut terjadi karena kompleksitas masalah sistem pengelolaan (persoalan teknis) dan hancurnya pranata sosial petani (persoalan komunal) akibat perebutan sumber daya air. Persoalan teknis dan persoalan komunal tersebut diyakini paling krusial dan mengarahkan (strategi) advokasi irigasi di Lampung Tengah ini.

Strategi advokasi dalam tahun pertama dimaksudkan untuk menjahit solidaritas petani, karena diyakini bahwa kekuatan advokasi yang akan dilakukan sangat tergantung pada solidaritas di tingkat petani. Pada pokoknya, solidaritas petani bukan hanya akan menghapus kecurigaan di kalangan korban krisis, tetapi juga diyakini akan menjadi basis perjuangan untuk perubahan nasib petani dan pertanian. Strategi membangun kembali solidaritas dan soliditas petani ini akan dijadikan modal perubahan untuk kemandirian dan partisipasi tanpa kecurigaan. Di lingkungan pendamping, strategi ini disebut sebagai strategi basis atau tatanan kesadaran kolektif petani[4].

Solidaritas petani bukan hanya akan menghapus kecurigaan di kalangan korban krisis, tetapi juga diyakini akan menjadi basis perjuangan untuk perubahan nasib petani dan pertanian.

Strategi basis ini dilakukan dengan tiga agenda kegiatan yaitu: 1) putaran diskusi, 2) analisis pascadiskusi, dan 3) *workshop* irigasi. Tiga kegiatan tersebut dilakukan selain bertujuan untuk menganyam kembali solidaritas petani juga untuk merumuskan strategi aksi secara partisipatif yang akan dilakukan petani dan sekutunya untuk perubahan. Pendeknya, tiga agenda yang berujung pada *workshop* irigasi di atas adalah tahapan kegiatan untuk merumuskan strategi aksi atau yang disebut dengan strategi bangunan atas[5]. Lebih lengkapnya, lihat skema proses yang menggambarkan alur dan proses advokasi berikut ini.

---

4 Istilah seperti itu sebenarnya dikenal dalam teori Marxisme. Dalam kerangka klasik Marx, manusia terbagi atas dua lingkungan yaitu basis dan bangunan atas. Dalam teori ini tatanan kesadaran kolektif masuk dalam kerangka bangunan atas dan bukan basis, basis struktur meliputi tenaga-tenaga produktif (kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh menusia untuk mengerjakan dan mengubah alam) dan hubungan-hubungan produksi (kerja sama dan pembagian kerja antara manusia dalam proses produksi) (Magnis, 1999: 143). Dalam advokasi irigasi ini solidaritas adalah strategi basis atau disebut tatanan kesadaran kolektif petani, hal ini untuk membedakan dengan beberapa strategi yang akan dibangun di atasnya yaitu pengorganisasian (reorganisasi petani), penguatan petani, dan proses publik.

5 Istilah bangunan atas dalam teori marxisme meliputi tatanan institusional (termasuk sistem hukum dan negara) dan tatanan kesadaran kolektif yang memuat sistem kepercayaan, norma sosial, nilai-nilai, makna-makna, dan semua orientasi spiritual manusia (*Ibid*, hal 145). Sementara tiga agenda strategi aksi advokasi yang terdiri atas pengorganisasian (reorganisasi petani), penguatan petani, dan proses publik disebut sebagai bangunan atas karena diletakkan di atas basis solidaritas dan kohesivitas petani.

Skema Proses Advokasi Irigasi[6]

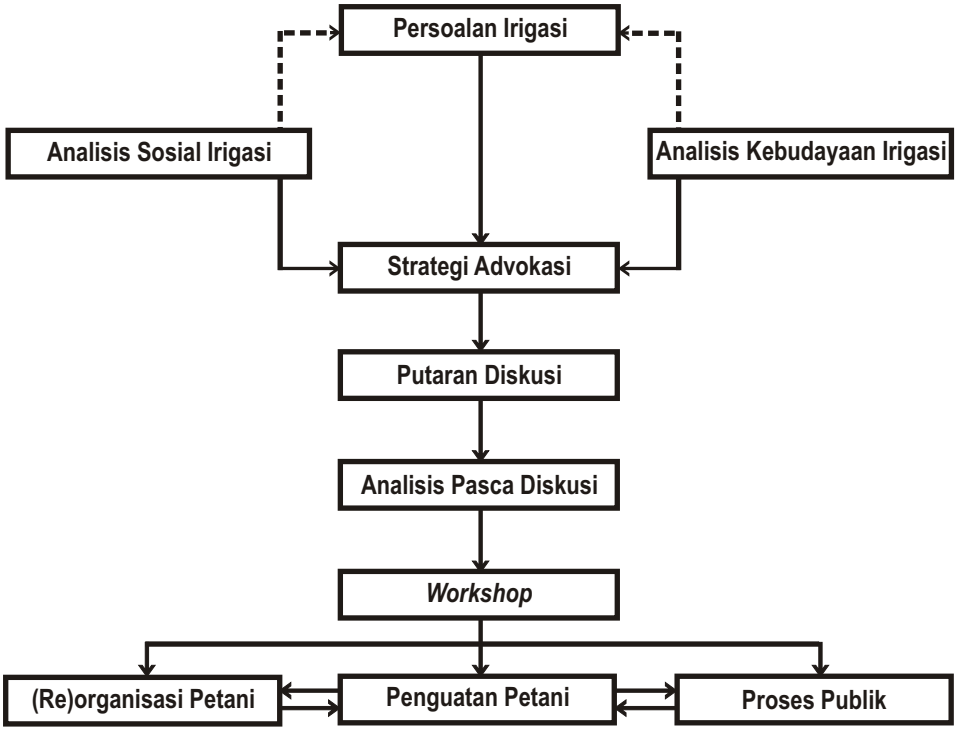

Tahapan perumusan strategi aksi merupakan tahapan yang paling banyak memakan waktu dan merupakan agenda advokasi yang paling penting. Agenda perumusan strategi aksi melewati empat tahapan penting (analisis sosial irigasi, putaran diskusi, analisis pascadiskusi, dan *workshop* irigasi) yang

---

6 Skema ini dibuat berdasarkan pengamatan dan (sejauh) keterlibatan penulis dalam proses advokasi irigasi Way Seputih di Lampung Tengah. Penulis hanya mempunyai keistimewaan waktu sampai upaya reorganisasi P3A dan sebagian proses publik untuk melakukan pengamatan dan terlibat secara langsung dalam proses ini, karena itu panduan ini tidak banyak --bahkan tidak sama sekali-- memberi informasi dampak dan implikasi advokasi irigasi terhadap perubahan yang diharapkan petani dan pihak lain di Lampung Tengah.

melekat pada usaha untuk membangun solidaritas petani. Hal itu dilakukan untuk membangun kesepahaman antara petani korban, pengelola irigasi (dinas kimpraswil), pengambil kebijakan untuk pengelolaan (DPRD), dinas-dinas Pemda yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dan beberapa sekutu petani untuk perubahan.

Metode perumusan tersebut diambil untuk membangun partisipasi banyak pihak dalam melakukan perubahan pengelolaan dan sistem pertanian di Lampung Tengah. Strategi aksi tidak dapat dibuat hanya oleh kelompok pendamping atau petani korban saja, karena persoalan air dan sistem pengelolaannya melibatkan banyak pihak dan meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik daerah.

Kopi Ke-2

Peran Analisis Sosial

A. Analisis Sosial Irigasi (Anasir)[7]

Advokasi diyakini oleh banyak pihak merupakan alat sekaligus cara untuk melakukan proses perubahan dalam masyarakat, tanpa kecuali untuk menghadapi krisis air. Sekalipun belum jelas betul "makhluk" jenis apa advokasi ini, tapi aktivitas advokasi diyakini oleh sejumlah pihak sebagai jalan yang dapat ditempuh untuk keluar dari krisis air yang sedang diderita petani. Yang menarik dari proses ini justru adanya kesadaran petani bahwa advokasi hanya mungkin dilakukan dengan mengetahui akar persoalan secara benar. Tentu saja banyak metode yang dapat dijadikan alat untuk mengenali persoalan dan akar krisis secara cermat dan baik. Yang penting untuk diperhatikan dalam setiap usaha untuk mengenali persoalan dan akar krisis petani adalah jaminan keterlibatan petani di setiap tahapan, bahkan jika mungkin usaha tersebut harus dilakukan petani sendiri untuk menekan masuknya kepentingan pihak lain.

Secara konseptual advokasi merupakan suatu proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengubah keadaan mencapai bentuk tertentu yang dicita-citakan

---

7 Analisis sosial irigasi ini sengaja tidak memuat metode teknis pengambilan data dan alat analisis karena empat pertimbangan. *Pertama*, metode teknis pengambilan data telah banyak dimuat dalam buku-buku metode penelitian sosial, bahkan yang berbahasa Indonesia. *Kedua*, metode teknis pengambilan data dan analisis yang dimuat sebaiknya telah melalui uji coba berkali-kali, sementara metode teknis yang dipakai dalam advokasi Way Seputih baru dipakai sekali. *Ketiga*, metode teknis sangat terikat oleh konteks kasus dan permasalahan yang akan dilihat, motode teknis yang tidak sesuai dengan konteks hanya akan mereduksi persoalan yang akan dilihat. *Keempat*, metode teknis pengambilan data sangat potensial memancing perdebatan, karena metode sangat terikat dengan konsep, teori, madzab ilmu, filsafat ilmu (epistemologi) tertentu, dan seterusnya.

Secara konseptual advokasi merupakan suatu proses kerja kolektif dan berkelanjutan untuk mengubah keadaan mencapai bentuk tertentu yang dicita-citakan. Konsep ini mungkin terlalu sulit bahkan absurd untuk diterjemahkan dalam bentuk strategi aksi. Karena itu, konsep tersebut hanya bermaksud menjelaskan bahwa advokasi irigasi bukan hanya beraspek partisipatif (asal melibatkan petani), tapi juga beraspek transformatif (perubahan nasib petani). Karena itu, proses tersebut harus memungkinkan petani untuk terlibat secara langsung dalam upaya melakukan perubahan, bahkan mempunyai peluang untuk memaknai dan menilai aktivitas perubahan yang sedang berjalan. Hal ini yang kemudian menjadi dasar untuk tidak memperdebatkan pengertian advokasi secara panjang lebar.

Yang harus diperhatikan dalam memilih alat analisis sosial tersebut adalah kepastian bahwa alat tersebut dapat efektif untuk memotret persoalan dan membongkar akar krisis irigasi

Analisis sosial dalam rangka advokasi irigasi ini diharapkan dapat memberi gambaran penting kepada pelaku (terutama petani) untuk menyusun strategi advokasi. Seperti disebut di atas bahwa upaya untuk mengenali persoalan dan akar krisis mempunyai keistimewaan untuk memilih alat atau metode analisis sosial. Yang harus diperhatikan dalam memilih alat analisis sosial tersebut justru kepastian bahwa alat tersebut dapat efektif untuk memotret persoalan dan membongkar akar krisis irigasi.

Metode analisis sosial untuk mengenali persoalan dan akar krisis irigasi sebaiknya menghindari beberapa "kelemahan" yang sering terjadi dalam desain penelitian umumnya. Hal ini terjadi karena: *Pertama*, desain penelitian biasanya melupakan beberapa informasi yang dibutuhkan untuk advokasi atau tidak disentuh secara rinci dan dalam, misalnya beberapa titik rawan seperti *trend* kebijakan negara dan konflik sosial petani. *Kedua*, desain penelitian biasanya terikat pertanyaan penelitian, tema, teori tertentu, paradigma ilmu (sosial) dan target data, sementara analisis sosial irigasi seringkali didasarkan pada perkembangan konflik irigasi dan kemajuan advokasi. *Ketiga*, desain penelitian umumnya mempunyai masalah keterbatasan waktu, analisis sosial

untuk kepentingan advokasi justru butuh lebih banyak waktu dan sering kali dilakukan sepanjang aktivitas advokasi berlangsung.

Analisis sosial irigasi biasanya didesain sebagai penelitian aksi, untuk menghindari beberapa "kelemahan" seperti : 1) melupakan informasi kunci; 2) terikat dengan pertanyaan penelitian, target data, teori dan lain-lain; 3) keterbatasan waktu. Analisis sosial irigasi dilakukan sepanjang proses advokasi berlangsung sehingga kepekaan peneliti menjadi sangat penting terhadap perkembangan isu dan persoalan yang berkaitan dengan irigasi. Penelitian umumnya dilakukan semata-mata untuk tujuan memperoleh sejumlah pengetahuan dan sebatas menggambarkan fenomena, bukan secara sengaja dimaksudkan untuk tujuan perubahan sosial. Sedangkan analisis sosial secara sadar dilakukan untuk mengenali dan menjelaskan permasalahan dalam rangka menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat dan upaya mempengaruhi pihak lain dalam rangka perubahan sosial.

Analisis sosial harus ditujukan untuk menggali dan mengenali bentuk, dinamika, dan watak ketidakadilan dalam rangka membangun kesadaran kolektif korban

Analisis sosial merupakan tahapan strategis untuk melakukan perubahan, hal ini tentu saja bukan klaim. Sayangnya masih banyak pihak yang menganggap analisis sosial merupakan pekerjaan sekelompok orang yang hidup di lingkungan buku-buku, teori-teori dan lingkungan eksklusif (tertutup) dunia akademis. Kesadaran tersebut bukan hanya dimiliki oleh ilmuwan saja, bahkan juga petani. Banyak pihak masih meyakini bahwa analisis merupakan otoritas mutlak ilmuwan sebab analisis terikat dengan berbagai perangkat ilmiah. Padahal, disadari atau tidak, analisis sosial merupakan bagian dari sifat dasar yang melekat dalam diri manusia untuk membaca lingkungannya, karena manusia dikenal sebagai makhluk yang mempunyai watak selalu ingin tahu terhadap sesuatu yang teramati (fenomena) dan yang tidak teramati (nomena).

Dalam konteks perubahan, analisis sosial tidak boleh didominasi sekelompok orang yang merasa mempunyai otoritas ilmiah. Jika perubahan dimaknai sebagai proses mengubah ketidakadilan dan membangun kesadaran gerakan

korban, maka analisis sosial harus ditujukan untuk menggali dan mengenali bentuk, dinamika, dan watak ketidakadilan dalam rangka membangun kesadaran kolektif korban.

Dalam pengertian itu, kesadaran kolektif korban harus menjadi titik tolak dan faktor penting dalam mengupayakan perubahan. Karena itu, analisis sosial irigasi harus ditempatkan sebagai usaha untuk mendapat gambaran lebih lengkap tentang situasi sosial-ekonomi-politik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan irigasi dengan segala akibatnya, hubungan antarlembaga pengelola sumber daya air dan irigasi, kebijakan tentang pengelolaan sumber daya air dan irigasi dengan segala bentuk turunannya, dan mengenali pihak-pihak yang berkomitmen untuk melakukan perubahan atas persoalan air dan irigasi yang sedang diderita petani.

Kesadaran kolektif korban harus menjadi titik tolak dan faktor penting dalam mengupayakan perubahan

Analisis sosial irigasi bukan sekadar kegiatan pengumpulan data dan berita dalam rentang waktu tertentu. Aktivitas ini harus dilakukan selama upaya perubahan masih berproses, karena analisis sosial adalah seperangkat cara untuk membaca, mengetahui, mengidentifikasi, dan menafsirkan hubungan dan situasi sosial dalam rangka menghayati gejala alam dan masyarakat untuk melakukan perubahan. Dengan begitu, realitas yang coba dijelaskan oleh analisis sosial bukan penjelasan final, kebenaran hasil analisis sosial selalu bersifat terbuka (dinamis) terhadap kritik dan terus berubah mengikuti perkembangan kasus. Karena itu, setiap langkah dan tahapan adalah penting untuk dianalisis oleh pelaku advokasi.

Analisis sosial biasanya dimulai dengan pengumpulan informasi awal yang berkaitan dengan kasus kecil di tingkat jaringan irigasi, misalnya konflik jaringan tersier (jaringan air di lingkungan desa) dan kuarter (jaringan air lingkungan hamparan sawah) kemudian berkembang ke tahapan penelusuran informasi yang lebih besar dan kompleks. Informasi awal ini penting untuk menjadi acuan target informasi yang akan diperoleh dan titik-titik informasi

yang perlu didalami atau dipertajam dalam analisis berikutnya. Informasi awal tidak melulu dimulai dari titik kasus di tingkat jaringan kecil, penentuan informasi awal sangat tergantung kebutuhan dan strategi pengambilan informasi yang akan dilakukan. Secara garis besar persoalan irigasi (diasumsikan) berada di dua titik kritis yaitu persoalan teknis pengelolaan irigasi dan persoalan komunal petani pemakai air.

Secara umum informasi awal yang harus diperoleh dalam analisis sosial irigasi antara lain: 1) sejarah singkat pembangunan irigasi; 2) kondisi sosial-ekonomi pertanian; 3) organisasi petani yang berkaitan dengan pengelolaan air maupun yang tidak; 4) kondisi fisik irigasi; 5) struktur pengelolaan irigasi; 6) kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian air.

Beberapa hal yang perlu didalami berkaitan dengan informasi fisik meliputi: 1) kondisi wilayah sumber air dan bendungan; 2) kerusakan fisik pintu air, talud, pengendapan lumpur, penyumbatan sampah, kesalahan rancang-bangun saluran, pembobolan; 3) luas lahan sawah fungsi dan baku yang direncanakan dapat diairi oleh irigasi pada tahap pembangunan jaringan irigasi; 4) luas sawah yang mampu diairi oleh irigasi tersebut dalam praktik; 5) seberapa drastis tingkat kemerosotan tangkapan air dari tahun ke tahun dalam irigasi; 6) berapa luas hutan penyangga dan bagaimana status penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatannya.

Secara garis besar persoalan irigasi (diasumsikan) berada di dua titik kritis yaitu persoalan teknis pengelolaan irigasi dan persoalan komunal petani pemakai air.

Informasi sosial-ekonomi yang perlu didalami meliputi : 1) potensi konflik petani; 2) pendapatan petani dalam satu musim panen; 3) kerugian petani karena gagal tanam maupun gagal panen dalam satu tahun; 4) jenis iuran yang harus dibayar petani berkaitan dengan pengelolaan irigasi dan pihak mana yang menarik iuran tersebut; 5) jika terjadi konflik atau ketegangan sosial lainnya, persepsi petani harus diketahui berkaitan dengan hal tersebut; 6) keragaman etnis dan budaya petani dalam jaringan irigasi; 7) persentase petani miskin dan petani kaya dalam jaringan irigasi; 8) apakah terjadi praktik pencurian air baik yang dilakukan oleh petugas pengairan maupun oleh petani.

Informasi tentang struktur pengelolaan irigasi mencakup: 1) pihak mana yang dominan melakukan pengelolaan irigasi, jika pemerintah ada di tingkat apa, swasta, atau petani; 2) keterlibatan petani jika irigasi dikelola oleh pemerintah atau swasta; 3) sumber pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; 4) berapa besar fungsi pengawasan dan pemanfaatan yang diperoleh petani dalam sistem pengelolaan tersebut; 5) tingkat koordinasi instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi, pemeliharaan sumber daya air, dan pemanfaatannya.

Informasi berkaitan dengan organisasi petani mencakup: 1) ada atau tidak organisasi petani yang terlibat dalam pengelolaan irigasi; 2) bagaimana hubungan antara organisasi petani dengan pihak pengelola irigasi; 3) apa persepsi petani terhadap organisasi tersebut dan bagaimana pola hubungan organisasi tersebut dengan petani; 4) apakah organisasi petani itu dapat menjadi alat petani untuk melakukan perubahan.

Informasi tentang kebijakan yang berkaitan dengan irigasi di semua tingkatan pemerintahan yang perlu dianalisis meliputi: 1) kebijakan tentang pemanfaatan sumber daya air; 2) kebijakan tentang pengelolaan irigasi; 3) kebijakan tentang pengelolaan jenis dan fungsi hutan; 4) kebijakan tentang pertambangan dan barang tambang; 5) kebijakan tentang pencemaran sungai dan semua aliran air termasuk irigasi; 6) kebijakan tentang pencetakan sawah; 7) kebijakan tentang musim tanam.

B. Beberapa Cara Pandang Tentang Krisis Air Irigasi

Mengetahui cara pandang (baca: persepsi) pihak pelaku dan korban dalam pusaran krisis air irigasi menjadi sangat penting dalam konteks advokasi irigasi. Untuk kepentingan tersebut, peran analisis sosial irigasi dalam proses advokasi sangat dibutuhkan. Persepsi para pihak (korban maupun pelaku) penting untuk diketahui berkaitan dengan usaha memetakan kekuatan pelaku perubahan, potensi pengkhianatan, dan upaya penghambat dalam proses advokasi irigasi.

Petani dalam konteks advokasi irigasi harus ditempatkan sebagai korban dan mungkin juga pelaku atas krisis dan konflik tersebut

Krisis air irigasi menempatkan (rakyat) petani pada posisi yang sering berbeda dengan krisis sumber daya agraria lainnya seperti hutan, perkebunan, dan tanah. Banyak kasus sumber daya agraria (baca: sengketa) tanah dan hutan di Indonesia yang menunjukkan watak koersif negara kepada masyarakat (petani), misalnya dalam sengketa hak (milik) tanah adat dengan hak menguasai negara atas tanah. Yang membedakan krisis agraria seperti tanah, hutan, dan perkebunan dengan krisis air adalah watak konflik hutan, tanah, dan perkebunan cenderung bersifat vertikal sekalipun di beberapa kasus konflik agraria tersebut berdimensi horisontal. Watak konflik tanah, hutan, dan perkebunan sering kali menempatkan (rakyat) petani berhadapan secara langsung dengan pemerintah dan pemodal (*investor* atau pengembang); karena itu, dalam konflik agraria ini kekuatan militer dan preman berpotensi besar untuk terlibat (baca: dilibatkan) dalam konflik.

Secara umum krisis air (irigasi) justru menunjukkan watak konflik yang cenderung horisontal, karena konflik ini lebih banyak terjadi di tingkat jaringan tersier dan kuarter yang dikelola oleh petani. Karena itu, dalam konteks advokasi irigasi, petani harus ditempatkan sebagai korban (konflik) dan sekaligus pelaku (konflik) atas krisis tersebut, hal ini mungkin juga menempatkan petani sebagai korban dan pelaku dalam kasus agraria yang

lain. Secara khusus, konflik air relatif lebih kompleks dibanding dengan konflik agraria lainya, karena konflik air bukan saja mengikuti kompleksitas jaringan ekosistem daerah aliran sungai yang membentang dari hulu sungai sampai hilir sungai tapi juga sepanjang jaringan irigasi.

Di luar petani pengguna langsung air irigasi sebagai korban dan mungkin pelaku, analisis sosial irigasi juga harus ditujukan untuk mengetahui peran petani pinggiran hutan, pemerintah sebagai pengelola, masyarakat penambang, industri yang mengambil manfaat air irigasi, dan organisasi petani maupun organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan. Mengetahui peran masing-masing pihak dalam krisis irigasi akan membantu proses identifikasi korban dan pelaku krisis.

Dalam konteks advokasi irigasi, petani harus ditempatkan sebagai korban (konflik) dan sekaligus pelaku (konflik) atas krisis tersebut, hal ini mungkin juga menempatkan petani sebagai korban dan pelaku dalam kasus agraria yang lain.

Identifikasi peran berbagai pihak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, penting dilakukan untuk menjelaskan lebih lengkap tentang cara pandang mereka masing-masing terhadap krisis irigasi yang sedang diderita petani maupun pihak lainya. Posisi dan peran yang berbeda dari berbagai pihak tersebut sangat mempengaruhi pandangan dan cara baca mereka terhadap krisis. Sangat penting untuk ditegaskan di sini bahwa identifikasi itu tidak semata-mata ditujukan kepada pihak tertentu atau pihak lain sebagai "biang kerok" krisis irigasi.

Dalam kasus advokasi irigasi Way Seputih, misalnya, perbedaan cara pandang dari beberapa pihak terhadap krisis air irigasi tersebut muncul karena kepentingan untuk menyelamatkan citra masing-masing pihak, bahkan hal yang sama juga terjadi di tingkat petani sendiri. Beberapa pandangan terhadap krisis air irigasi yang sering muncul dari hubungan horisontal tersebut antara lain:

1. **Menurut petani pinggiran hutan (resapan)**, krisis air yang terjadi di daerah irigasi sama sekali tidak berkaitan dengan keberadaan mereka

dalam memanfaatkan hasil hutan. Daya rusak terhadap hutan yang diakibatkan oleh pemegang HPH dan pengusaha perkebunan lebih besar dari pada kerusakan yang dilakukan oleh petani pinggiran hutan dalam memanfaatkan hasil hutan.

Menurut pihak Dishutbun dan Kimpraswil Lampung Tengah, turunnya debit air irigasi Way Seputih beberapa tahun belakangan ini adalah akibat penjarahan hutan penyangga di Kabupaten Tanggamus yang dilakukan oleh petani pinggiran hutan pada tahun 1998. Padahal, debit air irigasi Way Seputih turun secara signifikan justru terjadi antara tahun 1969-1970, bukan tahun 1998-2003.

Daya rusak terhadap hutan yang diakibatkan oleh pemegang HPH dan pengusaha perkebunan lebih besar dari pada kerusakan yang dilakukan oleh petani pinggiran hutan dalam memanfaatkan hasil hutan

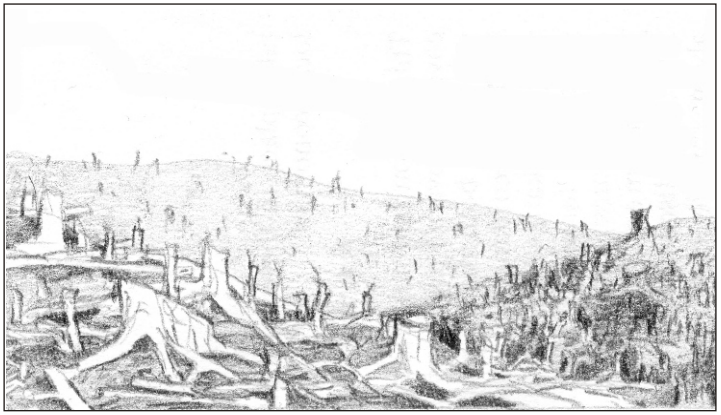

Gambar 3.
Kerusakan hutan adalah salah satu penyebab terjadinya krisis air.

Menurut konsultan Proyek Irigasi Daerah (Prosida), pada tahun 1967 irigasi Way seputih diprediksikan mampu mengairi areal seluas 25.000 ha dari areal proyek seluas 30.000 ha dan air di musim kemarau diperkirakan cukup untuk 4.500 ha padi *gadu*. Padahal, penelitian Fakultas Pertanian IPB Bogor tahun 1970 menunjukkan penurunan yang cukup drastis. Oleh karena itu, pihak peneliti Fakultas Pertanian IPB hanya merekomendasikan 17.000 ha luas sawah yang dapat ditanami dengan pengairan irigasi Way

Seputih. Jika berkurangnya debit air di irigasi diyakini akibat kerusakan hutan, maka kerusakan hutan yang paling dramatis justru (mungkin) terjadi pada periode 1967-1970. Dalam periode tersebut petani pinggiran hutan bukan komunitas yang dapat mengambil manfaat hutan.

Dalam kasus irigasi Way Seputih, sebagian daerah resapan adalah milik petani hutan, sebagian dikuasai oleh perusahaan perkebunan, dan sisanya dikuasai oleh pemerintah daerah. Karena kepemilikan petani atas lahan resapan tersebut, maka mereka berkuasa penuh atas pemanfaatan hasil hutan. Pendapat ini juga hampir sama dengan pemegang HPH dan pemilik perkebunan besar.

2. **Menurut Dinas Perhutani dan Perkebunan Daerah Kabupaten**, pihak Dishutbun tidak dapat dipersalahkan dalam kasus krisis air irigasi karena: *pertama*, hutan daerah sumber air (penyangga) bukan wilayah kerja yang dapat dikontrol oleh pihak mereka (Dishutbun Lampung Tengah), jadi harus dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan Provinsi. *Kedua*, berkaitan dengan area hutan resapan, pihaknya telah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan penebangan liar di area tersebut, tapi kenyataannya peraturan itu masih tetap dilanggar oleh masyarakat. Hal itu terjadi karena tidak mungkin pihak Dishutbun mengawasi masyarakat pinggiran hutan selama 24 jam.

3. **Menurut Subdinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kimpraswil Kabupaten,** krisis air irigasi terjadi karena: *pertama*, kondisi alam yang tidak menguntungkan dan hancurnya daerah penyangga air yang ada di hulu sungai (Kabupaten Tanggamus). *Kedua*, kerusakan fisik jaringan irigasi, endapan lumpur tinggi, pembobolan tanggul oleh petani, pembuangan sampah berat di jaringan irigasi oleh petani, kerusakan talud untuk *ngguyang* ternak, dan kerusakan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh petani. *Ketiga*, krisis air merupakan akibat pencurian yang

dilakukan oleh sebagian petani di jaringan irigasi. Untuk memperbaiki dua hal pertama, pemerintah tidak punya alokasi anggaran yang cukup, apalagi petani sekarang sudah mulai tidak membayar iuran air (Ipair).

4. **Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah**, krisis air atau konflik yang terjadi di tingkat petani itu dibuat sendiri oleh petani. Petani yang menempati wilayah hulu jaringan irigasi sering tidak berbagi air secara adil. Hal ini yang menimbulkan reaksi negatif dari petani hilir dengan cara merusak pintu air yang ada di hulu.

5. **Menurut petani pemakai air**, krisis air yang terjadi merupakan akibat salah urus pemerintah terhadap fungsi hutan, pertambangan batu dan pasir di aliran sungai, kerusakan fisik jaringan, keadaan alam yang tidak baik, pencurian air oleh petani sendiri, praktik jual-beli air oleh petugas pengairan, dan pengelolaan irigasi yang tidak terbuka. Menurut mereka, konflik yang terjadi di masyarakat petani adalah akibat dari semua persoalan di atas.

Krisis air yang terjadi merupakan akibat salah urus pemerintah terhadap fungsi hutan, pertambangan batu, dan pasir di aliran sungai, kerusakan fisik jaringan, keadaan alam yang tidak baik, pencurian air oleh petani sendiri, jual-beli air oleh petugas pengairan, dan pengelolaan irigasi yang tidak terbuka

Beberapa pandangan tentang krisis air irigasi tersebut di atas bukan saja menunjukkan adanya usaha untuk menyelamatkan kepentingan masing-masing pihak, tapi sekaligus upaya untuk menyembunyikan kecerobohan dinas-dinas pemerintah. Pihak dinas pemerintah, misalnya, tidak pernah menyinggung kebijakan dan kelemahan sistem pengelolaan irigasi, kebijakan pengelolaan yang tidak berpihak, dan berbagai kebijakan lain seperti pencetakan sawah yang melebihi kapasitas pengairan, pencemaran lingkungan karena limbah industri, pertambangan pasir dan batu (sirtu), dan lain-lain.

Sebagai usaha untuk mengurai dan menjelaskan persoalan air irigasi, analisis sosial irigasi harus mampu menampilkan analisis tentang bagaimana persepsi berbagai pihak yang berbeda kepentingan dibangun, untuk kepentingan apa,

ditujukan kepada pihak mana (korban atau pelaku lain), dan dengan cara apa persepsi tersebut ditanamkan dalam kesadaran pihak lain. Analisis terhadap persepsi beberapa pihak tersebut penting untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam konflik air, baik sebagai korban maupun pelaku.

Analisis sosial dalam advokasi mempunyai keistimewaan yang mungkin tidak ada dalam penelitian pada umumnya, karena analisis sosial ini mempunyai sejumlah kesempatan untuk terus mengikuti perkembangan persepsi para pihak baik korban atau pelaku, perubahan perilaku korban, perubahan kebijakan di semua tingkatan, dan arah perubahan yang akan dicapai oleh advokasi tersebut.

Konflik air di tingkat petani harus dilihat sebagai kompleksitas konflik sosial-ekonomi-politik sebagai akibat akumulasi salah urus negara terhadap sumber daya agraria

C. Menandai Dua Titik Rawan Advokasi Irigasi

1. Konflik Sosial Irigasi

Persoalan besar advokasi irigasi adalah kelangkaan air untuk proses produksi pertanian, penyebabnya memang bisa macam-macam. Dalam konteks ini sebaiknya analisis sosial untuk advokasi irigasi mempunyai daya *endus* yang kuat terhadap konflik antarpetani baik laten (potensial) maupun manifes (yang telah terjadi). Seperti telah disebutkan sebelumnya, krisis air mempunyai watak konflik yang relatif berbeda dengan persoalan agraria lainya. Dimensi konflik air lebih berkembang secara horisontal, yaitu antara petani di semua tingkatan jaringan, daripada perlawanan petani terhadap pengelola irigasi. Hanya sedikit kasus konflik air yang mengarah pada persengketaan antara petani dan pemerintah atau pihak swasta.

Dengan demikian, konflik air di tingkat petani harus dilihat sebagai kompleksitas persoalan sosial-ekonomi-politik akibat akumulasi salah urus negara terhadap sumber daya agraria (terutama air), karena itu cara membaca konflik tersebut juga harus mempertimbangkan perkembangan (konstelasi) sosial-ekonomi-politik di semua tingkatan pemerintah dan kebijakan. Dengan cara baca dan pengertian tersebut pelaku advokasi dapat menghindari persepsi bahwa konflik (air) irigasi terjadi karena persoalan yang bersifat lokal (wilayah jaringan irigasi) semata. Karena itu, jika ada persepsi bahwa pengelola irigasi di tingkat pemerintah kabupaten adalah pelaku dari krisis air irigasi tersebut, maka sesungguhnya mereka bukan satu-satunya pelaku dalam jajaran pemerintahan.

Harus diwaspadai adalah masuknya sentimen etnis dan kewilayahan yang seringkali akan menjadi "tungku pembakar" persoalan irigasi

Semua konflik yang terjadi pada jaringan irigasi dapat dipastikan karena perebutan sumber daya air, meskipun ada juga yang berkaitan dengan hutan resapan dan galian pasir-batu (sirtu). Tingkat konflik petani terjadi di semua tingkatan jaringan, mulai dari tingkat wilayah jaringan sampai tingkat pembagian dalam satu hamparan sawah. Berkaitan dengan konflik antarwilayah jaringan dan konflik hutan, yang harus ditekan justru munculnya sentimen etnis dan kewilayahan yang seringkali menjadi "tungku pembakar" persoalan irigasi.

Dalam kasus Way Seputih, misalnya, ada beberapa peristiwa besar yang menunjukkan bahwa konflik irigasi mempunyai potensi besar untuk bergeser menjadi konflik antarkampung yang berdimensi etnis. Tahun 1997 hampir terjadi "perang" antarkampung yang berdimensi etnis karena perebutan air di tingkat jaringan primer, tahun 1984 terjadi mutilasi seorang petani oleh petani lain karena berebut air di saluran kuarter. Peristiwa *nglurug*-nya petani dari jaringan hilir dan tengah irigasi Way Seputih ke wilayah hulu terjadi hampir tiap tahun, bahkan pada musim *gadu* tahun 2003 hal tersebut masih terjadi.

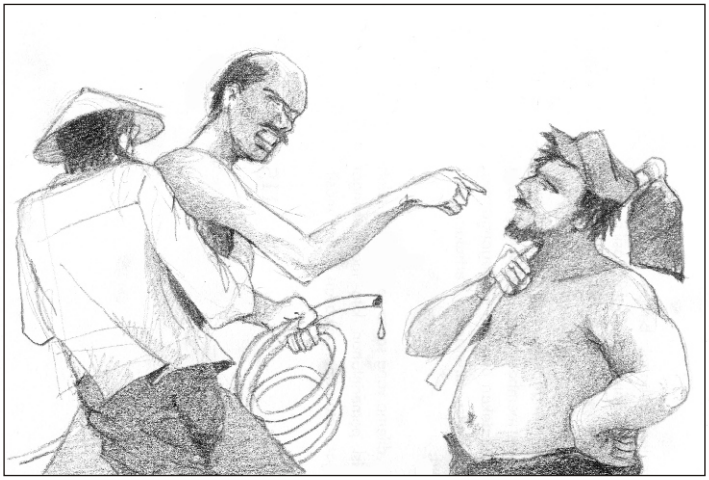

Gambar 4.
Konflik antar petani disebabkan oleh konflik irigasi.

Kasus irigasi Way Seputih menunjukkan bahwa konflik dapat terjadi antarpetani pengguna air dan petani pemilik hutan. Hal ini terjadi karena perbedaan cara memahami persoalan tata guna hutan. Petani pemilik hutan merasa mempunyai kebebasan untuk menebang hutan karena tanah hutan tersebut adalah milik mereka, sementara petani pengguna air menganggap penebangan hutan tidak dapat dibiarkan kerena berakibat pada rendahnya daya tangkapan hutan terhadap air. Kasus ini memang tidak berkembang menjadi konflik serius di antara mereka, karena konflik sesungguhnya adalah antarpetani pemakai air atau petani sawah.

Konflik antarpetani sawah sebagian besar terjadi karena perebutan air, hal ini terjadi di semua tingkatan jaringan irigasi. Konflik petani sawah ini menyimpan potensi kekerasan fisik yang sangat besar. Beberapa keadaan yang biasanya menjadi titik-titik konflik antara lain karena praktik pencurian dan pengrusakan jaringan baik oleh petani maupun petugas pengairan. Pada kasus pencurian air irigasi untuk musim *gadu* 2003, misalnya, ada tanda-tanda keterlibatan petugas pengairan tingkat ranting kecamatan dan desa secara aktif, bahkan cenderung provokatif. Modus operandi yang sering dipakai oleh petugas

pengairan tersebut dengan menjanjikan jatah air (yang tidak menjadi haknya) kepada petani dengan imbalan uang atau gabah yang dipungut oleh *ulu-ulu* desa.

Peristiwa kekeringan yang terjadi pada musim *gadu* tahun 2003 yang mengakibatkan kerugian petani wilayah tengah sebesar Rp 3,4 miliyar misalnya hampir memancing kemarahan dan konflik antarwilayah. Kekeringan tersebut terjadi karena lemahnya kontrol pengelola atas ketersediaan air dalam jaringan sehingga terjadi pencurian air oleh petani dan petugas pengairan wilayah hulu irigasi . Air yang seharusnya menjadi jatah petani wilayah tengah irigasi Way Seputih tidak dapat masuk ke petak sawah karena terjadi aksi pencurian tersebut. Akibatnya, padi umur 1-2 bulan seluas 953 ha dari 2.132 ha sawah *gadu* di 9 desa tidak dapat diselamatkan (baca : puso).

Petani pemilik hutan merasa mempunyai kebebasan untuk menebang hutan karena tanah hutan tersebut adalah milik mereka, sementara petani pengguna air menganggap penebangan hutan tidak dapat dibiarkan kerena berakibat pada rendahnya daya tangkapan hutan terhadap air

Kemarahan petani sebenarnya bukan hanya dipicu oleh praktik pencurian air yang dilakukan oleh petani dan petugas pengairan saja, tapi penyelesaian persoalan yang ditawarkan oleh pengelola juga dinilai petani tidak adil dan berkesan melindungi kesalahan pihak pengelola. Kemarahan petani dalam kasus kekeringan musim *gadu* 2003 memang dapat "dijinakkan," tapi kerugian yang diderita petani akibat kekeringan tersebut berpengaruh secara serius terhadap ketahanan usaha tani mereka.

Beberapa modus operandi pencurian air di jaringan irigasi yang biasanya menjadi sumber konflik antarpetani sawah antara lain :

1. menutup atau membuka pintu air di tingkat Bendung Wilayah Sungai (BWS) secara sepihak.
2. merusak pintu-pintu air untuk menghilangkan fungsi kontrol pintu agar tidak dapat naik-turun.
3. menutup pintu air dengan balok-balok kayu untuk menaikkan air.
4. secara sengaja membuang sampah berat ke jaringan irigasi (batang pisang, batang kelapa, balok kayu, dan lain-lain).
5. melakukan penyedotan air dengan pompa mesin atau dengan pipa tanpa mesin.
6. memotong aliran air dengan cara membuat sodetan baru.
7. Memonopoli air dengan cara menutup jaringan atau lubang yang menghubungkan petak sawah satu ke petak sawah lainnya.

Petani adalah masyarakat yang telah lama terampas hak dan keahliannya untuk mengelola irigasi

2. Arah Kebijakan Negara

Selain konflik sosial petani akibat perebutan sumber daya air, perubahan kebijakan adalah hal lain yang harus diwaspadai oleh pelaku advokasi. Ada dua *trend* kebijakan pengelolaan irigasi yang sekarang sedang menjadi sorotan banyak pihak, *pertama* pemerintah seolah-olah berusaha untuk melepaskan tanggung jawab pelayanan pengairan kepada petani dengan menyerahkan pengelolaan irigasi kepada petani. *Kedua*, kuatnya keinginan pemerintah untuk menjadikan air sebagai barang dagangan dengan melibatkan pihak swasta sebagai pengelola sumber daya air.

Gambar 5.
Air adalah barang dagangan.

Jika petani tidak mampu dan mau menerima pengelolaan irigasi maka pengelolaan akan diserahkan oleh pemerintah kepada pihak swasta

Dua *trend* kebijakan di atas sebenarnya bukan pilihan yang baik buat petani dalam himpitan krisis air dan ancaman konflik sosial. Kebijakan penyerahan pengelolaan irigasi dari pemeritah kepada petani sebenarnya diletakkan dalam kerangka partisipasi petani untuk dapat terlibat secara langsung dalam pengelolaan irigasi. Pertanyaan yang harus dijawab dalam konteks penyerahan pengelolaan tersebut adalah seberapa besar petani mampu mengelola jaringan irigasi yang telah rusak tersebut, sementara pemerintah yang mempunyai sumber daya lebih saja tidak mampu melakukan pengelolaan. Apakah itu bukan berarti pemerintah berusaha "cuci tangan"?

Kebijakan penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada petani tidak dapat dibaca semata-mata hanya soal teknis pengelolaan jaringan. Lebih dari itu, penyerahan pengelolaan irigasi harus dibaca sebagai penyerahan semua persoalan yang meliputi; konflik sosial, kemiskinan petani, kekeringan yang setiap tahun diderita petani, hutan penyangga, pertambangan, pencemaran

sungai, dan lain-lain kepada petani padahal mereka adalah kelompok masyarakat yang telah lama terampas hak dan keahliannya untuk mengelola irigasi.

Merujuk pada hal di atas, pelaku advokasi bukan saja dituntut untuk waspada terhadap berubahan kebijakan tapi juga harus berpikir strategis. Karena penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada petani secara langsung berkaitan dengan maksud pemerintah untuk melakukan swastanisasi pengelolaan sumber daya air. Rumusan yang paling sederhana untuk memahami kebijakan pengelolaan irigasi pemerintah adalah jika petani tidak mampu dan tidak mau menerima pengelolaan irigasi, maka pemerintah akan menyerahkan pengelolaan itu kepada pihak swasta. Tentu saja keduanya bukan pilihan yang mudah bagi pelaku advokasi, lebih-lebih bagi petani.

Penting bagi pelaku advokasi untuk mempersiapkan alat analisis isi kebijakan yang dapat membaca secara kritis arah, motif, dan kepentingan di balik terbitnya suatu kebijakan negara tentang irigasi

Dalam konteks tersebut, penting bagi pelaku advokasi untuk memperhatikan perkembangan kebijakan negara. Kebijakan irigasi atau yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air tidak dapat dipahami hanya sebagai peraturan saja. Berkaitan dengan hal tersebut penting bagi pelaku advokasi untuk mempersiapkan alat analisis isi kebijakan yang dapat membaca secara kritis arah, motif, dan kepentingan dibalik terbitnya suatu kebijakan negara.

Dalam melakukan analisis isi kebijakan, pelaku advokasi juga harus terus memperhatikan perkembangan kebijakan di semua tingkatan. Misalnya, perkembangan substansi perdebatan RUU Sumber Daya Air yang ada di parlemen dan dampak yang mungkin akan ditimbulkan oleh RUU tersebut jika sampai disahkan oleh parlemen. Perhatian tersebut penting untuk menyusun strategi antisipasi atau tindakan penolakan atas ide dalam undang-undang yang baru disahkan tersebut.

Analisis isi kebijakan biasanya dilakukan untuk melihat secara kritis: *Pertama*, konsistensi prinsip dan asas hukum yang dipakai antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dalam mengatur persoalan yang sama. *Kedua*, konsistensi prinsip dan asas hukum dalam satu peraturan. *Ketiga*, sinkronisasi antara peraturan satu dengan peraturan lain yang derajatnya sama atau yang disebut dengan sinkronisasi horisontal. *Keempat*, sinkronisasi antara peraturan satu dengan peraturan lainnya yang mempunyai derajat berbeda atau dikenal dengan sinkronisasi vertikal. *Kelima*, analisis isi kebijakan ditujukan untuk melihat secara kritis arah, motif, kepentingan, dan keberpihakan dibalik terbitnya suatu kebijakan negara. *Keenam*, analisis kebijakan ditujukan untuk melihat usaha negara mempromosikan, memenuhi, dan menjamin hak-hak dasar rakyat atas sumber daya air.

Prinsip penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penandaan titik rawan tersebut adalah kecermatan melihat kondisi-kondisi yang mungkin akan beresiko tinggi bagi petani jika hal itu dibiarkan tanpa perhatian khusus.

Menandai titik rawan dalam advokasi mungkin sangat membantu pelaku advokasi untuk menentukan prioritas dan pilihan-pilihan strategis dalam mencari jalan keluar. Titik rawan dalam advokasi irigasi mungkin bisa lebih dari dua hal yang telah disebut di atas. Prinsip penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penandaan titik rawan tersebut adalah kecermatan melihat kondisi-kondisi yang mungkin akan berisiko tinggi bagi petani jika hal itu dibiarkan tanpa perhatian khusus.

Kopi Ke-3

Strategi Advokasi

A. Menentukan Strategi Advokasi

Strategi advokasi irigasi adalah kemampuan memaksimalkan sumberdaya dalam menentukan cara untuk mencapai perubahan sistem pengelolaan irigasi yang dicita-citakan oleh petani. Menentukan strategi merupakan tahapan penting dalam advokasi irigasi yang akan dilakukan. Strategi advokasi harus mempertimbangkan beberapa hal:

Strategi advokasi harus diletakkan di atas prinsip-prinsip yang telah disepakati para pelaku advokasi, terutama petani

Pertama, strategi advokasi harus secara sadar dibuat oleh petani dan untuk menjawab persoalan petani. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari masuknya kepentingan pihak-pihak di luar petani, seperti pendamping petani, donor, dan lain-lain.

Kedua, strategi advokasi harus dibuat berdasarkan analisis sosial yang serius dan berkelanjutan. Hal ini mensyaratkan bentuk analisis sosial yang partisipatif dan harus dapat menekan bias kepentingan pihak lain, seperti analis pendamping.

Ketiga, strategi advokasi harus diletakkan di atas prinsip-prinsip yang telah disepakati para pelaku advokasi, terutama petani. Hal ini untuk menghindari strategi yang justru berakibat buruk bagi petani.

Keempat, strategi advokasi harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan pelaku advokasi.

Kelima, strategi advokasi tidak boleh diletakkan di atas dasar program atau proyek.

Keenam, strategi advokasi harus terus-menerus dievaluasi secara serius.

Ketujuh, strategi advokasi harus memperhitungkan prioritas penyelesaian kasus.

Semua pihak adalah korban sekaligus pelaku dalam krisis dan konflik irigasi

B. Membangun Prinsip Advokasi

Prinsip advokasi adalah bagian dari strategi advokasi yang akan dilakukan. Prinsip advokasi bukan saja akan menjadi tata nilai dalam proses advokasi yang mengikat para pelaku, tetapi juga menjadi semacam ideologi gerakan perubahan yang akan dicapai. Walaupun demikian, prinsip-prinsip advokasi tidak perlu berwatak seperti doktrin, sebab advokasi adalah medan kemungkinan yang dapat berubah dalam hitungan menit.

Dalam kasus advokasi yang melibatkan banyak lembaga seperti lembaga pendamping petani, organisasi petani, lembaga donor, dan lembaga penelitian, prinsip advokasi menjadi sangat penting. Realitas kerja sama untuk melakukan advokasi seperti yang tersebut di atas merupakan prasyarat mutlak mengingat kerja perubahan tidak dapat dilakukan hanya oleh sedikit sumber daya.

Prinsip advokasi seperti sangat berbeda dengan pola kerja sama antarlembaga. Pola kerja sama antarlembaga hanya berkaitan dengan persoalan birokrasi dan administrasi kelembagaan, sedangkan prinsip

advokasi berkaitan dengan tata nilai yang menjadi dasar dalam proses kerja perubahan yang akan dituju oleh gerakan advokasi. Prinsip advokasi mengikat para pihak yang telah berkomitmen untuk melakukan perubahan bersama petani.

> Prinsip advokasi misalnya ditujukan untuk menghindari bentuk "pengkhianatan" dari dalam oleh pelaku advokasi. Bukan tidak mungkin beberapa pihak yang melakukan kerja sama untuk perubahan merasa kepentingannya terancam atau di belakang hari baru disadari bahwa sebagian pelaku advokasi merupakan bagian dari masalah yang hendak diselesaikan.

Analisis sosial harus ditujukan untuk menggali dan mengenali bentuk, dinamika, dan watak ketidakadilan dalam rangka membangun kesadaran kolektif korban

Misalnya dalam advokasi irigasi Way Seputih, ada prinsip yang secara tidak disadari berkembang, yaitu semua pihak adalah korban sekaligus pelaku krisis dan konflik irigasi. Prinsip ini tidak dibuat berdasarkan perdebatan antarpihak, tapi berkembang bersama proses konsolidasi petani dan pihak lain. Prinsip ini dikembangkan dalam proses advokasi irigasi di Way Seputih karena tidak mungkin memilih prinsip "biang kerok" dalam situasi konflik yang bernuansa etnis dan kewilayahan.

Sebagai bagian dari strategi advokasi, prinsip advokasi harus didasarkan dan dibangun menurut kepentingan petani dan strategi advokasi. Sebaiknya, dalam rangka itu, nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat petani setempat menjadi dasar dari penyusunan prinsip. Prinsip advokasi yang dibuat berdasarkan nilai-nilai sosial yang berkembang dan berlaku di masyarakat setempat mempunyai daya ikat lebih dibanding dengan prinsip-prinsip yang datang atau didatangkan dari tata nilai mereka.

Masyarakat subak Bali, misalnya, mengenal prinsip pengelolaan irigasi yang dikenal dengan segara-gunung (laut-gunung). Prinsip ini menggambarkan air sebagai siklus kehidupan yang harus dijaga. Gunung dan hutan juga harus dijaga, sebab gunung memberikan air dan hutan merupakan sistem reservoir alami yang mengatur supply sumber-sumber air di bagian lereng. Kesadaran terhadap pentingnya harmoni antara manusia sebagai pengelola alam dan hukum alam sendiri merupakan sebab-akibat yang bersifat tetap. Dalam kesadaran harmoni tersebut irigasi "tradisional" subak Bali dipelihara dan dikelola. Selain masyarakat Bali, sebagian dari petani Jawa juga masih meyakini prinsip bahwa air yang mengalir di petak sawah mereka jangan sampai diperoleh dengan cara yang tidak sah, karena makanan yang dihasilkan dari cara seperti itu tidak akan mengenyangkan (baca: membawa sial).

Advokasi adalah pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh beberapa orang atau kelompok, rumitnya persoalan advokasi irigasi memaksa proses ini harus melibatkan banyak pihak

C. Menganyam Kekuatan Advokasi

Kekuatan advokasi adalah unsur penting yang harus diperhitungkan dalam menyusun strategi advokasi. Seperti dijelaskan di depan bahwa advokasi yang dilakukan untuk perubahan masyarakat adalah kerja besar yang membutuhkan komitmen lebih dari para pihak yang menjadi sekutu petani. Dalam advokasi irigasi dikenal dalil menang-kalah bukan benar salah, meskipun untuk mendapat kemenangan kerja advokasi harus dilakukan dengan strategi atau cara-cara yang benar, termasuk bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan advokasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku advokasi harus mengenali betul kekuatan pendorong yang menghendaki perubahan dalam advokasi irigasi.

Menyusun kekuatan advokasi adalah proses menghitung, mengidentifikasi, serta meyakinkan kekuatan pelaku dan sekutu. Proses ini biasanya dilakukan dengan melakukan pemetaan pelaku-korban krisis irigasi, mobilisasi keuangan, konsolidasi unsur pelaku advokasi dan sekutu. Tentu saja pekerjaan menyusun kekuatan bukan tahap yang mudah untuk dilalui oleh setiap pelaku

advokasi. Karena begitu rumitnya, biasanya pekerjaan ini dilakukan dengan melibatkan peran pendamping dan pertimbangan yang cermat.

Proses menghitung dan mengidentifikasi bisa jadi merupakan tahapan yang riskan dilakukan di tengah konflik sosial petani, sebab hal tersebut bisa diartikan sebagai bentuk kecurigaan satu pihak kepada pihak lainnya. Karena itu, tahap menghitung dan mengidentifikasi bukan hanya harus dilakukan dengan hati-hati, tetapi juga harus didahului dengan tindakan membangun pemahaman yang sama tentang advokasi dan perubahan yang akan dilakukan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini.

Aksi massa ke tempat dan simbol kekuasaan adalah salah satu alat untuk kampanye dan komunikasi persoalan irigasi

Proses menghitung dan mengidentifikasi bukan hanya bersifat kuantitatif, juga pertimbangan kualitatif seperti:

1. Berapa organisasi petani atau kelompok tani yang terlibat
2. Berapa kelompok ahli yang mendampingi dan pada tahap yang mana
3. Berapa besar dana yang dibutuhkan dan dari mana dana tersebut diperoleh
4. Bagaimana respon pemerintah dan DPRD terhadap proses ini
5. Ada atau tidak sumber daya yang mempunyai keahlian khusus seperti penelitian, dokumentasi, menulis, lobby, negosiasi, dan pengorganisasian
6. Berapa besar potensi perlawanan pihak yang merasa dirugikan oleh aktivitas advokasi ini
7. Ada atau tidak potensi keterlibatan tentara dan preman untuk menghalangi proses advokasi
8. Berapa besar potensi pengkhianatan dalam barisan pelaku advokasi
9. Ada atau tidak keterlibatan kelompok strategis seperti pers, mahasiswa, LSM, dan lain-lain
10. Jika ada keterlibatan donor, berapa besar pengaruh donor dalam menentukan arah advokasi dan untuk kepentingan apa
11. Lebih penting dari semua yang ditulis di atas adalah mengenali motivasi pihak-pihak selain petani untuk terlibat dalam proses advokasi

Meyakinkan pelaku advokasi adalah pekerjaan yang tidak mudah dilakukan, pendeknya pekerjaan ini merupakan tahap menganyam kekuatan perubahan ditengah konflik irigasi. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara mengkomunikasikan hasil penelitian, analisis sosial, pemetaan pelaku, atau apa pun yang dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam kerja besar advokasi irigasi. Pada dasarnya kekuatan komunikasi dan pemahaman yang sama di antara pelaku perubahan merupakan simpul pengikat untuk melakukan perubahan, disamping upaya-upaya serius membangun kepercayaan dalam antarpelaku perubahan.

Komunikasi dan pemahaman yang sama di antara pelaku perubahan merupakan simpul pengikat untuk melakukan perubahan

Gambar 6.
Aksi massa ke tempat dan simbol kekuasaan adalah salah satu alat kampanye.

Penting untuk diperhatikan dalam tahap komunikasi adalah kepekaan memilih alat sebagai medianya. Mengkomunikasikan sejumlah informasi berkaitan dengan upaya perubahan adalah sama dengan kampanye partai politik atau iklan suatu produk kecantikan. Berkaitan dengan hal itu, penting juga untuk memperhatikan kelompok sasaran dan format komunikasi. Penting untuk dicatat bahwa aksi massa ke tempat dan simbol kekuasaan adalah salah satu alat untuk kampanye dan komunikasi persoalan tentang irigasi.

Aksi massa bukan saja akan menarik perhatian media massa dan khalayak tapi juga mempunyai dampak psikologis pada pemegang kekuasaan. Meskipun begitu alat konsolidasi dalam rangka menganyam kekuatan untuk perubahan tidak hanya aksi massa, bekerja sama dengan media massa dan membangun jaringan persekutuan juga alat yang efektif untuk menjadi mesin pendorong perubahan yang akan dicapai.

D. Menguji (Nalar) Strategi Advokasi

Dalam semua advokasi, strategi adalah tahapan yang paling menarik untuk diperdebatkan, tidak terkecuali strategi advokasi. Strategi advokasi merupakan pilihan sekaligus perkiraan terhadap situasi yang dicita-citakan, karena itu strategi advokasi adalah semua yang terlintas dalam pikiran pelaku advokasi yang mengandaikan penyelesaian persoalan. Strategi advokasi bisa sangat banyak, bahkan mungkin lebih banyak dari persoalan yang akan diselesaikan. Dalam konteks advokasi irigasi, menentukan strategi harus melewati apa yang disebut dengan tahap pengujian nalar strategi.

Strategi advokasi merupakan pilihan sekaligus perkiraan terhadap situasi yang dicita-citakan, karena itu strategi advokasi adalah semua yang terlintas dalam pikiran pelaku

Menguji nalar advokasi bertujuan untuk melihat tingkat rasionalitas dan visibilitas strategi, sebab strategi advokasi adalah bagian dari usaha untuk melakukan perubahan dan penyelesaian masalah. Dalam gerakan perubahan, strategi biasanya dibagi menjadi dua istilah besar yaitu bekerja sama (kompromi) atau menolak kerja sama (tidak kompromi) dengan pihak lawan. Dalam konteks advokasi irigasi, dua istilah besar tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk yang berbeda, karena persoalan irigasi melulu berdimensi ganda yaitu konflik vertikal dan horisontal.

Strategi advokasi irigasi tentu harus merujuk pada prioritas persoalan yang akan diselesaikan dan tidak tergesa-gesa menentukan siapa atau apa yang dianggap sebagai musuh bersama perubahan. Beberapa tawaran strategi

yang biasanya berkembang dalam perdebatan para pelaku advokasi irigasi antara lain:

1. Melakukan reboisasi hutan tangkapan air dan resapan sungai. Reboisasi hutan dipandang strategis karena berkaitan dengan sumber air. Tidak ada artinya fisik jaringan irigasi yang baik, sistem pengelolaan yang bertanggung jawab dan partisipatif, dan organisasi petani pemakai air yang progresif jika hutan tangkapan air dan area resapan sungai gundul.

Penguatan organisasi petani merupakan alat konsolidasi dan mobilisasi petani dalam rangka mendesakkan aspirasi mereka untuk perubahan pengelolaan irigasi

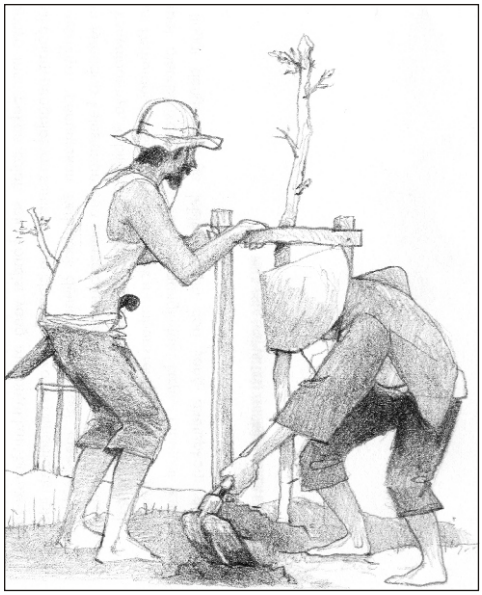

Gambar 7.
Reboisasi hutan sebagai point penting pengelolaan irigasi.

2. Melakukan perubahan kebijakan pengelolaan irigasi. Strategi ini dibangun dengan asumsi bahwa selama ini kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya air tidak pernah berpihak kepada petani, padahal petani adalah pihak yang paling dirugikan jika kebijakan pemerintah tidak berpihak pada kepentingan petani. Perubahan

kebijakan ini biasanya disederhanakan oleh pemerintah menjadi penambahan anggaran perbaikan fisik irigasi.

3. Melakukan perubahan pada sistem pengelolaan irigasi. Pengelolaan irigasi selama ini dilakukan dengan cara tidak partisipatif dan cenderung tertutup, sehingga petani dan masyarakat umumnya tidak mempunyai tempat untuk ikut mengawasi kebijakan pihak pengelola (pemerintah).
4. Melakukan perbaikan fisik jaringan dan melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan. Kurangnya air yang masuk ke petak sawah petani disebabkan oleh fisik irigasi yang rusak dan berakibat pada banyaknya air yang terbuang atau tidak dapat masuk ke jaringan. Melengkapi sarana pendukung untuk operasi dan pemeliharaan juga hal yang dianggap penting dalam rangka menjamin pelayanan distribusi air kepada petani.
5. Menentukan sanksi pada semua bentuk pelanggaran. Sanksi ini dianggap penting untuk mencegah pelanggaran dan bentuk tindakan yang menjadikan pelayanan distribusi terganggu. Bentuk pelanggaran tersebut seperti penambangan batu dan pasir di sungai, pencemaran oleh limbah pabrik, pencurian air, praktik jual-beli air irigasi, dan lain-lain.
6. Melakukan penguatan organisasi petani pemakai air. Gagasan ini yang biasanya lebih banyak muncul dalam perdebatan strategi advokasi irigasi, karena organisasi petani yang lemah tidak mungkin mampu melakukan kontrol terhadap kebijakan dan pengelolaan irigasi. Penguatan organisasi petani juga penting untuk alat konsolidasi dan mobilisasi petani dalam rangka mendesakkan aspirasi mereka untuk perubahan pengelolaan.
7. Mengampanyekan alih komoditas atau diversifikasi pertanian. Strategi ini muncul dengan pertimbangan adanya kelangkaan air yang dihadapi oleh petani. Karena itu, dengan mendorong alih komoditas kepada petani, mungkin akan dapat mengurangi ketergantungan petani dan pertanian terhadap air, terutama tanaman yang banyak membutuhkan air seperti padi. Alih komoditas dapat membantu keberlanjutan pertanian dan menghindari puso pada tanaman padi yang terjadi setiap tahun.

Beberapa gagasan yang sering muncul dalam perdebatan untuk menentukan strategi advokasi seperti yang disebut di atas harus diukur dengan nalar dan bentuk capaiannya, sebab banyak gagasan perubahan yang justru menjadi persoalan baru bagi perubahan yang akan dicapai. Misalnya, bagaimana bahayanya strategi alih komoditas pertanian untuk kelangsungan hidup petani dan ekosistem alam.

Paling tidak, ada tiga hal yang membuat strategi alih komoditas pertanian untuk penyelesaian krisis air sangat buruk akibatnya bagi petani dan alam:

Semakin tinggi kebutuhan petani akan air, semakin canggih juga kemampuan mereka mengelola dan memelihara sumber air

Pertama, alih komoditas hanya akan menggerus kemampuan petani dalam mengelola air. Misalnya, alih komoditas ke palawija, air yang dibutuhkan dalam mengelola komoditas palawija relatif kecil dibanding dengan komoditas padi. Jika menanam palawija menjadi tradisi petani dan dianggap dapat menjadi pengganti padi, petani dengan begitu saja akan meninggalkan tradisi mengelola air. Kemampuan petani dalam mengelola air irigasi sangat berkaitan dengan kebutuhan mereka untuk bercocok tanam, terutama komoditas padi. Semakin tinggi kebutuhan petani akan air, semakin canggih juga kemampuan mereka mengelola dan memelihara sumber air. Artinya, jika petani tidak lagi membutuhkan air untuk bercocok tanam, bukan kemampuan mengelola saja yang mungkin hilang, tetapi juga segala macam nilai tradisi-sosial-ritual yang berkaitan dengan air dan irigasi akan hilang.

Kedua, alih komoditas hanya akan memutus hubungan petani dengan hutan dan sumber air. Alih komoditas dari tanaman yang membutuhkan air relatif banyak seperti padi ke palawija yang relatif sedikit membutuhkan air akan mendorong petani untuk tidak peduli terhadap kelestarian hutan, sebab akan muncul keyakinan di kalangan petani bahwa tanpa hutan yang dapat menjadi area resapan air, petani tetap dapat bercocok tanam. Jika palawija sudah menjadi "pelarian" petani yang tengah kekurangan air, maka bukan tidak mungkin hutan penyangga sungai akan habis. Sebab selama ini yang tetap

memiliki kesadaran tentang kelestarian hutan di samping petani hutan adalah petani yang membutuhkan kelestarian air untuk pertanian mereka.

Ketiga, alih komoditas hanya akan mendorong petani tergantung pada pasar beras. Jika kebutuhan makanan pokok (baca: beras) petani tidak tercukupi dari hasil panen sendiri, mereka akan mendapatkan beras dari pasar. Dalam konteks ini, petani terpaksa harus berhadapan dengan pasar untuk memperoleh kebutuhan pokok, padahal daya belinya sangat rendah dan harga kebutuhan pokok yang tidak pernah berpihak kepada petani. Dilema ini hanya akan terjawab jika petani dapat menanam padi untuk mencukupi kebutuhan sendiri.

Advokasi irigasi menempatkan strategi membangun solidaritas petani sebagai strategi basis dan menempatkan upaya membangun pengorganisasian petani, penguatan (kapasitas) petani, dan perubahan kebijakan pengelolaan irigasi sebagai strategi bangunan atas advokasi

Dalam konteks tersebut, dilema alih komoditas bagi petani sawah memang tidak dapat dihindari. Penolakan praktik alih komoditas dengan mengajukan beberapa alasan tersebut hanya mungkin jika air (irigasi) masih dapat diharapkan masuk ke petak sawah petani. Penolakan terhadap tawaran alih komoditas dapat bergeser menjadi upaya pemiskinan petani secara sistematis jika air tidak mungkin masuk ke sawah petani. Bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan kelangkaan air jika alih komoditas menjadi alternatif bagi petani, karena tawaran alih komoditas juga harus dapat menghindarkan petani dari dampak yang mungkin lebih buruk.

Perdebatan tentang strategi advokasi yang berkepanjangan seperti di atas menjadi tidak produktif di dalam konteks advokasi irigasi. Persoalan irigasi memang terlalu banyak dan rumit untuk dapat diselesaikan oleh beberapa pihak saja, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa petani berada dalam situasi yang tidak solid. Sebagai alat untuk mencapai tujuan perubahan, tentu saja strategi advokasi tidak boleh menimbulkan persoalan baru yang hanya akan memperburuk situasi sosial-ekonomi-politik petani.

Merujuk pada beberapa pertimbangan di atas, pilihan yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurangi dampak krisis air di atas adalah dengan membagi penyelesaian konflik menjadi dua tahapan. *Pertama,* melakukan upaya untuk mengurangi konflik sosial petani yang berpotensi melebar dan bernuansa etnis-kewilayahan. *Kedua*, melakukan upaya (agenda aksi) untuk membangun basis organisasi, penguatan (kapasitas) petani, dan gerakan mengubah kebijakan. Strategi ini yang disebut sebagai strategi advokasi komunal.

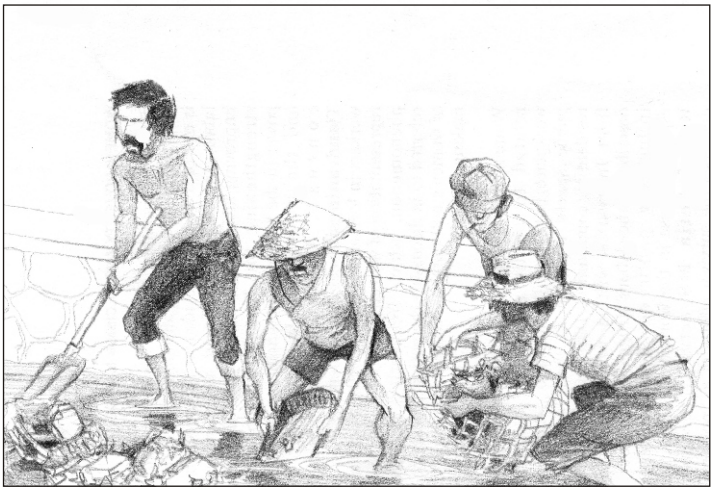

Gambar 8. Membangun solidaritas petani sebagai strategi basis advokasi.

Upaya untuk menganyam solidaritas petani diyakini sebagai basis (*starting point*) advokasi, dengan asumsi bahwa solidaritas yang kuat di tingkat petani (paling tidak) akan membantu membangun kepercayaan dan mengurangi kecurigaan yang sebelumnya ada. Fakta bahwa krisis air irigasi menyeret masyarakat petani pada konflik sosial yang berpotensi konflik etnis menempatkan strategi membangun solidaritas petani sebagai **strategi basis advokasi**. Fakta bahwa persoalan irigasi adalah akumulasi dan kompleksitas dari gagalnya pembangunan (pertanian) yang berimplikasi pada aspek sosial-ekonomi-politik masyarakat petani menempatkan upaya membangun

pengorganisasian petani, penguatan (kapasitas) petani, dan perubahan kebijakan pengelolaan irigasi sebagai **strategi bangunan atas advokasi** [8].

[8] Lihat pengertian strategi basis dan bangunan atas advokasi di halaman sebelumnya.

Kopi Ke-4

Putaran Diskusi

1. Nalar

Dalam advokasi irigasi, membangun solidaritas petani adalah agenda utama menuju perubahan

Putaran diskusi adalah upaya yang dilakukan pelaku advokasi untuk melibatkan semua pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan krisis irigasi dalam rangka mendiskusikan persoalan krisis berdasarkan analisis sosial irigasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari eskalasi konflik di tingkat petani karena kurangnya informasi tentang kelangkaan air yang diperoleh oleh pihak-pihak tersebut. Dalam konteks konflik sosial irigasi, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam tahap putaran diskusi ini:

Gambar 9.
Putaran diskusi untuk melibatkan semua pihak terkait.

Pertama, putaran diskusi ini dapat menjadi jalan masuk (*entry point*) bagi terbangunnya kembali solidaritas yang sempat retak di kalangan petani akibat krisis air irigasi.

Kedua, putaran diskusi dapat menjadi media untuk mempertemukan petani lintaswilayah dan lintasetnik dalam rangka membicarakan dan mencari solusi bersama atas persoalan irigasi.

Ketiga, putaran diskusi ini dapat ditujukan untuk membangun pemahaman yang sama atas persoalan irigasi dan mencari penyelasaian yang adil bagi semua korban dan pelaku.

Pesimisme dan trauma petani terhadap macam-macam praktik program dari pemerintah menjadikan mereka bersikap ekstra hati-hati dalam melihat berbagai pertemuan yang difasilitasi pihak luar

Keempat, putaran diskusi ini juga dapat dijadikan media untuk menggali perkembangan mutakhir konflik irigasi sekaligus menjadi alat konfirmasi atas pemahaman dan bangunan pengetahuan yang telah dibuat dalam analisis sosial.

Kelima, putaran diskusi dapat dijadikan alat untuk memperkaya strategi penyelesaian krisis irigasi dari pihak-pihak di luar petani.

2. Tahapan

Putaran diskusi dalam konteks advokasi irigasi bukan pekerjaan yang mudah seperti halnya mempersiapkan tahapan forum diskusi. Mempersiapkan putaran diskusi advokasi irigasi yang dibayangi oleh konflik sosial petani membutuhkan kepekaan untuk menghindari perluasan (eskalasi) konflik. Petani korban lebih sensitif terhadap pihak lain, terutama pihak yang dianggap asing oleh mereka. Pesimisme dan trauma petani terhadap macam-macam praktik program dari pemerintah menjadikan mereka bersikap ekstra hati-hati dalam melihat pertemuan seperti putaran diskusi.

Tahapan yang perlu dipersiapkan oleh pelaku advokasi untuk putaran diskusi antara lain:

Pertama, pelaku advokasi telah melakukan finalisasi hasil analisis sosial untuk dipresentasikan dalam diskusi.

Kedua, pelaku advokasi harus menentukan relawan dari kalangan petani yang terlibat dalam analisis sosial untuk mempresentasikan materi dalam diskusi.

Ketiga, pelaku advokasi harus menentukan relawan dari kalangan petani (seandainya ada) untuk menjadi fasilitator dan penyusun notulen dalam forum diskusi.

Keempat. Pelaku advokasi harus menentukan secara cermat pihak mana yang akan diundang.

Kelima, pelaku advokasi harus memastikan persiapan sarana dan prasarana diskusi.

Selain memperhatikan aspek petani sebagai relawan untuk menjadi presenter, fasilitator, dan penyusun notulen, pelaku advokasi juga harus mempertimbangkan aspek pemberdayaan dalam putaran diskusi. Putaran diskusi harus menjadi media belajar bagi petani. Karena itu, pada setiap putaran diskusi petani relawan yang menjadi fasilitator, presenter, dan penyusun notulen harus diganti dengan relawan baru dari petani. Dengan demikian, banyak petani yang dapat belajar untuk berani dan cakap berbicara di depan umum.

3. Metode

Beberapa fakta menunjukkan bahwa konflik air yang terjadi di lingkungan petani sulit dicegah untuk tidak bergeser ke konflik sosial. Hal ini terjadi karena putusnya komunikasi, baik di antara petani itu sendiri, petani dengan pengelola irigasi (pemerintah daerah), maupun petani dengan organisasi pemakai air (P3A). Putaran diskusi bermaksud memfasilitasi para pelaku untuk membicarakan dan mengkomunikasikan semua persoalan air yang dihadapi.

Jangan sampai diskusi yang semula dimaksudkan untuk menganyam solidaritas petani antar wilayah berubah menjadi medan "pertempuran"

Putaran diskusi jangan sampai berpretensi untuk mengumpulkan semua pihak dalam satu forum, karena hal itu terlalu berisiko. Jalan tengah yang dapat diambil untuk menghindari risiko adalah dengan mengelompokkan mereka berdasarkan peranannya dalam proses pengelolaan maupun korban pengelolaan. Meskipun putaran diskusi melibatkan banyak pihak baik yang diidentifikasi sebagai korban, seperti petani, maupun sebagai pelaku.

Beberapa pengelompokan yang dapat ditawarkan antara lain membagi kelompok tani menjadi tiga wilayah jaringan irigasi (hilir, tengah, dan hulu) dalam tiga sesi diskusi, P3A desa tiga wilayah jaringan irigasi (hilir, tengah, dan hulu) dalam tiga sesi diskusi, P3A Gabungan tiga wilayah jaringan irigasi (hilir, tengah, dan hulu) dalam satu sesi diskusi. Sementara dinas pemerintah daerah dalam satu sesi sendiri bersama kepala ranting dinas pengairan (KCD), kepala ranting dinas pertanian, camat, dan kepala kampung.

Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memfokuskan pembahasan dan memotret perspektif yang berbeda dari berbagai pihak. Cara membaca petani terhadap realitas irigasi akan berbeda dengan cara membaca pihak pemerintah daerah. Karena itu, untuk tahap awal putaran diskusi ini, pelaku advokasi tidak perlu berpretensi untuk menghadirkan mereka dalam satu forum.

Pembagian wilayah hulu, tengah, dan hilir yang kemudian dijadikan perwakilan dalam setiap putaran diskusi merupakan representasi jaringan irigasi, karena pembagian tersebut dimaksudkan dapat mewakili persoalan air petani di setiap wilayah. Yang lebih penting dari metode pembagian wilayah ini adalah representasi etnis dan persoalan menjadi terwakili.

Setiap tahapan diskusi ini selalu melibatkan kelompok tiga wilayah jaringan. Hal ini dimaksudkan untuk memotret persoalan air secara utuh. Persoalan yang berkembang di setiap wilayah irigasi adalah memang kekurangan air, tetapi asumsi yang berkembang di masyarakat setiap wilayah terhadap akar masalah irigasi cenderung berbeda. Hal ini yang menimbulkan krisis air cenderung berubah menjadi konflik yang berdimensi etnis dan kewilayahan. Kecermatan membaca perubahan sosial menjadi sangat penting dalam konteks ini. Bisa jadi forum diskusi yang semula dimaksudkan untuk menganyam solidaritas petani antarwilayah berubah menjadi medan pertempuran baru bagi mereka.

Diskusi kecil irigasi diharapkan menjadi media belajar dan mencari solusi yang realistis

Selain presentasi hasil analisis kebijakan dan analisis sosial, diskusi ini juga menggunakan media diskusi kecil. Para peserta dibagi ke dalam tiga kelompok kecil, masing-masing kelompok membahas satu persoalan (misalnya persoalan kebijakan, kerusakan fisik irigasi, atau kelembagaan P3A). Diskusi kecil ini diharapkan menjadi media belajar peserta diskusi dalam merumuskan masalah (lihat matriks masalah) dan mencari solusi yang rasional (realistis) untuk menyelesaikan konflik. Hasil diskusi kecil ini dibawa ke "ruang pleno" untuk didiskusikan dengan kelompok lain.

Contoh 1. Matriks Masalah

No	Kategori Masalah	Sebab	Akibat	Solusi
1	Pengelolaan			
2	Kebijakan			
3	Pelanggaran			
4	P3A			

4. Evaluasi

Evaluasi adalah satu tahapan penting dalam putaran diskusi. Tahap ini harus dilakukan oleh pelaku advokasi pada setiap putaran diskusi untuk melihat perkembangan dan capaian tujuan dalam proses tersebut. Ada tiga hal yang dapat dievaluasi: *pertama*, evaluasi untuk melihat respons partisipan putaran diskusi. *Kedua*, evaluasi untuk melihat capaian tujuan putaran diskusi. *Ketiga*, evaluasi tentang teknis penyelenggaraan diskusi.

Menurut petani, pemerintah tidak mempunyai niat baik dan cenderung "mendikte" P3A

Khusus untuk melihat capaian, evaluasi tersebut dapat dimulai dengan melihat kembali tujuan putaran diskusi (lihat dalam tahapan "nalar" putaran diskusi). Hal ini dapat dilakukan dengan membuat matriks capaian berdasarkan kategori tujuan, misalnya :

Contoh 2. Matriks Capaian

No	Kategori Capaian	Tingkat Keberhasilan	Tingkat Kegagalan	Penjelasan (kenapa)
1	Sebagai alat untuk membangun solidaritas petani			
2	Sebagai alat Konsolidasi Advokasi			
3	Sebagai alat sosialisasi dan konfirmasi			
4	Sebagai alat untuk membangun pemahaman			
5	Sebagai alat untuk pemetaan			

Dalam beberapa kasus, evaluasi juga dapat melihat persepsi petani yang berbeda dari persepsi petani yang diperoleh lewat wawancara dalam analisis sosial. Dalam kasus putaran diskusi yang dilakukan di jaringan irigasi Way

Seputih dengan partisipan petani, misalnya, mereka relatif berani mengeluarkan pendapat dengan keras dibanding pada saat wawancara dalam analisis sosial. Dalam kasus Petani Way Seputih yang sempat terekam dari diskusi itu, antara lain :

Pertama, persoalan irigasi yang berkembang menjadi konflik di masyarakat petani Way Seputih adalah akibat buruknya kinerja pengurus P3A Gabungan dan pengelola (baca: pemerintah).

Kedua, P3A gabungan adalah "boneka" pengairan (baca: Kimpraswil Lampung Tengah). Hal ini terbukti dengan praktik pertanggungjawaban keuangan gabungan P3A yang selalu ditujukan kepada Kimpraswil, bukan kepada petani.

Ketiga, pemerintah tidak mempunyai niat baik dan cenderung "mendikte" P3A gabungan dengan cara tidak segera mengeluarkan SK pengangkatan ketua dan wakil ketua gabungan P3A jaringan irigasi Way Seputih, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan.

Keempat, pengurus dinilai tidak mampu merumuskan visi dan misi dalam AD/ART, buktinya AD/ART yang sangat dibutuhkan lembaga belum jadi.

Kasus putaran diskusi yang dilakukan dengan partisipan petani di atas menunjukkan bahwa sebagai alat, putaran diskusi bukan saja berfungsi untuk tujuan seperti yang disebut di atas, tetapi juga dapat dijadikan media untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan, paling tidak pengelola di tingkat organisasi petani seperti P3A. Yang perlu diperhatikan dalam konteks advokasi irigasi adalah jangan sampai menjadikan putaran diskusi menjadi media untuk mengadili pihak lain, sebab hal itu hanya akan menjadi persoalan baru dalam konsolidasi petani.

Kopi Ke-5

Analisis Pascadiskusi

1. Nalar

Analisis mempunyai tempat istimewa dalam strategi advokasi irigasi

Analisis ini menekankan dua hal, pertama berkaitan dengan fasilitasi putaran diskusi dan kedua berkaitan dengan perkembangan informasi maupun tawaran solusi dari berbagai partisipan diskusi. Penekanan terhadap kedua hal tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi secara total putaran diskusi baik yang berkaitan dengan proses diskusi maupun dengan perkembangan isu irigasi.

Analisis isu diskusi berkaitan dengan materi rekomendasi untuk melakukan tahapan advokasi berikutnya, misalnya *workshop* irigasi. Karena itu, analisis tersebut mempunyai tempat istimewa dalam strategi advokasi. Perkembangan isu, kebijakan, konflik sosial, kasus kekeringan, dan lain-lain diharapkan akan terekam semua dalam putaran diskusi, sehingga penting bagi pelaku advokasi untuk melakukan analisis ini.

2. Tahapan

Pertama-tama yang perlu dipersiapkan oleh pelaku advokasi dalam tahap analisis isu putaran diskusi adalah :

Pertama, menginventarisasi semua catatan proses, notulensi, kertas kerja, kebijakan (pusat atau daerah) yang berkaitan dengan irigasi dan transkrip rekaman untuk menjadi materi analisis.

Kedua, menulis semua dokumentasi yang disebut di atas dalam bentuk kertas kerja atau apa pun yang dapat dimengerti oleh petani dan partisipan lainnya dalam analisis itu.

Ketiga, menentukan perwakilan partisipan yang akan terlibat dalam analisis, karena tidak mungkin melibatkan semua partisipan putaran diskusi.

Gambar 10. Menyusun seluruh dokumen untuk penyusunan materi advokasi.

Keempat, mencari pendamping yang mempunyai keahlian khusus seperti analisis kebijakan atau lainnya jika dianggap perlu.

Kelima, menentukan desain dan metode analisis yang sederhana supaya petani dapat memahaminya dengan baik, misalnya membuat matriks masalah.

Keenam, membagikan materi analisis minimal tiga hari sebelum hari "H".

3. Metode

Metode yang dipakai dalam analisis ini bisanya sangat sederhana, misalnya FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan petani, pengurus organisasi petani, pendamping petani (LSM) jika ada, serta kelompok strategis seperti mahasiswa, peneliti, ahli hukum, atau jika perlu pers. Keterlibatan pers dalam analisis pascaputaran diskusi selain menjadi bagian dari proses, juga untuk kepentingan publikasi.

Metode ini dibuat supaya lebih banyak menguntungkan petani yang terlibat dalam analisis, karena mereka tidak harus "mengerutkan dahi" dalam memikirkan ulang gagasan yang pernah muncul dalam forum-forum putaran diskusi, bahkan jika dapat tidak perlu ada perdebatan yang baru tentang hal-hal yang sudah muncul dalam putaran diskusi. Metode analisis yang mudah, seperti penggunaan matriks pelaku, juga akan membantu petani terlibat secara aktif dalam analisis ini. Yang harus dihindari dalam proses ini adalah dominasi dari pihak di luar petani seperti kelompok ahli dan pendamping petani.

Petani tidak perlu mengerutkan dahi dalam melakukan analisis persoalan irigasi

Contoh 3. Matriks Pelaku

No	Pelaku	Gagasan	Nalar	Motif
1	Petani			
2	P3A Kampung			
3	P3A Gabungan			
4	Kepala Desa			
5	Camat			
6	KCD Pengairan			
7	KCD Pertanian			
8	Dinas Kimpraswil			
9	Dishutbun			
10	Dinas Pertanian			
11	Unsur lain			

Persoalan krisis irigasi tidak dapat diselesaikan hanya oleh beberapa pihak dan dalam jangka pendek

4. Rekomendasi

Rekomendasi adalah hasil akhir dari analisis pascadiskusi. Rekomendasi ini penting untuk menentukan agenda advokasi selanjutnya. Seperti dijelaskan di depan, putaran diskusi sangat penting untuk memotret perkembangan isu dan aspirasi yang berkembang di masyarakat petani maupun pelaku lainya. Dalam analisis pascadiskusi yang dilakukan oleh petani Way Seputih, misalnya, ditemukan indikasi adanya kesadaran bersama para pihak yang terlibat dalam diskusi, baik petani maupun dinas-dinas pemerintah, bahwa persoalan krisis irigasi tidak dapat diselesaikan hanya oleh beberapa pihak dan dalam jangka pendek. Penyelesaian krisis air ini harus melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu yang relatif lama; hal ini tentunya merupakan sesuatu yang penting untuk proses advokasi selanjutnya.

Beberapa masalah besar yang mucul dalam analisis pascadiskusi biasanya berkaitan dengan posisi petani dalam pengelolaan irigasi, persoalan kebijakan yang tidak berpihak, P3A yang tidak akuntabel, dan lain-lain. Misalnya, isu

yang banyak dan sempat berkembang dalam analisis pascaputaran diskusi yang dilakukan oleh petani Way Seputih antara lain :

Pertama, persoalan irigasi merupakan persoalan sistem pengelolaan sebagai turunan kebijakan pengelolaan yang berpusat pada pemerintah. Kebijakan negara ini di samping gagal dikomunikasikan pada masyarakat petani, juga secara substansial tidak begitu menguntungkan petani. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengambilan keputusan pengelolaan yang sentralistik (*state-based irigation management*) dan memotong akses petani.

Kedua, lemahnya lembaga P3A baik secara organisatoris maupun pada saat berhadapan dengan institusi pemerintah. Hal ini ditengarai akibat intervensi dinas pemerintah (Kimpraswil) baik secara kelembagaan maupun secara pribadi terhadap pengurus P3A.

Dalam keyakinan petani, kompleksitas persoalan irigasi tidak mungkin dapat diatasi tanpa ada legitimasi yuridis dari negara

Ketiga, lemahnya kapasitas pengurus P3A. Hal ini nampak dalam kinerja dan tingkat koordinasi di semua tingkatan. Beberapa P3A desa tidak melegitimasi keberadaan gabungan P3A karena rendahnya akuntabilitas lembaga tersebut terhadap petani. Gabungan P3A dinilai lebih bertanggung jawab kepada dinas pemerintah dari pada kepada petani. Pengelolaan anggaran yang dipercayakan kepada gabungan P3A kenyataannya tidak berjalan secara baik, bahkan ada indikasi penggelapan anggaran.

Keempat, lemahnya posisi petani baik dalam pengambilan keputusan pengelolaan maupun akses terhadap air irigasi. Petani hanya wajib membayar iuran setiap tahun (Ipair), tetapi tidak mempunyai hak untuk mengetahui realisasi iuran tersebut. Akses petani atas air juga dapat dibilang "setengah hati", hal ini terbukti tidak semua petani yang telah membayar iuran air mendapat jatah air. Beberapa desa yang sering tidak mendapatkan jatah air telah beberapa tahun terakhir ini tidak membayar iuran sebagai sikap protes atas keadaan tersebut.

Kelima, terbitnya kebijakan baru tentang Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) memberi harapan baru bagi petani untuk ikut berpartisipasi, bahkan mengelola irigasi sendiri tanpa harus diatur pihak lain yang banyak merugikan daripada menguntungkan petani. Di mata petani, kebijakan ini dapat menjadi "pintu masuk" memperbaiki persoalan irigasi. Dalam keyakinan petani, kompleksitas persoalan irigasi tidak mungkin dapat diatasi tanpa ada legitimasi yuridis dari negara.

Berkaitan dengan isu yang berkembang dalam analisis tersebut, forum analisis merekomendasikan kepada pelaku advokasi untuk menyelenggarakan *workshop* irigasi dengan beberapa fokus isu : *pertama*, tentang kebijakan penyerahan pengelolaan irigasi kepada petani; *kedua*, strategi reorganisasi P3A di setiap tingkatan; *ketiga*, inisiasi penguatan P3A; *keempat*, penguatan petani di tingkat kelompok tani.

Kopi Ke-6

Workshop Irigasi

1. Nalar

Mengapa harus *workshop* irigasi, mengapa tidak memilih agenda lain yang berkaitan langsung dengan pengelolaan irigasi, kebijakan irigasi, atau langsung melakukan aksi penguatan petani. Apakah analisis sosial, putaran diskusi, dan analisis pascadiskusi kurang memadai untuk menjadi dasar melakukan agenda aksi. *Workshop* irigasi bukan dilakukan untuk tujuan "melarikan diri" dari kompleksitas persoalan irigasi yang sedang diderita petani, *workshop* irigasi adalah jalan masuk untuk mendorong agenda aksi.

Workshop irigasi bukan dilakukan untuk tujuan "melarikan diri" dari kompleksitas persoalan irigasi yang sedang diderita petani, workshop irigasi adalah jalan masuk untuk mendorong agenda aksi

Seperti disebut sebelumnya, persoalan irigasi merupakan kompleksitas permasalahan yang berdimensi sosial, ekonomi, dan politik dengan melibatkan unsur pemerintah, petani, maupun organisasi petani. *Workshop* ini adalah usaha mempertemukan para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam krisis air tersebut. *Workshop* irigasi bertujuan untuk membangun solusi krisis irigasi dan konflik sosial dengan melibatkan secara langsung lebih banyak korban dan pelaku. *Workshop* tersebut diharapkan mampu merumuskan agenda aksi yang mempunyai tingkat kemungkinan yang tinggi untuk dapat dilakukan oleh pelaku advokasi, terutama petani dan sekutunya.

Partisipan yang dilibatkan dalam *workshop* irigasi sebaiknya meliputi para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung masuk dalam krisis dan konflik irigasi. Sebagai pihak yang paling dirugikan, sebaiknya petani mendapat tempat istimewa untuk terlibat dalam proses *workshop* tersebut, artinya nasib petani harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh peserta *workshop*. Keterlibatan dan keistimewaan pada petani tersebut tidak perlu dimaknai sebagai usaha yang semata-mata untuk memuaskan kelompok petani, tetapi sebagai upaya untuk mencegah konflik sosial bernuansa etnis yang semakin meluas. Jika perlu, dalam *workshop* itu petani harus ditempatkan sebagai korban dari krisis irigasi yang tengah terjadi.

Istilah krisis irigasi dan konflik irigasi dipakai secara berbeda dalam panduan ini karena dua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda dalam konteks advokasi irigasi. **Krisis irigasi** menunjuk pada praktik salah urus pihak pengelola irigasi dan dinas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan irigasi (dalam hal ini pemerintah). **Konflik irigasi** menunjuk pada kenyataan perebutan sumber daya air antara petani dengan petani akibat salah urus pemerintah terhadap irigasi atau yang dikenal dengan istilah konflik sosial petani.

Seperti yang disebut di atas, strategi advokasi harus memperhitungkan prioritas penyelesaian kasus. Dalam *workshop* irigasi ini pelaku advokasi juga sudah menentukan prioritas isu yang akan diselesaikan, misalnya persoalan hutan, persoalan perbaikan fisik jaringan, persoalan perngelolaan, persoalan pertambangan di bantaran sungai, persoalan penyerahan pengelolaan irigasi, dan lain-lain. Prioritas isu tersebut akan menjadi fokus pembicaraan di sesi khusus dalam *workshop*. Jika beberapa isu yang disebut di depan ternyata bermasalah pada aspek kebijakan, maka pelaku advokasi dapat memasukkan pembahasan *legal draft* dalam sesi *workshop*.

2. Tahapan

Tahapan yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan *workshop* irigasi yang baik, antara lain :

Pertama, pelaku advokasi harus menentukan tujuan dan untuk menjawab apa yang menjadi persoalan sehingga *workshop* irigasi tersebut penting untuk dilakukan.

Kedua, pelaku advokasi harus meyakinkan berbagai pihak bahwa *workshop* irigasi penting dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian krisis dan konflik irigasi.

Workshop harus dirancang untuk menjadi tempat belajar bagi petani dan pihak lain yang terlibat

Ketiga, pelaku advokasi harus menentukan isu dan prioritas kasus yang akan dibicarakan dalam *workshop*.

Keempat, *workshop* harus dirancang untuk menjadi tempat belajar bagi petani dan pihak lain yang terlibat.

Kelima, pelaku advokasi harus membentuk tim (panitia) kecil untuk memfasilitasi *workshop*.

Hal-hal teknis berkaitan dengan penyelenggaraan workshop irigasi, antara lain :

1. Panitia harus menentukan pihak-pihak yang akan diundang dalam workshop
2. Panitia harus menentukan peserta workshop berdasarkan prinsip representasi persoalan, keterwakilan pelaku dan korban, jika ada keterwakilan etnis, dan wilayah jaringan irigasi
3. Panitia harus menentukan narasumber yang relevan dengan isu jika ada sesi khusus presentasi
4. Panitia harus menyiapkan materi workshop seperti makalah, working paper analisis sosial irigasi, draft untuk usulan *legal draft,* naskah akademis jika ada, dan lain-lain
5. Panitia harus memilih relawan untuk menjadi fasilitator, moderator, penyusun notulen, dan *steering committee* jika perlu
6. Panitia harus memilih tempat dan waktu yang representatif untuk workshop
7. Panitia harus meyusun agenda workshop secara rinci dan sistematis
8. Panitia harus mempersiapkan hal-hal lain yang diangap perlu untuk keberhasilan workshop tersebut
9. Panitia harus berusaha memobilisasi dana yang tidak mengikat dan merusak prinsip perubahan untuk terselenggaranya agenda workshop tersebut

Untuk menghindari ketegangan psikologis antarpeserta, panitia harus cermat menempatkan peserta yang mempunyai latar belakang sosial-ekonomi berbeda

3. Metode

Metode dalam *workshop* tidak hanya berkaitan dengan proses acara saja, tetapi juga harus diperhatikan penataan tempat makan, tempat tidur, ruang diskusi, dan tempat rehat. Peserta *workshop* adalah para pihak yang sedang berkonflik, apalagi (mungkin) di antara mereka ada yang belum pernah bertemu dalam satu forum. Untuk menghindari ketegangan psikologis antarpeserta, panitia harus cermat menempatkan peserta yang mempunyai latar belakang sosial-ekonomi berbeda.

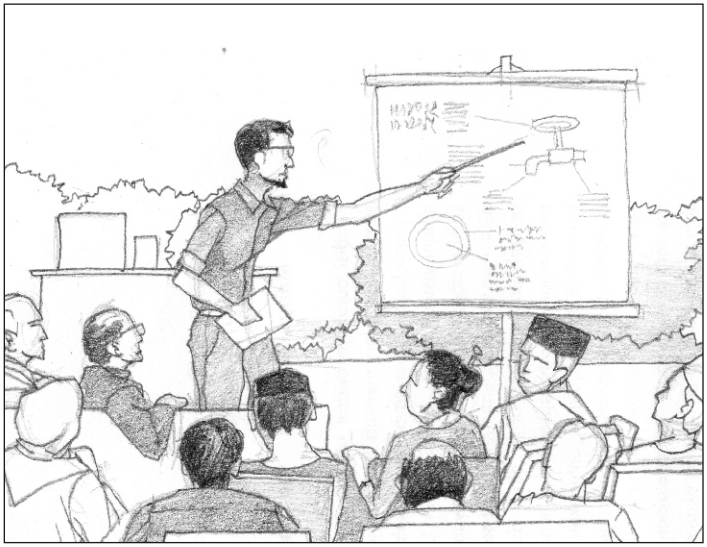

Gambar 11. Workshop mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dan mungkin belum pernah bertemu dalam satu forum.

Dalam keyakinan petani, kompleksitas persoalan irigasi tidak mungkin dapat diatasi tanpa ada legitimasi yuridis dari negara

Sejak awal *workshop* harus dipersiapkan sebagai ruang yang dapat menampung banyak gagasan tanpa harus kehilangan semangat membangun solidaritas. Pembagian tempat tidur, misalnya, panitia harus menempatkan petani, wakil dinas pemerintah, dan LSM dalam satu kamar. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana interaksi antara peserta karena selama ini di antara mereka terjadi konflik karena masalah irigasi. Begitu juga pengaturan ruang makan dan tempat duduk peserta, hal ini harus ditata sedemikian rupa sehingga peserta yang datang dari latar belakang berbeda tersebut tidak membuat "blok" sendiri-sendiri.

Metode lain yang dipakai untuk membangun solidaritas mereka adalah dengan cara membuat komisi (jika diperlukan) yang terdiri atas semua unsur peserta. Misalnya, peserta dibagi dalam tiga komisi dengan tanggung jawab membahas persoalan (misalnya) kebijakan irigasi, reorganisasi P3A, dan

penguatan petani. Masing-masing komisi harus menghasilkan rekomendasi untuk didiskusikan dalam pleno.

Biasanya komisi, kelompok kecil, atau apa pun namanya, dalam *workshop* irigasi perlu untuk membahas secara mendalam isu, kasus, usulan *legal draft* atau apa pun yang tidak mungkin diselesaikan dalam forum besar. Komisi tersebut bertanggung jawab untuk membahas dan merumuskan persolalan tertentu yang dibebankan forum. Komisi harus dibuat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, tingkatan persoalan, heterogenitas etnis, kedinasan, dan lain-lain yang dianggap penting. Meskipun harus mempertimbangkan keterwakilan dalam pembentukan komisi, komisi tidak perlu terlalu "gemuk" untuk menjaga efektivitas kerja.

Meskipun harus mempertimbangkan keterwakilan dalam pembentukan komisi, komisi tidak perlu terlalu "gemuk" untuk menjaga efektifitas kerja.

Secara berurutan mungkin agenda workshop bisa terdiri atas:

1. Seminar sehari tentang isu tertentu yang dipandang perlu dan kebijakan yang melingkupinya
2. Pembahasan materi sidang komisi.
3. Pembentukan komisi
4. Rapat komisi
5. Sidang pleno hasil rapat komisi.
6. Merumuskan hasil sidang komisi dan rekomendasi untuk *press release* (rumusan aksi)
7. Merumuskan rekomendasi untuk rencana tindak lanjut advokasi irigasi
8. Pembentukan kelompok kerja dan delegasi untuk rencana tindak lanjut
9. *Press release*

Sekalipun agenda tersebut telah disusun secara sistematis bukan tidak mungkin dalam praktiknya terdapat "cacat". Cacat tersebut mungkin tidak langsung berkaitan dengan situasi dalam *workshop*, sebab metode *workshop* tersebut bukan saja bermaksud untuk membangun konsolidasi pelaku perubahan dan semua pihak yang terlibat dalam krisis air irigasi, tetapi juga bermaksud untuk

membangun konsolidasi internal petani. Hal ini tentu menjadi capaian yang sangat kompleks dalam satu *workshop*, sekalipun upaya membangun solidaritas di tingkat petani telah dimulai sejak putaran diskusi dilakukan.

Yang harus diwaspadai oleh fasilitator dalam pembentukan kelompok kerja adalah masuknya unsur-unsur yang mungkin tidak mempunyai komitmen terhadap perubahan. Perlu diingat bahwa peserta *workshop* bukan hanya terdiri atas korban krisis irigasi tetapi juga pelaku. Padahal, semua peserta memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota kelompok kerja atau delegasi. Mengingat kelompok kerja dan delegasi adalah tim yang mempunyai fungsi khusus seperti melakukan *press release*, *public hearing*, *lobby*, dan delegasi untuk menyampaikan *legal draft* ke dewan perwakilan (DPRD), maka kelompok kerja harus terdiri atas orang yang mempunyai loyalitas kepada perubahan nasib petani, keahlian berbicara, ketrampilan melakukan lobby, dan keahlian khusus lainnya yang diperlukan seperti hukum dan sistem (teknis) pengelolan irigasi .

Kelompok kerja harus terdiri atas orang yang mempunyai loyalitas kepada perubahan nasib petani, keahlian berbicara, ketrampilan melakukan* lobby*, dan keahlian khusus lainnya yang diperlukan

4. Rekomendasi

Merumuskan rekomendasi *workshop* adalah tahapan penting dalam proses tersebut. Rekomendasi *workshop* adalah dasar rencana tindak lanjut agenda advokasi yang lebih absah, karena rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan pelaku dan korban dalam krisis dan konflik irigasi. Yang perlu diperhatikan dalam perumusan rekomendasi untuk tindak lanjut advokasi irigasi ini adalah :

Pertama, rekomendasi adalah hasil pembahasan khusus komisi dalam *workshop* setelah melalui rapat pleno.

Kedua, rekomendasi harus menunjukkan keberpihakan terhadap petani yang *notabene* sebagai korban krisis dan konflik irigasi.

Ketiga, rekomendasi harus menjawab persoalan petani yang sedang menderita kekurangan air.

Keempat, rekomendasi harus jelas ditujukan kepada siapa dan untuk mengubah apa.

Kelima, rekomendasi merupakan gagasan yang mungkin dilakukan oleh petani, sekutu, dan pendamping petani.

Perlu diwaspadai adalah gagasan yang kelihatannya nalar dan mungkin dilakukan, tetapi tidak menguntungkan dalam konteks advokasi untuk perubahan nasib petani dan bangunan solidaritas petani

Keenam, rekomendasi harus merupakan hasil dari pembahasan yang adil dari kesepakatan para pihak.

Beberapa hal di atas perlu diperhatikan oleh fasilitator *workshop* karena perdebatan dan pembahasan dalam *workshop* sering memunculkan solusi yang tidak berpihak pada petani, bahkan cenderung merugikan. Dalam hal ini yang perlu diwaspadai adalah gagasan yang kelihatannya nalar dan mungkin dilakukan, tetapi tidak menguntungkan dalam konteks advokasi untuk perubahan nasib petani dan bangunan solidaritas petani.

Biasanya gagasan "miring" tersebut muncul dari pihak dinas-dinas pemerintah yang terlibat dalam *workshop*, seperti yang pernah muncul dalam *workshop* irigasi Way Seputih. Mereka mengusulkan gagasan untuk menyelesaikan pesoalan krisis air dengan jalan:

Pertama, membuat peraturan yang berisi larangan untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik jaringan, seperti membuang sampah berat dan memandikan (*ngguyang*) ternak di jaringan irigasi.

Kedua, melakukan reboisasi secara besar-besaran di daerah resapan air dengan pohon yang berumur panjang dan produktif, seperti pohon nangka dan durian.

Ketiga, melakukan pembebasan tanah di daerah resapan yang masih dimiliki oleh petani supaya tidak terjadi penggundulan hutan.

Gagasan itu tidak sempat masuk dalam rekomendasi karena beberapa pihak (terutama petani) sempat mempertanyakan rasionalitasnya. Menurut petani, gagasan tersebut tidak semuanya buruk bagi penyelesaian krisis irigasi tetapi ada beberapa gagasan yang perlu dipertanyakan lebih lanjut seperti:

Gambar 12.
Ada tiga gagasan yang perlu dipertanyakan lebih lanjut.

Pertama, jika gagasan membuat peraturan itu jadi diwujudkan, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan membuat peraturan dan siapa yang menjadi "polisinya".

Kedua, reboisasi pernah dilakukan di hulu irigasi (area resapan), tetapi gagal karena tidak ada pihak yang secara langsung ditunjuk untuk memelihara dan bertanggung-jawab atas proyek tersebut. Dan yang paling penting yang harus diingat dari gagasan itu adalah pihak mana yang akan menjadi donatur (membiayai) proyek reboisasi.

Praktik pembebasan tanah di Indonesia tidak pernah bebas dari konflik. Trauma ini pernah diderita etnis Lampung pada waktu proyek transmigrasi berlangsung

Ketiga, praktik pembebasan tanah di Indonesia tidak pernah bebas dari konflik. Trauma ini pernah diderita etnis Lampung pada waktu proyek transmigrasi berlangsung. Jika proyek pembebasan tanah untuk penghijauan area resapan irigasi ini diwujudkan, pertanyaannya adalah ke mana petani hutan tersebut akan dipindahkan, apakah mereka mau, berapa besar ganti rugi yang dapat diberikan, berapa kerugian sosial-ekonomi dan kultural yang harus mereka tanggung, dan sederet pertanyaan lain yang tidak terjawab.

Karena itu, rekomendasi *workshop* irigasi Way Seputih untuk rencana tindak lanjut advokasi irigasi hanya terdiri atas empat hal :

1) Mendorong penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada petani secara adil dengan mendesak Raperda tentang penyerahan pengelolaan irigasi yang telah dibuat dalam *workshop* irigasi kepada DPRD Lampung Tengah.
2) Melakukan reorganisasi P3A untuk kepentingan kemandirian organisasi petani dan dalam rangka menerima pengelolaan irigasi.
3) Melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani, P3A Desa, dan P3A Gabungan dalam rangka memotong ketergantungan petani kepada pihak lain seperti pemerintah dan LSM.

4) Menunjuk secara khusus Jaringan Wakak Jukuk Lampung sebagai ujung tombak (*frontline*) dalam menjalankan proses advokasi dan agenda rekomendasi *workshop*.

Kopi Ke-7

Pemberdayaan Petani

1. Nalar

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari ketidakberdayaan (*powerless-ness*). Dalam konteks advokasi irigasi, ketidakberdayaan petani berkaitan dengan dua hal: *pertama*, ketidakmampuan petani untuk memperoleh sumber daya air dengan mudah tanpa konflik dan kesulitan. *Kedua*, ketidakmampuan petani terlibat dalam kekuasaan yang mengatur dan memutuskan pengelolaan, pemanfaatan, dan mekanisme distribusi sumber daya air. Karena itu, pemberdayaan dalam konteks advokasi irigasi harus diarahkan supaya petani dapat memperoleh dan memanfaatkan air dengan mudah tanpa konflik dan kesulitan serta terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan air irigasi.

Pemberdayaan dalam konteks advokasi irigasi harus diarahkan supaya petani dapat memperoleh dan memanfaatkan air dengan mudah tanpa konflik dan kesulitan serta terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan air

Berkaitan dengan beberapa pengertian di atas, maka sebaiknya pemberdayaan petani didasarkan pada asumsi bahwa:

Pertama, petani selama ini bukan pihak pengelola irigasi. Dengan demikian, keahlian mengelola hanya dimiliki oleh dinas pemerintah. Marjinalisasi petani dari proses pengelolaan irigasi ini pada kenyataannya menggerus aspirasi dan kontrol pengelolaan irigasi oleh petani.

Kedua, petani tengah dihadapkan pada pilihan untuk mengelola irigasi secara mandiri dan independen dengan organisasi (dan semangat) yang relatif baru. Padahal, kebijakan negara tentang komersialisasi air baru-baru ini justru mempunyai kecenderungan untuk melibatkan swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Semangat kebijakan pengelolaan irigasi yang sangat proswasta harus diwaspadai, karena jika petani tidak mampu menerima penyerahan pengelolaan irigasi, maka pengelolaan tersebut akan diserahkan kepada pihak swasta.

Yang paling tragis dari praktik pengelolaan irigasi yang didominasi pemerintah ini adalah hilangnya prinsip 'air sebagai ikatan solidaritas petani.'

Ketiga, irigasi selama ini dikelola oleh pemerintah tanpa melibatkan petani. Karena itu, kemampuan mengelola irigasi yang dimiliki petani dari generasi ke generasi hilang. Hal paling tragis dari praktik pengelolaan irigasi yang didominasi pemerintah ini adalah hilangnya prinsip 'air sebagai ikatan solidaritas petani.'

Keempat, menjaga kesinambungan kerja advokasi irigasi dengan cara melibatkan sebanyak mungkin kelompok tani dan organisasi petani.

Kelima, penguatan petani dan kelompok tani akan menjadi basis bagi agenda advokasi berikutnya.

2. Tahapan

Pemberdayaan petani adalah upaya untuk mendorong petani dalam kelompok, organisasi petani pengelola air tingkat desa, dan organisasi petani pengelola air tingkat jaringan sekunder (gabungan P3A) menjadi lebih mandiri dan mampu melakukan pengelolaan irigasi tanpa tergantung pada pemerintah. Penting untuk disadari sejak semula oleh pelaku advokasi bahwa pengelolaan irigasi oleh petani tersebut jangan sampai menimbulkan konflik di tingkat mereka.

Berkaitan dengan pemberdayaan petani untuk mengelola air tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku advokasi, antara lain :

Pertama, pelaku advokasi harus membentuk tim yang terdiri atas petani, baik dari kelompok maupun dari organisasi petani pengelola air dan pendamping petani (jika dibutuhkan) yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan *capacity assessment* dan *need assessment*. Untuk itu diperlukan sumber daya petani yang mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan irigasi, kebijakan penyerahan pengelolaan irigasi, pengelolaan organisasi petani, dan lain-lain. Jika kapasitas untuk melakukan *assessment* tersebut tidak dimiliki petani, pelaku advokasi dapat melibatkan pihak lain yang mempunyai keahlian itu.

Kedua, harus dilakukan *capacity assesment* (penelitian tentang kemampuan) untuk melihat kemampuan, kelemahan, dan potensi petani dalam mengelola irigasi.

Ketiga, perlu dilakukan *need assessment* (analisis kebutuhan) petani dalam rangka mengukur kesiapan petani dalam menerima penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah jika petani bermaksud menerima penyerahan tersebut.

Keempat, berdasarkan hasil *assessment* kemampuan dan analisis kebutuhan tersebut, pelaku advokasi memfasilitasi kelompok petani, P3A Desa, dan P3A Gabungan (jika ada) untuk merumuskan *draft* silabus pemberdayaan.

Kelima, pelaku advokasi harus mempersiapkan pendamping, baik dari petani sendiri atau, jika perlu, pendamping dari pihak lain yang mempunyai pengalaman pendampingan dan relevan dengan materi silabus pemberdayaan.

Keenam, pelaku advokasi harus mempersiapkan alat pemberdayaan lain yang mungkin dibutuhkan dalam proses tersebut, misalnya pelatihan untuk

pendamping atau sejenis *training of trainers* (TOT), kerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai kecakapan tentang materi pemberdayaan, atau membuat buku panduan tentang materi tertentu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan silabus pemberdayaan adalah :

1. Silabus harus mencerminkan kebutuhan dan menjawab persoalan petani untuk mengelola air irigasi
2. Silabus harus memuat prinsip-prinsip pengelolaan dan falsafah masyarakat lokal tentang air irigasi
3. Silabus harus memuat prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, kritis, dan membebaskan
4. Silabus harus dibuat dan didesain sederhana agar dapat mudah dimengerti oleh petani
5. Silabus harus memuat materi, pendamping, waktu, dan pola pemberdayaan yang jalas
6. Silabus harus memuat metode pemberdayaan yang jelas dan selalu memberi pilihan pada petani untuk sewaktu-waktu berubah menurut kebutuhan petani
7. Silabus harus dibuat sesuai dengan kebutuhan tingkatan pemberdayaan, misalnya silabus pemberdayaan untuk kelompok tani, untuk P3A Desa, P3A Gabungan, dan lain-lain

Contoh 4. Matriks Silabus Pemberdayaan Kelompok Tani

No	Materi	Tempat	Waktu	Kelompok	Pendamping
1	Pengelolaan air tingkat kuarter				
2	Pengelolaan fisik jaringan kuarter				
3	Pengelolaan kelompok				
4	Pengelolaan keuangan kelompok				
5	Pengelolaan konflik				
6	Dan lain–lain				

Sekolah lapangan petani mengandaikan petani sebagai murid sekaligus guru bagi dirinya sendiri dan menempatkannya sebagai pusat dari metode belajar ini

3. Metode

Metode pemberdayaan petani tentu harus berbeda dengan pola pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kepada petani, karena pelatihan yang pernah dilakukan oleh pemerintah kepada petani bukan dalam rangka untuk melakukan pemberdayaan, tetapi untuk meningkatkan kemampuan teknis produksi. Pelatihan model ini banyak melupakan aspek nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip pembebasan.

Metode pemberdayaan petani bukan saja harus menjadi alat efektif untuk meningkatkan kualitas petani dalam mengelola air dan mengurangi konflik, tetapi juga harus mampu mendorong kesadaran petani untuk tidak berada dalam pengaruh pihak lain. Jika metode pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka advokasi irigasi tersebut justru menjadi jalan baru ketergantungan petani kepada pihak lain, itu artinya sama saja dengan mengulangi kerja penguatan yang pernah dilakukan oleh pemerintah.

Tahapan menentukan metode pemberdayaan seharusnya menjadi bagian dari proses pemberdayaan petani sehingga petani terlibat dari awal upaya pemberdayaan itu. Prinsip yang penting dijadikan dasar dalam pemberdayaan petani adalah petani harus ditempatkan sebagai pelaku atas pemberdayaan untuk dirinya sendiri. Karena itu, keterlibatan pendamping atau pihak lain dalam proses ini harus ditekan sampai ke titik minimal.

Pendamping lapangan dalam metode sekolah lapangan hanya sebagai "kawan" belajar untuk bertukar pengalaman

Metode pemberdayaan yang mungkin sesuai dengan prinsip tersebut di atas adalah sekolah lapangan bagi petani atau yang dikenal dengan *farmer field school*. Sekolah lapangan bagi petani mengandaikan petani sebagai murid sekaligus guru bagi dirinya sendiri dan menempatkannya sebagai pusat dari metode belajar ini atau yang disebut dengan pendidikan orang dewasa (andragogi). Karena itu, sekolah lapangan bagi petani tidak membutuhkan narasumber atau pengajar, metode ini hanya membutuhkan pendamping lapangan.

Peran pendamping lapangan tentu sangat berbeda dengan peran guru dalam metode pengajaran kelas seperti yang dikenal di sekolah formal. Pendamping lapangan dalam metode sekolah lapangan hanya sebagai "kawan" belajar untuk bertukar pengalaman. Karena itu, pendamping lapangan haruslah seseorang yang mempunyai dasar pengalaman lapangan tentang materi yang dibutuhkan petani. Paling tidak pendamping lapangan petani harus mengetahui lingkungan alam, sistem irigasi, budaya petani dan peladang, dan sistem pengelolaan irigasi oleh pemerintah.

Metode sekolah lapangan ini sebenarnya sudah banyak digunakan di lingkungan LSM pendamping petani pada beberapa program dampingan, seperti program untuk pengendalian hama, program pertanian organik, program pemanfaatan pekarangan, dan lain-lain. Metode ini cukup berhasil menjadi alat pemberdayaan petani dalam beberapa program yang disebut di atas.

Gambar 13.
Pendamping lapangan harus seseorang yang memiliki dasar pengalaman tentang materi yang dibutuhkan.

Selain aspek teknis sekolah lapangan, aspek ideologis adalah faktor penting dalam pemberdayaan petani

Dalam kasus petani Way Seputih Lampung Tengah, metode ini pernah dilakukan oleh Jaringan Wakak Jukuk Lampung untuk program pengendalian hama terpadu atau yang dikenal dengan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). SLPHT juga dipakai dalam pemberdayaan untuk petani pemakai air. Metode ini terbukti efektif menjadi alat pemberdayaan petani. Sebagai metode lapangan, pada tingkat tertentu cara ini juga dapat menjadi alat membangun solidaritas petani.

Sebagai alat pemberdayaan petani, tentu saja metode ini bukan tanpa kelemahan. Beberapa kasus yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan metode ini menunjukkan kelemahan sekolah lapangan bagi petani karena kurangnya pemahaman pemandu lapangan terhadap prinsip-prinsip yang dipakai dalam metode ini; prinsip-prinsip tersebut adalah sekolah lapangan sebagai pendidikan yang manusiawi, sekolah lapangan sebagai pendidikan yang membebaskan, sekolah lapangan sebagai pendidikan kritis, dan prinsip kerelawanan.

Berkaitan dengan kelemahan yang terjadi dalam praktik sekolah lapangan bagi petani di beberapa program pendampingan tersebut, sebaiknya pemberdayaan untuk petani ini memperhatikan dua aspek sekaligus, yaitu aspek teknis dan aspek ideologis. Aspek teknis menunjuk pada tema materi dalam silabus pemberdayaan dan perangkat belajar, sementara aspek ideologis menunjuk pada penegasan (baca: penyampaian) prinsip-prinsip yang dijadikan dasar metode ini.

4. Evaluasi

Evaluasi terhadap pemberdayaan ini diperlukan bukan saja untuk tujuan melihat kemajuan, tetapi juga untuk melihat efektivitas metode belajar yang dipakai sebagai alat pemberdayaan

Evaluasi pemberdayaan petani dalam advokasi irigasi mutlak diperlukan karena pemberdayaan adalah proses mendorong sekelompok orang untuk berubah dan melakukan perubahan berkaitan dengan pertahanan hidup. Evaluasi terhadap pemberdayaan ini diperlukan bukan saja untuk melihat kemajuan, tetapi juga untuk melihat efektivitas metode belajar yang dipakai sebagai alat pemberdayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, sebaiknya evaluasi dilakukan untuk melihat beberapa hal seperti:

Pertama, kuantitas keterlibatan peserta setiap pertemuan.

Kedua, kuantitas capaian pemberdayaan, misalnya berapa kelompok tani, P3A Desa, dan P3A Gabungan yang telah, sedang, dan akan melakukan pemberdayaan dengan materi apa dan didampingi siapa.

Ketiga, berapa persen materi yang telah diselesaikan oleh dampingan siapa di kelompok mana.

Keempat, berapa dampingan yang telah dan sedang melakukan proses pemberdayaan secara mandiri tanpa pendamping.

Kelima, tingkat efektivitas metode sekolah lapangan bagi petani yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan.

Keenam, ada atau tidak modifikasi-modifikasi yang dilakukan petani terhadap metode yang sedang digunakan.

Ketujuh, ada atau tidak perubahan silabus yang dilakukan oleh petani berkaitan dengan kebutuhan untuk menjawab persoalan khusus tentang air.

Kedelapan, apa pendapat petani tentang pemberdayaan yang sedang dilakukan, menjawab persoalan atau justru menjadi beban kerja mereka.

Kesembilan, apa pendapat mereka berkaitan dengan metode, materi, dan pendamping jika ada.

Matriks 5. Evaluasi Pemberdayaan Petani

No	Dampingan	Materi	Tingkat Keberhasilan	Tingkat Kegagalan	Pendamping
1	Kelompok Tani				
2	P3A Desa				
3	Gabungan P3A				

Kopi Ke-8

(Re)Organisasi Petani Sebagai Alat

1. Nalar

Membentuk organisai petani adalah mutlak sebagai ujung tombak (front-line) proses advokasi irigasi

Dalam proses advokasi irigasi, reorganisasi adalah suatu pilihan (*option*), artinya agenda ini dapat dan mungkin dilakukan jika organisasi petani tidak dapat menjadi mitra atau ujung tombak (*front-line*) dalam proses advokasi irigasi. Organisasi petani dalam konteks advokasi irigasi adalah alat pendorong proses perubahan, karena itu keberadaan organisasi petani adalah mutlak dalam konteks advokasi. Hampir mustahil proses perubahan yang dilakukan petani dapat berhasil tanpa alat yang berbentuk organisasi petani.

Seperti yang disebut di atas, reorganisasi adalah pilihan jika petani memang telah memiliki organisasi tapi tidak mungkin untuk menjadi alat perubahan. Tentu saja bukan reorganisasi yang dibutuhkan jika petani tidak memiliki organisasi petani, melainkan pembentukan organisasi petani. Reorganisasi mempunyai pengertian yang berbeda dengan pembentukan organisasi petani, meskipun mungkin dalam praktik hampir sama.

Reorganisasi petani adalah upaya perubahan oleh petani terhadap organisasi yang sudah ada tapi tidak berjalan atau tidak dapat menjadi alat perjuangan petani, sedangkan pembentukan organisasi petani adalah upaya petani yang dilakukan untuk menciptakan alat perjuangan dalam rangka menjawab

persoalan yang sedang dihadapi. Organisasi petani dapat berbentuk apa saja, seperti paguyuban petani, jaringan kerja petani, sindikasi petani, serikat petani, dan lain-lain.

Hal yang penting diperhatikan oleh petani dan pelaku advokasi dalam pembentukan dan reorganisasi petani adalah prinsip-prinsip organisasi petani sebagai berikut:

Pertama, kedaulatan organisasi petani harus berada di tangan anggota yang diwujudkan dalam kongres atau apa pun namanya sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi organisasi.

Organisasi petani harus mempunyai tujuan dan strategi perjuangan yang berorientasi pada perubahan nasib petani

Kedua, organisasi petani sebaiknya berbentuk organisasi massa yang mempunyai hak dan otonomi secara organisatoris.

Ketiga, bentuk perjuangan organisasi petani umumnya perjuangan massa (melibatkan semua anggota organisasi dan diputuskan oleh anggota lewat mekanisme permusyawaratan organisasi).

Keempat, organisasi petani mempunyai tujuan dan strategi perjuangan yang berorientasi pada perubahan nasib petani dengan mengupayakan penguatan basis pergerakan petani dan perubahan kebijakan.

Kelima, organisasi petani mempunyai struktur kepengurusan dan struktur organisasi yang relatif *familiar* dan sederhana.

Keenam, organisasi petani mempunyai mekanisme keanggotaan dan pola hubungan antara anggota dengan organisasi yang tertata.

Ketujuh, organisasi petani mempunyai jenjang keanggotaan yang biasanya terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan atau luar biasa. Anggota

luar biasa atau kehormatan harus melewati mekanisme perekrutan dan persyaratan tertentu.

Kedelapan, organisasi petani mengatur hak dan kewajiban anggota, disiplin anggota, gugurnya keanggotaan, mekanisme pemberhentian, dan pembelaan oleh anggota.

Kesembilan, organisasi petani mengatur tugas dan wewenang masing-masing struktur organisasi secara rinci dengan mekanisme pertanggungjawaban terbuka.

Organisasi petani harus mempunyai mekanisme keanggotaan dan pola hubungan antara anggota dengan organisasi yang tertata

Kesepuluh, untuk mewujudkan visi dan misi organisasi biasanya organisasi petani mempunyai perangkat dan perlengkapan organisasi seperti departemen, biro-biro, atau divisi-divisi.

Kesebelas, organisasi petani mempunyai bentuk permusyawaratan (baca: rapat-rapat) berjenjang sesuai dengan kegunaan dan kepentingan organisasi.

Keduabelas, sumber keuangan organisasi petani paling besar biasanya dari iuran anggota dan dipergunakan untuk modal perjuangan organisasi dalam rangka perubahan nasib petani.

Ketigabelas, organisasi petani biasanya mempunyai peraturan yang berisi mekanisme pemberian teguran dan sanksi terhadap anggota yang melakukan kolusi dengan lawan-lawan petani, membuat keputusan politik yang bertentangan dengan perjuangan petani, mencemarkan nama baik organisasi, melakukan penggelapan uang organisasi, dan melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan petani.

Dalam praktiknya, banyak organisasi petani yang tidak menggunakan prinsip-prinsip seperti yang disebut di atas. Hal ini terjadi karena dua kemungkinan

yaitu: 1) organisasi petani tersebut adalah bentukan pemerintah untuk melayani kepentingan dominasi negara terhadap petani; atau 2) organisasi petani tersebut dibentuk bukan untuk menjadi alat perjuangan dan perubahan nasib petani, tetapi sebagai alat mobilisasi politik untuk merebut kekuasaan.

Kasus organisasi petani pemakai air (P3A) di jaringan irigasi Way Seputih menunjukkan bahwa organisasi tersebut dibuat bukan untuk melayani kepentingan petani, melainkan untuk kepentingan pemerintah.

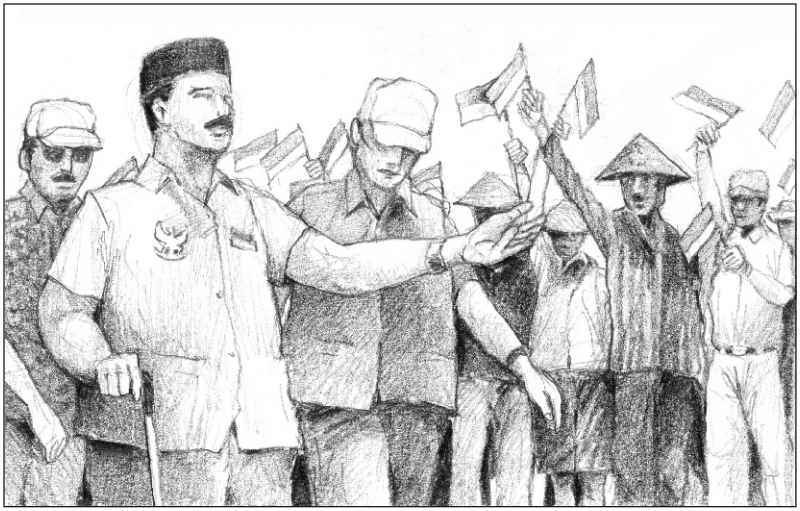

Gambar 14.
Kemungkinan organisasi petani adalah bentukan pemerintah dan alat mobilisasi politik.

Kasus organisasi petani pemakai air (P3A) di jaringan irigasi Way Seputih menunjukkan bahwa organisasi tersebut dibuat bukan untuk melayani kepentingan petani, melainkan untuk melayani kepentingan pemerintah. Organisasi tersebut bukan hanya dibentuk oleh pemerintah, tetapi sepenuhnya bertanggung-jawab kepada pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban terbalik oleh organisasi pemakai air biasanya bukan saja berakibat pada seringnya penggelapan uang iuran dana tirta (ipair), tapi organisasi tersebut juga tidak mampu menjadi alat perjuangan petani untuk

mendapat jatah air yang layak. Karena itu, salah satu rekomendasi *workshop* irigasi Way Seputih adalah reorganisasi P3A.

2. Tahapan

Reorganisasi dalam advokasi irigasi berada dalam satu paket dengan pemberdayaan petani seperti yang pernah dijelaskan di depan, sehingga proses reorganisasi juga hampir sama dengan tahapan pemberdayaan. Yang berbeda tahapannya adalah pembentukan organisasi petani sebagai alat perjuangan. Perlu ditegaskan bahwa sebagai tahapan dalam proses advokasi, pembentukan organisasi lebih bersifat *optional* (pilihan) dari pada keharusan, tergantung kebutuhan advokasi.

Tahapan pembentukan organisasi petani dalam rangka kepentingan perjuangan nasib petani (bukan hanya untuk kepentingan advokasi irigasi) adalah :

Pertama, pelaku advokasi harus membentuk tim untuk melakukan jajak pendapat tentang kebutuhan petani terhadap organisasi yang akan dibentuk.

Kedua, tim advokasi melakukan analisis atas hasil jajak pendapat tersebut dan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi yang dikeluarkan sebaiknya berisi penilaian hasil jajak pendapat dan materi pendidikan keorganisasian untuk petani.

Ketiga, membentuk tim pendamping untuk sekolah lapangan tentang organisasi petani dan apa pentingnya berorganisasi bagi petani untuk memperjuangkan nasibnya.

Keempat, menyelenggarakan pendidikan sekolah lapangan bagi petani tentang keorganisasian secara sistematis dan mendalam (tidak instan).

Kelima, melakukan evaluasi terhadap pendidikan sekolah lapangan dan mengeluarkan rekomendasi tentang persiapan petani untuk membentuk organisasi (jika petani sudah siap). Rekomendasi juga perlu memuat dasar ikatan organisasi yang akan dibentuk, misalnya ikatan ekosistem sungai, ikatan jaringan irigasi, ikatan ekosistem tanah (dataran rendah atau dataran tinggi), atau ikatan daerah administratif seperti kecamatan, kabupaten, provinsi, dan seterusnya.

Keenam, membuat tim persiapan atau panitia kerja untuk pembentukan organisasi petani.

Ketujuh, menyelenggarakan *rembug tani* untuk pembentukan organisasi petani yang dihadiri oleh perwakilan petani atau kelompok tani di daerah jaringan atau ekosistem yang dipilih.

Kedelapan, jika organisasi petani telah atau jadi dibentuk dalam rembug tani tersebut, maka pengurus organisasi terpilih harus mempersiapkan proses legalisasi organisasi ke kantor notariat dan publikasi organisasi.

Contoh 6. Matriks Silabus Pendidikan Organisasi untuk Petani

No	Kelompok/ Desa	Materi	Pertanyaan Kunci	Pendamping
1	Kelompok I	Jati Diri Petani	Siapa petani?	
2	Kelompok II	Manajemen Organisasi Petani	Bagaimana mengelola organisasi petani?	
3	Kelompok III	Petani dan Politik	Apa kaitan petani dan proses politik?	
4	Kelompok IV	Petani dan Pasar	Perlukah petani terhadap pasar?	

3. Metode

Metode pembentukan organisasi petani sangat tergantung pada format dan agenda acara yang telah dipersiapkan atau disepakati peserta rembug tani. Biasanya metode rembug tani untuk pembentukan organisasi petani relatif sederhana seperti metode *workshop* yang pernah dijelaskan di depan dalam panduan ini. Akan lebih mudah apabila metode pembentukan organisasi petani tersebut diterjemahkan dalam bentuk susunan agenda acara.

Susunan agenda pembentukan organisasi petani:

1. Presentasi oleh petani tentang signifikansi organisasi petani sebagai alat perjuangan untuk perubahan nasib.
2. Penawarkan tata tertib persidangan pada peserta *rembug tani*.
3. Menawarkan pembentukan komisi dan materi pembahasan komisi.
4. Membagi peserta menjadi empat komisi (sesuai dengan kebutuhan) yang masing-masing bertugas untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, misalnya anggaran dasar (AD), angaran rumah tangga (ART), program besar organisasi, dan peraturan organisasi .
5. Sidang pleno komisi untuk membahas hasil rapat komisi dan *drafting* AD/ART maupun peraturan organisasi.
6. Menawarkan mekanisme pemilihan pengurus organisasi.
7. Pembentukan formatur jika diperlukan.
8. Pemilihan pengurus organisasi, biasanya hanya memilih ketua dan wakil ketua.

Kopi Ke-9

Advokasi: Proses Publik

1. Nalar

Proses publik menjadi tahapan strategis untuk membalikkan persepsi masyarakat dan negara bahwa persoalan irigasi petani adalah persoalan semua pihak

Proses publik dalam konteks strategi advokasi irigasi adalah upaya untuk mendorong isu irigasi menjadi persoalan masyarakat umum dan menjadi perhatian khusus bagi pemegang kekuasaan baik pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah). Banyak pihak berpikir bahwa irigasi adalah persoalan petani saja, bahkan kekeringan yang setiap tahun diderita petani dianggap murni persoalan petani. Dalam konteks ini, proses publik menjadi tahapan strategis untuk membangun persepsi masyarakat dan negara bahwa persoalan irigasi petani adalah persoalan semua pihak.

Air memang bukan satu-satunya persoalan untuk keberlanjutan pertanian, tetapi air menjadi persoalan serius dalam melestarikan kehidupan manusia. Di tingkat politik nasional, pertanian bukan isu yang menarik untuk diperdebatkan dan dikampanyekan oleh kontestan pemilu, bahkan kursi kementerian untuk departemen ini juga tidak mempunyai daya tarik seperti halnya kursi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua BPPN, dan lain-lain. Karena itu, wajar jika semua persoalan yang berkaitan dengan petani dan pertanian selalu masuk ke jalan buntu. Diperlukan kerja serius untuk meyakinkan semua pihak bahwa keberlanjutan pertanian di Indonesia adalah masa depan semua pihak.

Petani Indonesia sedang menghadapi persoalan yang sangat rumit sementara perhatian negara terhadap petani setengah hati; petani seperti gelandangan di negeri agraris. Padahal, persoalan petani yang berada tepat di depan mata adalah :

Pertama, hutan gundul, pengelolaan, dan pemanfaatan yang tidak berorientasi pada kelestarian ekosistem alam.

Kedua, pengelolaan dan pelestarian air irigasi yang sangat memprihatinkan (lihat anggaran untuk sektor pengelolaan irigasi dan pertanian dalam APBN-APBD).

Negara telah menjadi bagian dari "persekongkolan internasional" (boleh dibaca: WTO) yang secara sistematis mendorong petani Indonesia masuk ke jalan buntu

Ketiga, rendahnya subsidi negara untuk sarana produksi pertanian (saprotan).

Keempat, harga komoditas pertanian berada di bawah garis rasional dibanding total biaya produksi yang dikeluarkan petani.

Kelima, rendahnya proteksi negara terhadap komoditas pertanian dalam persaingan pasar internasional.

Dapat dipahami apabila negara, dalam hal ini pemerintah, tidak begitu memperhatikan persoalan keberlanjutan proses produksi pertanian. Nampaknya mereka berasumsi bahwa kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dapat diperoleh dari pasar, apalagi negara telah menjadi bagian dari "persekongkolan internasional" (boleh dibaca: WTO) yang secara sistematis mendorong petani Indonesia masuk ke jalan buntu. Karena "persekongkolan" tersebut, pemerintah Indonesia meletakkan ketahanan pangan nasional di dalam akses pasar, dengan asumsi jika masyarakat Indonesia dapat mengakses pasar beras secara mudah dan murah, maka kebutuhan pangan nasional tidak akan kekurangan. Hal inilah yang menjelaskan perilaku (buruk)

pemerintah yang lebih tertarik untuk membeli pesawat sukhoi dengan uang petani daripada membeli gabah petani.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, proses publik harus dapat dijadikan alat untuk mempengaruhi masyarakat dan negara tentang pentingnya kelestarian air dan keberlanjutan pertanian di Indonesia. Agenda ini dapat dilakukan oleh siapa pun, bahkan di luar konteks advokasi irigasi. Petani dan pertanian sedang membutuhkan alat propaganda untuk menjadi pengeras suara bagi perbaikan nasib mereka.

2. Tahapan

Untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat struktur negara, pelaku advokasi biasanya melakukan* public hearing, lobby, legal drafting, *dan lain-lain

Proses publik bisa berbentuk kegiatan apa saja sesuai dengan kebutuhan dan kepada siapa upaya tersebut ditujukan, baik struktur negara maupun masyarakat. Proses publik yang dilakukan dalam rangka mempengaruhi opini masyarakat biasanya dilakukan dengan memanfaatkan media publik seperti media cetak atau media elektronik. Semetara itu, untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat negara, pelaku advokasi biasanya melakukan *public hearing, lobby*, *legal drafting,* dan lain-lain.

Publikasi dalam media cetak atau elektronik dapat dilakukan dengan media sendiri (milik lembaga) atau kerja sama dengan pihak lain seperti melakukan *press release* dan *press conference,* atau kerja sama saling menguntungkan dengan perusahaan media. Sementara upaya mempengaruhi kekuasaan untuk perubahan kebijakan biasanya dengan menggunakan *lobby* politik, tekanan media, aksi massa, dan *hearing* dengan lembaga negara atau lembaga politik.

Untuk melakukan semua proses publik tersebut, tentu dibutuhkan tahapan yang serius, misalnya untuk melakukan *hearing* tentang usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai irigasi, pelaku advokasi harus melalui beberapa

tahapan, antara lain :

Pertama, harus dilakukan analisis sosial tentang persoalan irigasi baik yang berkaitan dengan hal-hal teknis irigasi maupun persoalan sosial-ekonomi petani pemakai air irigasi.

Kedua, melakukan analisis kritas terhadap isi dokumen kebijakan untuk melihat konsistensi, sinkronisasi, keberpihakan, dan motif kebijakan negara kepada petani.

Proses publik bisa berbentuk kegiatan apa saja sesuai dengan kebutuhan dan kepada siapa upaya tersebut ditujukan, baik struktur negara maupun masyarakat

Ketiga, membuat rumusan Raperda dan naskah akademis berdasarkan analisis sosial irigasi dan analisis isi kebijakan dengan segala aspeknya.

Keempat, mendiskusikan naskah akademis dan Raperda dengan pihak ahli dalam bidang tersebut, misalnya pemerhati irigasi dan pakar hukum tata negara.

Kelima, membentuk tim *hearing* ke DPRD atau badan kelengkapannya seperti komisi yang membidangi irigasi, pertanian, dan kesejahteraan rakyat.

Keenam, membuat kesepakatan waktu dan tempat dengan DPRD atau badan kelengkapannya untuk melakukan *hearing*.

Ketujuh, jika *hearing* gagal (tidak ada komitmen dari DPRD untuk meluluskan Raperda atau *hearing* tidak jadi dilaksanakan), pelaku advokasi harus mempersiapkan rencana cadangan, misalnya dengan *lobby* politik, tekanan massa, tekanan media, dan cara-cara lain yang tidak berpotensi menimbulkan keributan atau anarki.

Naskah akademis dalam usulan Raperda memuat hasil analisis sosial irigasi dan analisis isi kebijakan yang mendukung isi Raperda yang akan diusulkan, karena itu dalam menyusun naskah akademis pelaku advokasi perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

1. Naskah akademis harus mencerminkan persoalan irigasi, kondisi sosial-ekonomi petani, dan kelemahan kebijakan yang selama ini berlaku berdasarkan analisis sebelumnya.
2. Naskah akademis harus didesain sederhana agar mudah dimengerti oleh anggota dewan dan petani.
3. Naskah akademis harus dikonfirmasikan kepada petani dan ahli yang bersangkutan.
4. Naskah akademis harus disusun sebagai argumentasi untuk meyakinkan pihak lain.

3. Metode

Metode dalam proses publik tergantung pada alat apa yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain dalam advokasi irigasi. Metode *press release* dan *press conference* tentu sangat berbeda dengan *public hearing* dengan DPR(D). Bahkan dalam *public hearing* sekalipun, metode dapat berbeda-beda tergantung pada kesepakatan antara pelaku advokasi dengan pihak dewan.

Public hearing bukan hanya dilakukan oleh tim yang telah disepakati, biasanya agenda ini juga diikuti dengan tekanan massa, *lobby* politik, dan tekanan media dalam bentuk *press conference*. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi tekanan kepada pengambil kebijakan berkaitan dengan Raperda yang diusulkan.

4. Evaluasi

Evaluasi dalam proses publik ini sangat diperlukan untuk melihat capaian (tingkat keberhasilan atau kegagalan) dan efektivitas strategi yang digunakan oleh pelaku advokasi irigasi dalam *public hearing*. Jika *public hearing* dinilai gagal atau ada indikasi bahwa pihak dewan tidak memiliki komitmen untuk meluluskan Raperda yang disusulkan petani, maka pelaku advokasi perlu membuat *lobby* dan tekanan politik yang lebih serius dan intensif.

Yang harus dihindari dalam kontrak politik dengan partai politik adalah menjadikan nasib petani sebagai pertaruhan politik karena suatu imbal jasa

Lobby politik bisa dilakukan dengan menggalang aliansi politik dengan partai politik di luar dewan dan lebih penting dengan fraksi-fraksi partai dalam dewan sendiri. Dalam *lobby* politik, yang harus dihindari adalah kontrak politik yang menjadikan petani sebagai komoditas politiknya, sebab partai politik biasanya meminta sejumlah komitmen dari pelaku advokasi atas apa yang mereka sebut sebagai "jasa politik". Karena itu, *lobby* politik kepada fraksi atau partai sangat jarang dilakukan oleh pelaku advokasi.

Pelaku advokasi lebih suka melakukan tekanan politik lewat media atau surat-surat protes yang ditujukan kepada partai politik. Surat protes atau tekanan lewat media biasanya berisi kecaman atas ketidakseriusan dewan dalam menanggapi usulan Raperda petani atau ancaman untuk tidak terlibat dalam pemilihan umum berikutnya dengan menekankan pentingnya suara petani bagi kemenangan partai politik.

Kopi Ke-10

Kopi Penutup

"Selanjutnya bagaimana?" kata Mas Karyo dalam sinema elektronik (sinetron) *Si Doel Anak Sekolahan* yang ditayangkan televisi swasta beberapa waktu lalu. Dengan nada bercanda penulis juga ingin mengajukan pertanyaan yang sama, "Selanjutnya bagaimana dengan nasib petani yang sedang mengalami krisis air?" Jangan sampai petani semakin tidak dapat menikmati kopi karena kekurangan air.

Petani sedang berhadapan dengan rezim rakus yang bernama pasar global, sosok dari rezim ini memang belum begitu jelas di mata petani tetapi pengaruh buruknya telah dirasakan oleh petani. Padahal, selain berhadapan dengan sistem pasar raksasa yang tidak terkontrol, petani juga berhadapan dengan musuh nyata yang tidak berpihak, yaitu kekeringan (air), rendahnya modal pertanian, berkurangnya tanah pertanian, hilangnya subsidi negara, kebijakan pemerintah yang cenderung propasar, dan lain-lain.

Gambar 15.
Harus ada koalisi strategis di antara pelaku perubahan dan kelompok pro kaum miskin.

Persoalan air hanya salah satu dari sekian persoalan petani yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak dalam waktu singkat. Karena itu, harus ada semacam **koalisi strategis** – jika boleh memakai istilah itu – di antara pelaku perubahan dan kelompok pro kemiskinan untuk menggalang kerja bersama dalam mengurangi dampak krisis air yang lebih besar terhadap kemiskinan petani.

Terbitnya "Buku Refleksi Pengalaman Advokasi Irigasi " ini hanya contoh kecil dari usaha beberapa pihak untuk melakukan kerja (perubahan) dalam rangka mengurangi beban petani menghadapi krisis air dan konflik irigasi. Bagi pelaku advokasi yang pernah melakukan pendampingan kepada petani yang sedang dalam pusaran krisis air dan konflik irigasi, maka mempertahankan tradisi petani untuk tetap dapat minum secangkir kopi di pagi hari adalah kebanggaan luar biasa. Apalagi dapat mempertahankan aliran air irigasi ke dalam petak sawah petani.

Daftar Bacaan

Baehaqi, Imam dan Zaim Saidi. 1991. *Dari Pelayanan Ke Pembelaan*. Jakarta: YLKI.

Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Institut Pertanian Bogor. 1971. Survey sosial Ekonomi Daerah Pengairan Way Seputih lampung Tengah. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Freire, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: Read & Pustaka Pelajar.

Illich, Ivan. 2000. *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. Jakarta: YOI.

Kartono, Kartini. 1988. *Patologi sosial*. Jakarta: Rajawali.

Kustanti, Ratri, dkk. 2003. *Fair Trade: Sebuah Alternatif Positif*. Surakarta: Yayasan Samadi.

Magnis, Suseno-Frans. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Magnis, Suseno-Frans. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.

Mahardika, Timur. 2000. *Gerakan Massa: Mengupayakan Demokrasi Secara Damai*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Muluk, Khairul. 2002. "Mewujudkan Partisispasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah". *Jurnal Forum Inovasi*. Jakarta: FISIP-UI.

Peraturan Pemerintah RI No. 77 Tahun 2002 Tentang Irigasi. Jakarta: Ditjen. Pemerintah Daerah Dep. Dalam Negeri & Otonomi Daerah.

Rahadi dan Wahyuning (eds.). 2000. Tim Program Pertanian Berkelanjutan. Panduan: Melaksanakan SLPHT Kacang Hijau (Pengalaman Belajar Bersama dengan Petani). World Education dan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP).

Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ryan, Tim, dkk. 2000. *Manual Pelatihan Lobbying; Bagaimana Serikat Buruh/ Pekerja Terlibat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik*. Jakarta: ACILS-Indonesia.

Sitorus, Felix. 2002. "Lingkup Agraria" dalam Endang Suhendar, dkk. (ed.). *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Yayasan AKATIGA.

Sofwan Samandawai. 2003. Studi Pengelolaan dan Pemanfaatan Irigasi Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Bandung: AKATIGA.

Tomatimasang, Roem, dkk. 2001. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin-Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

World Education Indonesia. 1991. Ancaman Kegagalan Dibalik Keberhasilan Bertanam JAHE. Kasus Penyakit Layu Bakteri dan Beberapa Penyakit Lain pada Jahe. Jakarta: World Education.

Profil Penulis

Pria muda yang pernah menulis dalam buku *Oposisi Abadi: Teologi Pemberontakan Kaum Muda* ini, bekerja sebagai staf peneliti di Yayasan AKATIGA Bandung dan aktif di Pusat Analisis Media (LIPsTIK) Bandung. Keberpihakan *alumni Fakultas Hukum Universitas Jend. Soedirman* pada kaum *marginal* telah dirintis sejak menjadi santri di Pondok Pesantren Karang Asem Paciran Lamongan, antara lain dengan ikut mendirikan *Banyumas Corruption Watch* dan Komunitas Baca *(Informal Education Movement)* Purwokerto. Kembali menjadi Anak Nelayan di kota kelahirannya, Tuban, adalah salah satu obsesinya.

Kerakusan sistem pasar telah merubah fungsi sosial air manjadi sekedar komoditas yang dapat diperjualbelikan. Situasi ini secara sistematis mengubah pola hubungan manusia dengan lingkungan alam yang selama ini menjadi sumber inspirasi kultural dan spiritual masyarakat. Dalam konteks pembangunan pertanian, praktik pengelolaan irigasi yang lebih beraspek teknis dan meminggirkan dimensi manusiawi juga telah mendorong hancurnya persekutuan panjang antara manusia dan alam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Air yang awalnya merupakan basis solidaritas manusia berubah menjadi sumber konflik vertikal dan horisontal di lingkungan petani. Untuk itu, buku Refleksi Advokasi Irigasi ini berusaha menawarkan dua aspek penting dalam advokasi irigasi : 1)Pendekatan manusiawi atas penyelesaian konflik irigasi dengan menempatkan pelaku konflik sebagai korban; 2)Menempatkan analisis sosial sebagai bagian penting dalam kerja advokasi irigasi.

AKATIGA Pusat Analisis Sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan. Ada empat topik besar yang menjadi fokus analisis kritis AKATIGA. *Pertama*, perburuhan dan hubungan kerja/hubungan industrial dengan isu sentral seputar kebijakan pengupahan, pengorganisasian buruh, dan pola-pola sengketa perburuhan. *Kedua*, dinamika usaha kecil dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat. *Ketiga*, masalah ketimpangan distribusi sumber daya utama rakyat yang difokuskan kepada isu struktur relasi agraria. *Keempat*, isu governance yang bertujuan untuk memberikan pandangan kritis terhadap berbagai inisiatif dikalangan 'civil society' maupun pemerintah. Keempat topik kajian AKATIGA tersebut dilakukan dalam upaya membuka peluang kelompok miskin untuk membangkitkan kemandiriannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

World Education (WE) adalah lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan masyarakat yang tidak berafiliasi dengan ras, golongan, agama, atau partai tertentu. Dengan visi “Pendidikan Untuk Semua", WE mempunyai misi "Memberi kesempatan pendidikan bagi mereka yang kurang mendapat kesempatan pendidikan". Sejak tahun 1991, WE bekerja dengan LSM di Indonesia untuk mengembangkan program pertanian berkelanjutan melalui Training Pengendalian Kama Terpadu (PHT) yang mendukung latihan dan jaringan petani dalam program pertanian berkelanjutan berpusat pada masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengasistensi keluarga petani miskin di Indonesia dalam mengembangkan kemampuan kritis terhadap ekologi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, dan meningkatkan produktivitas usaha tani.

YAYASAN AKATIGA
Jl. Cilamaya 7 , Bandung 40115 Indonesia
Telp. 022 4235526, Fax 022 4260875
E-mail: akatiga@indosat.net.id
Homepage: www.akatiga.or.id

WORLD EDUCATION INDONESIA
Jl. Tebet Dalam IV D/5A Jakarta 12810
Tel. 021-8297228, Fax. 021-8307591
E-mail: weindo@indo.net.id

ISBN: 979-8589-38-6